



RKPD

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru Selatan T.A. 2026**





BUPATI BURU SELATAN

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 185 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 satu tahun;

12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun;
13. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
16. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
18. Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah tolak ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output), dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (Impact).
25. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum dan sesudah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

27. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

BAB II POKOK-POKOK PENYUSUNAN

Pasal 2

Ruang Lingkup RKPD adalah:

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buru Selatan dalam periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (5) terdiri dari :

- Bab 1. Pendahuluan;
- Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab 3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab 7. Penutup

Uraian Bab I sampai Bab VII sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat ikut serta partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2026; dan

- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam menyusun KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2026.

BAB III PENYESUAIAN RKPD

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2026 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggunakan RKPD Tahun 2025 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada tanggal : 16 Juni 2025

BUPATI BURU SELATAN,



LA HAMIDI,

Diundangkan di : Namrole

Pada tanggal : 16 Juni 2025

PIH SEKRETARIS DAERAH BURU SELATAN



HADI LONGA, SE., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 10



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1. Proses Penyusunan	I-3
1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan	I-4
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-9
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-10
1.4.1. Maksud	I-10
1.4.2. Tujuan	I-10
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-11
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.2. Aspek Demografi Daerah	II-6
2.1.3. Wilayah Pengembangan	II-8
2.1.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan	II-9
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-15
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-15
2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial	II-23
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-25
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar	II-25
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-31
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-42
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-44
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-44
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-45
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-47
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-48
2.5. EVALUASI RKPD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024	II-48
2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-51
2.7. TARGET DAN REALISASI PENERAPAN SPM TAHUN 2024	II-56
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ...	III-1
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Maluku	III-6
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Buru Selatan	III-10
3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-18
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-20
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-23
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-27
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1





	4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-2
	4.1.1. Visi	IV-2
	4.1.2. Misi	IV-5
	4.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025	IV-17
	4.2.1. Identifikasi Isu Global dan Isu Nasional	IV-17
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-17
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025	IV-21
	4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026	IV-22
	4.3.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026	IV-22
	4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-22
	4.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	IV-45
BAB. V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026	V-1
	5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026	V-2
	5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	V-5
	5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026	V-8
BAB. VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
	6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026	VI-1
BAB. VII	PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2 Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Pengamatan di Stasiun Pengamat Kabupaten Buru	II-5
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.5 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	II-7
Tabel 2.6 Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-13
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2022–2024	II-16
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 – 2024	II-19
Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2022-2024	II-20
Tabel 2.10 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 – 2024 Nilai PDRB (Miliar Rupiah)	II-21
Tabel 2.11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024	II-25
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024	II-26
Tabel 2.14 Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	II-27
Tabel 2.15 Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024	II-28
Tabel 2.16 Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024	II-28
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2022-2023	II-29
Tabel 2.18 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2023-2024	II-29
Tabel 2.19 Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024	II-29
Tabel 2.20 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2024	II-30
Tabel.2.21. Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2024	II-30
Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-31
Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023-2024	II-31



Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2024	II-32
Tabel 2.25	Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-32
Tabel 2.26	Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2023-2024	II-32
Tabel 2.27	Pemberian penghargaan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2024	II-33
Tabel 2.28	Cakupan Area Pelayanan Tahun 2023 – 2024	II-33
Tabel 2.29	Timbulan Sampah, Jumlah sampah dan TPA/ TPST/ SPA Tahun 2023-2024	II-33
Tabel 2.30	Rasio Penduduk ber-KTP Tahun 2023-2024	II-34
Tabel 2.31	Rasio Bayi berakte Kelahiran Tahun 2023-2024	II-34
Tabel 2.32	Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2023-2024	II-34
Tabel 2.33	Database Skala Kabupaten Tahun 2023-2024	II-35
Tabel 2.34	KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2023-2024	II-35
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023-2024	II-35
Tabel 2.36	Indikator Kinerja Daerah Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024	II-36
Tabel 2.37	Aksesibilitas Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-36
Tabel 2.38	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-37
Tabel 2.39	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-37
Tabel 2.40	Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-37
Tabel 2.41	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-38
Tabel 2.42	Persentase penduduk Kabupaten Buru Selatan yang Menggunakan Handphone/ Telepon Genggam Tahun 2023-2024	II-38
Tabel 2.43	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-38
Tabel 2.44	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-39
Tabel 2.45	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2023-2024	II-39
Tabel 2.46	Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2021-2022	II-39
Tabel 2.47	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-40
Tabel 2.48	Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-40
Tabel 2.49	Persentase Bidang Olahraga Tahun 2023-2024	II-40
Tabel 2.50	Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2023-2024	II-41
Tabel 2.51	Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2022-2023 ...	II-41
Tabel 2.52	Produksi Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-42
Tabel 2.53	Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-42
Tabel 2.54	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-42
Tabel 2.55	Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2022-2024	II-43



Tabel 2.56	Tabel Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-43
Tabel 2.57	Target Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2023-2024	II-44
Tabel 2.58	Capaian Indikator Bidang Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023-2024	II-44
Tabel 2.59	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2021	II-44
Tabel 2.60	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-45
Tabel 2.61	Daya Terpasang dan Distribusi Listrik di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-46
Tabel 2.62	Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restoran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024	II-46
Tabel 2.63	Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-47
Tabel 2.64	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024	II-47
Tabel 2.65	Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-47
Tabel 2.66	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2023	II-48
Tabel 2.67	Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024	II-48
Tabel 2.68	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan	II-51
Tabel 2.69	Target dan Realisasi Penerapan SPM Tahun 2024	II-56
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026	III-5
Tabel 3.2	Kondisi dan Target Indikator Makro Provinsi Maluku	III-10
Tabel 3.3	Capaian Perkembangan Ekonomi Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 serta Proyeksi tahun 2026 di Kabupaten Buru Selatan	III-17
Tabel 3.4	Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026	III-18
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026	III-22
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026	III-26
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026	III-28
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029	IV-7
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026	IV-30
Tabel 4.3	Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026	IV-44
Tabel 5.1	Rancangan Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per masing-masing Urusan Pemerintahan pada RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026	V-3
Tabel 5.3	Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026	V-5
Tabel 5.4	Rencana Program/ Kegiatan yang Bersumber dari APBN/ APBD I Tahun 2026	V-8
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026	VI-1



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-10
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Buru Selatan	II-1
Gambar 2.2 Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan	II-2
Gambar 2.3 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan	II-8
Gambar 2.4 Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan	II-10
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2024	III-4
Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-16



DAFTAR DIAGRAM

	Hal.
Diagram 2.1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024	II-7
Diagram 2.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah)	II-16
Diagram 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 – 2024	II-22
Diagram 2.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 – 2024	II-23
Diagram 2.5 Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024	II-24
Diagram 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020-2024	II-24
Diagram 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	III-6
Diagram 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	III-7
Diagram 3.3 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Maluku	III-8
Diagram 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	III-9
Diagram 3.5 Indeks Gini Rasio Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	III-9
Diagram 3.6 Perbandingan TPT Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Maluku Tahun 2024	III-14



DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020-2024	II-17
Grafik 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024	II-18
Grafik 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-22
Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2024	III-11
Grafik 3.2 Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024	III-12
Grafik 3.3 Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024	III-12
Grafik 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024	III-13
Grafik 3.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024	III-14
Grafik 3.6 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024	III-15
Grafik 3.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024	III-15
Grafik 3.8 Perkembangan Tingkat Gini Rasio Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024	III-16



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta *top up* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 ayat 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah “Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka



Mennengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 juga memperhatikan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029. Selanjutnya, karena penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara paralel, RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029, mempertimbangkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global / nasional / regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2025.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dengan fungsi mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Arahkan penyusunan RENJA dan RKA OPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;

7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
8. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2026.

1.1.1. Proses Penyusunan

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
Penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan awal Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan *top-down/bottom-up*, teknokratis dan partisipatif maupun politis, termasuk mengakomodir proses telaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tujuan membahas rancangan RKPD yang meliputi : (1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah; (2) menyepakati prioritas pembangunan daerah; (3) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; (4) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; (5) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

Rancangan akhir RKPD merupakan hasil penyelarasan Rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Buru Selatan, Rancangan RKPD Provinsi Maluku dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional.

6. Penetapan RKPD.

Penetapan RKPD adalah tahap akhir yang dilakukan setelah pembahasan/fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibahas di provinsi. Penetapan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Untuk memastikan bahwa *output* dari hasil penyusunan berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka prinsip dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 melibatkan beberapa hal yaitu, **Keterkaitan, Konsistensi, Kelengkapan dan Kedalaman, Keterukuran dan Inovasi Kebijakan**. Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan proses penyusunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/top down* serta politik. Detail konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 adalah **Bottom-Up** merupakan Usulan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2026, **Top-Down** merupakan sinkronisasi prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 dan prioritas Nasional dalam RKP 2026 dan sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026. **Teknokratik** merupakan pelaksanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 serta kapasitas perencana daerah dalam penyiapan RKPD Kabupaten Buru Selatan

Tahun 2026. **Partisipatif** merupakan pelaksanaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan **Politik** merupakan pelaksanaan dengan menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Buru Selatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD, pertimbangan dan pendapat DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 serta konsultasi publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.

Sedangkan dalam pendekatan substansi, RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 memperhatikan pendekatan **Holisitik-Tematik** yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan **Integratif** yaitu menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan pendekatan **Spasial** merupakan pelaksanaan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
5. Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435)
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
31. Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi maluku Tahun 2025-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buru Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Kabupaten Buru Selatan Nomor 17);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahun, Rencana Strategi Daerah (RENSTRA) yang berlaku 5 tahun untuk perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD yang berlaku satu tahun, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berlaku satu tahun untuk perangkat daerah. Semua dokumen perencanaan tersebut harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergi, keterkaitan, konsistensi, dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, perencanaan pembangunan juga harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan perlu diupayakan terwujudnya hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, yaitu:

1. Hubungan RKPD dengan RPJMD

Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

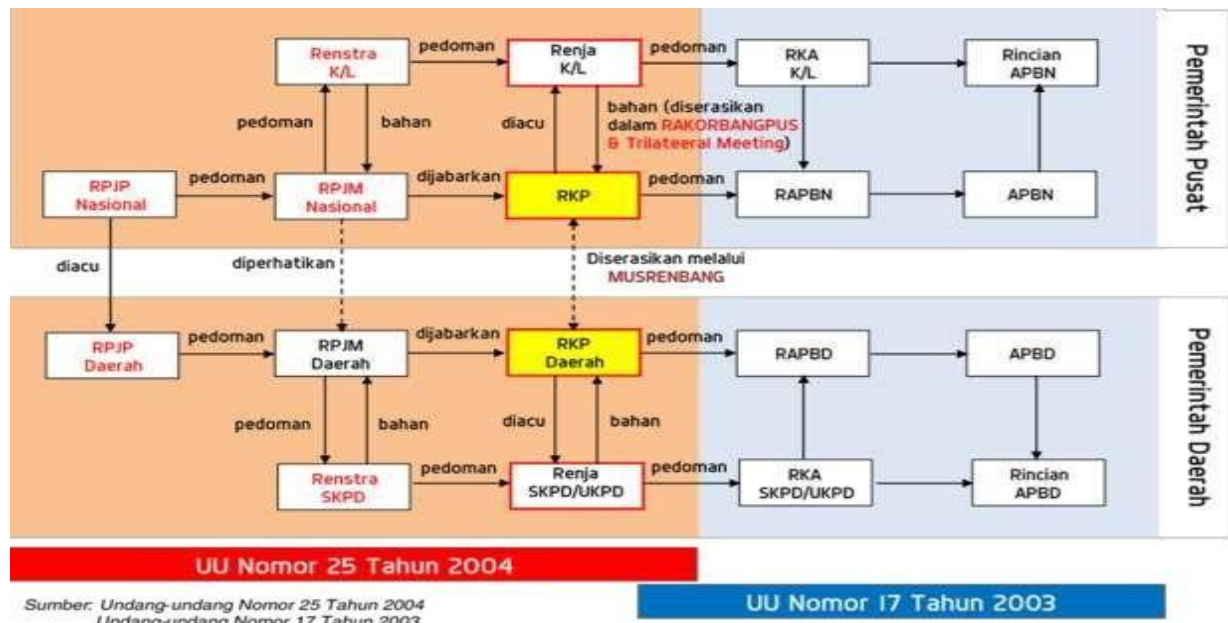
Dokumen RKPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan rencana kerja perangkat daerah selanjutnya rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah.

3. Hubungan RKPD dengan RKPD Maluku dan RKP

Dokumen RKPD kabupaten mengacu, disinkronkan dan diserasikan dengan dokumen RKPD Maluku dan RKP (Nasional). Sinkronisasi dilakukan terkait dengan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan, dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

Skema hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional daerah dan pemerintah daerah ditujukan pada gambar berikut.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2026

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menciptakan kepastian kebijakan dan kepatutan perencanaan karena merupakan komitmen pembangunan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target perjanjian kinerja (perkin) dan Indikator Kinerja Tahun 2026;
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, dan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif, dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;



7. Merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) OPD Tahun 2026;
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD tahun 2026.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra OPD, Renja OPD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Berisi uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

Menjelaskan secara umum kondisi daerah dari aspek geografis yang mencakup pendekatan keruangan, kelingkungan dan kompleks kewilayahan serta aspek demografi yang mencakup keadaan dan komposisi penduduk di Kabupaten Buru Selatan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang difokuskan pada pemerataan ekonomi dan pemerataan sosial.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan tentang segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan dan melakukan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan Nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan ekonomi daerah Tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2026 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan hubungan visi dan misi dan tujuan, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029.

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2026

Menjelaskan Isu Global dan Isu Nasional, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026.



4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

Menjelaskan isu strategis, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas yang bersumber dari program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 pada tahun berkenaan.

4.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menjelaskan tentang hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD yang disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Menjelaskan rancangan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.

5.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 dengan mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

5.3. Rencana Pendanaan dan Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan tentang rencana pendanaan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.

5.4. Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2026

Menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2026 yang merupakan rencana alternatif pendanaan pembangunan tahun 2026.



BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menjadi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.

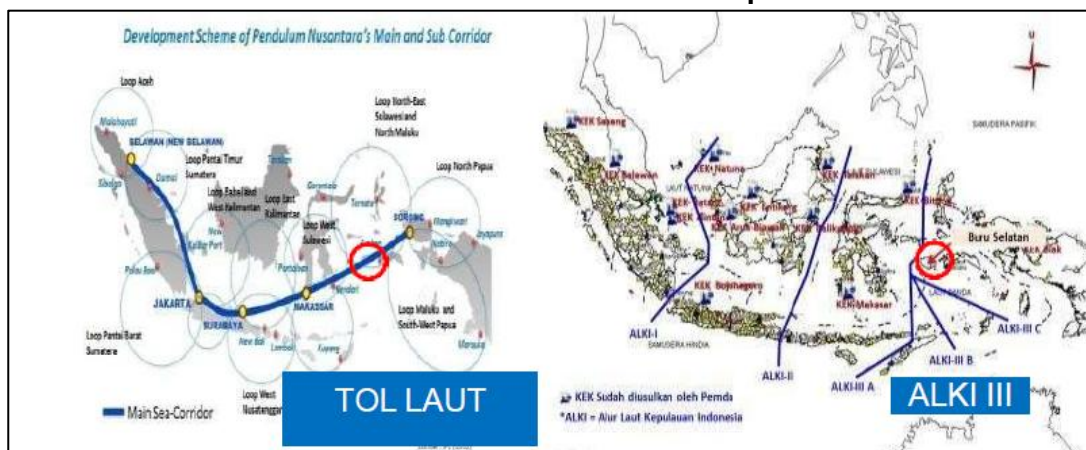
6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

Menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menjadi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Secara geografis Kabupaten Buru Selatan di Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Seram, Laut Banda di sebelah Selatan dan Barat, serta Selat Manipa dan Kabupaten Buru di sebelah Timur. Kabupaten Buru Selatan memiliki luas sekitar 3.780,56 km² dan wilayahnya meliputi sebagian dari Pulau Buru dan pulau-pulau lain di sekitarnya, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Kondisi Geostrategis dan Geopolitik Kabupaten Buru Selatan dalam peran strategisnya secara nasional dan internasional berada pada posisi strategis jalur lintas alur kepulauan Indonesia ALKI III. UNCLOS 1982 ratifikasi undang-undang 17 tahun 1985 memberikan penguatan peran terhadap posisi jalur ALKI III dimana Kabupaten Buru Selatan berada pada alur lintas kapal internasional yang bila dikembangkan akan dapat memanfaatkan peluang ini sebagai potensi ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan kawasan di Indonesia timur. Untuk mendorong aktifitas arus barang dari pusat produksi di Kabupaten Buru Selatan jalur transportasi nasional yang dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan dan sistem tata transportasi wilayah yang mengkoneksikan wilayah Buru Selatan dengan pasar di wilayah Sulawesi dan Jawa telah dikembangkan Tol Laut sebagai stabilisator harga untuk memberikan nilai ekonomi terhadap setiap kebutuhan konsumsi dan hasil produksi masyarakat yang dijual ke pasar. Jalur laut ALKI III dan tol laut dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar. 2.2. Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan



2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Buru Selatan 3.780,56 Km² terbagi menjadi 6 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Adapun batas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Seram
- Sebelah Timur : Kabupaten Buru dan Selat Manipa
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Barat : Laut Banda

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Leksula	Leksula	1.419,29	19
2.	Kepala Madan	Biloro	953,36	16
3.	Waesama	Wamsisi	540,93	11
4.	Namrole	Elfule	243,57	17
5.	Ambalau	Siwar	228,63	7
6.	Fena Fafan	Waekatin	394,78	11
Total			3.780,56	81

Sumber : Dokumen LKPJ 2024 dan Buru Selatan dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara fisiografi (*makro relief*), bentuk wilayah Kabupaten Buru Selatan dikelompokkan berdasarkan dataran, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (*plateau/pedmont*) dengan bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru Selatan didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah berlereng agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 % yang meliputi luas 15,43 % dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam. Sedangkan di bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampai agak curam.

Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Kabupaten Buru Selatan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu ; bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai. Sebagian besar tanah di Pulau Buru adalah jenis tanah kompleks, dimana persebaran jenis tanah ini meliputi ; alluvial, podsolik merah kuning, organosol, grumasol dan tanah-tanah kompleks.

2.1.1.3. Geomorfologi dan Hidrogeologi

Kondisi geomorfologi Pulau Buru dan pulau-pulau kecil lainnya yang termasuk ke dalam Kabupaten Buru Selatan dikontrol oleh geologi regional Provinsi Maluku, dimana wilayah ini merupakan ujung Barat Busur Kepulauan Non Magmatik dari Lingkaran Sirkam Pasifik. Oleh karena itu Kabupaten Buru Selatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa satuan Geomorfologi seperti berikut :

- 1) Satuan Geomorfologi Perbukitan/ Pegunungan Lipatan Patahan yang menempati wilayah bagian tengah Kabupaten Buru Selatan;

- 2) Satuan Geomorfologi Punggungan Homoklin yang meliputi wilayah bagian Utara dan Selatan Pulau Buru;
- 3) Satuan Geomorfologi Lembah dan Bantaran Sungai yang mengikuti lembah sungai-sungai besar juga menjadi wilayah permukiman.

Kondisi hidrogeologi Pulau Buru dan pulau-pulau kecil lainnya yang termasuk dalam Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

a. Pola Aliran Sungai

Sebagaimana telah dijelaskan didepan, sungai sebagai unsur geografi yang ada di Kabupaten Buru Selatan (28 sungai) mempunyai pola aliran; dendritik (menurun), paralell, trellis, rektanguler dan radier mengalir menuju pantai kontrol oleh struktur geologi (patahan, rekahan dan sistem perlipatan batuan) yang terdapat di wilayah ini. Tingkat kerapatan sungai sangat intensif, dimana hampir seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan tertutup oleh pola aliran sungai baik yang bersifat permanen maupun *intermittent*.

b. Zona Air Tanah

Dari kondisi tersebut di atas dan didukung oleh kontrol batuan dan struktur geologi, maka secara umum neraca air tanah menunjukkan terdapat 2 (dua) zona air tanah, yaitu:

- Zona air tanah rendah, yang pada umumnya menempati punggung pemisah air morfologi (*morphological water divided*) sebagai pemisah daerah tangkapan hujan (*catchment area*) keempat wilayah DAS tersebut diatas serta pada 2 (dua) punggung yang terdapat di selatan daerah studi;
- Zona air tanah sedang – tinggi menempati hampir seluruh wilayah studi, yang mengelilingi Pulau Buru. Kawasan ini dapat tercapai jika sistem vegetasi tetap terjaga, sehingga tingkat peresapan (*recharged*) dapat dipertahankan dan *surface run off* dapat dicegah dan diperkecil.

c. Hidro Oceanografi

Sesuai dengan kondisi geografinya Kabupaten Buru Selatan dikelilingi oleh Laut Seram di Utaradan Laut Banda di Selatan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai kabupaten yang berada di dalam Provinsi Maluku. Oleh karena itu, pada bagian utara dan selatan berada pada posisi gapura energi gelombang yang tinggi pada musim barat maupun musim timur, dengan arus laut dari selatan yang sangat kuat pada musim timur yang berlangsung pada bulan Juni sampai September. Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai dengan posisi Pulau Buru yang berada di busur luar kepulauan non magmatik, maka Laut Seram di Utara dan Laut Banda di

Selatan merupakan 2 (dua) palung laut dalam (samudera) yang sangat mempengaruhi wilayah ini, dengan kondisi batimetri yang sangat dalam. Disisi lain Pulau Buru memiliki potensi sumber daya perikanan yang tinggi didukung keberadaan di jalur ALKI III menghubungkan Timur, Barat, dan Utara seperti telah dijelaskan sebelumnya.

2.1.1.4. Klimatologi

Iklm di Kabupaten Buru Selatan dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kabupaten Buru Selatan yang lebih dominan daratan, beberapa pulau kecil dan laut Banda.

Berdasarkan data klimatologi di stasiun meteorologi Pulau Buru pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata temperatur/suhu udara tertinggi tercatat di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar 29,9°C pada bulan November, sementara terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 27,0°C. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari dan Februari yaitu 19 hari dan yang terendah pada bulan Oktober dan November, yaitu 1 hari. Kondisi curah hujan, tercatat tertinggi pada bulan Juli sebesar 255,7 mm dan terendah pada bulan Oktober dan November. Secara umum tekanan udara di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2024 berkisar antara 1.008,4 mbar sampai dengan 1.012,3 mbar. Sementara kecepatan angin tertinggi pada bulan Juli dan September yaitu sebesar 19 knot dan terendah 14 knot pada bulan Juli dan September.

Tabel. 2.2 Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Pengamatan di Stasiun Pengamat Kabupaten Buru

Rata-rata (average)							
Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	27,5	84	15	1.008,4	150,8	19	5,2
Februari	27,3	85	14	1.008,4	146,7	19	3,9
Maret	27,7	82	17	1.009,7	161,4	11	6,9
April	27,8	82	15	1.008,9	139,1	10	7,0
Mei	28,0	80	17	1.010,5	180,9	14	6,7
Juni	27,5	81	16	1.010,3	112,4	9	6,0
Juli	27,0	81	19	1.010,9	255,7	12	5,8
Agustus	27,9	73	18	1.012,3	11,0	5	8,5
September	27,9	71	19	1.011,6	68,7	7	7,9
Oktober	29,3	69	18	1.011,9	-	1	9,1
November	29,9	71	16	1.010,0	-	1	9,4
Desember	28,9	79	15	1.009,5	192,1	16	4,1

Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, 2025

2.1.2. Aspek Demografi Daerah

Perkembangan penduduk Kabupaten Buru Selatan dilihat dari jumlahnya pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,81. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2020	76,900	0,11
2.	2021	77,126	0,07
3.	2022	77,688	0,26
4.	2023	79.017	0,58
5.	2024	81.329	0,64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2025

Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, maka Kecamatan Fena Fafan dan Namrole tercatat sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi tahun 2023-2024 dengan rata-rata pertumbuhan 1,44% dan 1,10% dan Kecamatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Kepala Madan sebesar 0,12%.

Tabel. 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan 2023-2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala Madan	12.311	12.383	12.660	12.991	13.184	0,12
2.	Leksula	14.636	14.490	14.134	14.267	14.718	0,72
3.	Fena Fafan	4.090	4.057	4.179	4.309	4.557	1,44
4.	Namrole	20.614	21.194	21.974	22.373	23.276	1,10
5.	Waesama	15.618	15.689	15.568	15.852	16.236	0,37
6.	Ambalau	9.631	9.313	9.173	9.225	9.358	0,24
Buru Selatan		76.900	77.126	77.688	79.017	81.329	0,64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2025

Kepadatan dan distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 terbesar berada di Kecamatan Namrole yaitu sebesar 95,56 jiwa/km² atau 0,29 %.

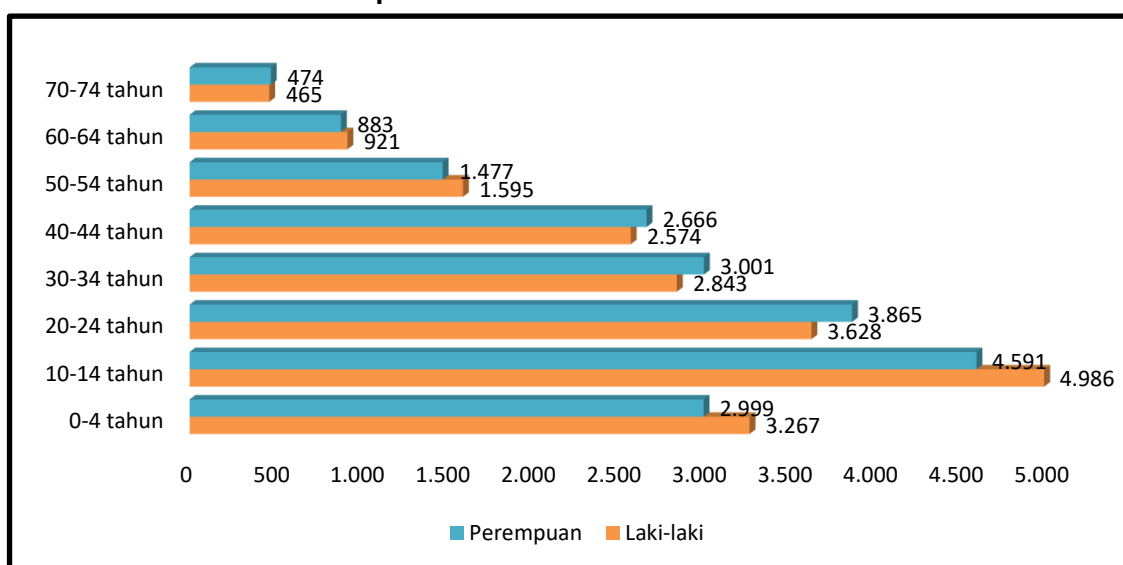
Tabel.2.5. Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Distribusi Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Madan	13,83	0,16
2.	Leksula	10,37	0,18
3.	Fena Fafan	11,54	0,06
4.	Namrole	95,56	0,29
5.	Waesama	30,01	0,20
6.	Ambalau	40,93	0,12
Total		202,24	1,01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Pengelompokan menurut umur dan jenis kelamin bermanfaat bagi penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kelompok umur masing-masing. Penduduk Buru Selatan dengan kelompok umur 10-14 tahun dan 20-24 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi, hal ini berarti penduduk usia muda adalah penduduk yang dominan di Kabupaten Buru Selatan. Komposisi Penduduk ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung penduduk tidak produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif maka semakin besar beban tanggungan penduduk usia produktif.

Diagram 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

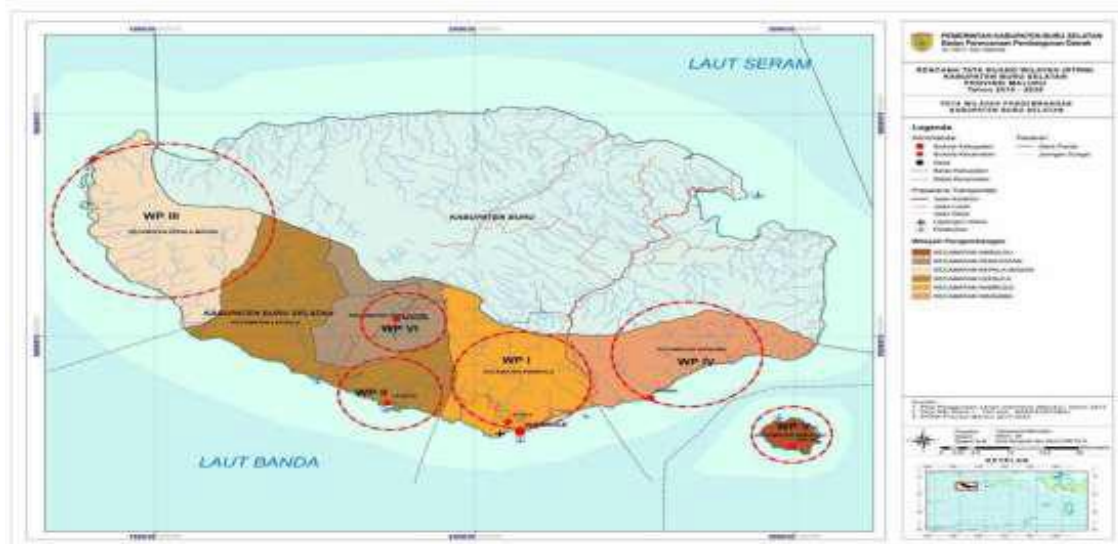


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2025

2.1.3. Wilayah Pengembangan

Pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan guna membangun Buru Selatan sebagai Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk lebih jelas pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan



Sumber: RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, potensi pengembangan wilayah dibagi berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkau pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut. Keenam Wilayah Pengembangan tersebut sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Namrole dengan pusat pelayanan di Kota Namrole. Fungsi utama WP sebagai berikut :
 - a) Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Jasa
 - b) Pusat Transportasi Regional
 - c) Sentra produksi pertanian tanaman pangan
 - d) Sentra produksi kehutanan
 - e) Sentra produksi perikanan, dan
 - f) Wisata
2. Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Leksula dengan pusat pelayanan di Kota Leksula. Fungsi utama WP II adalah :
 - a) Pusat Perdagangan
 - b) Pusat Pelayanan Jasa
 - c) Kawasan Ekonomi Khusus

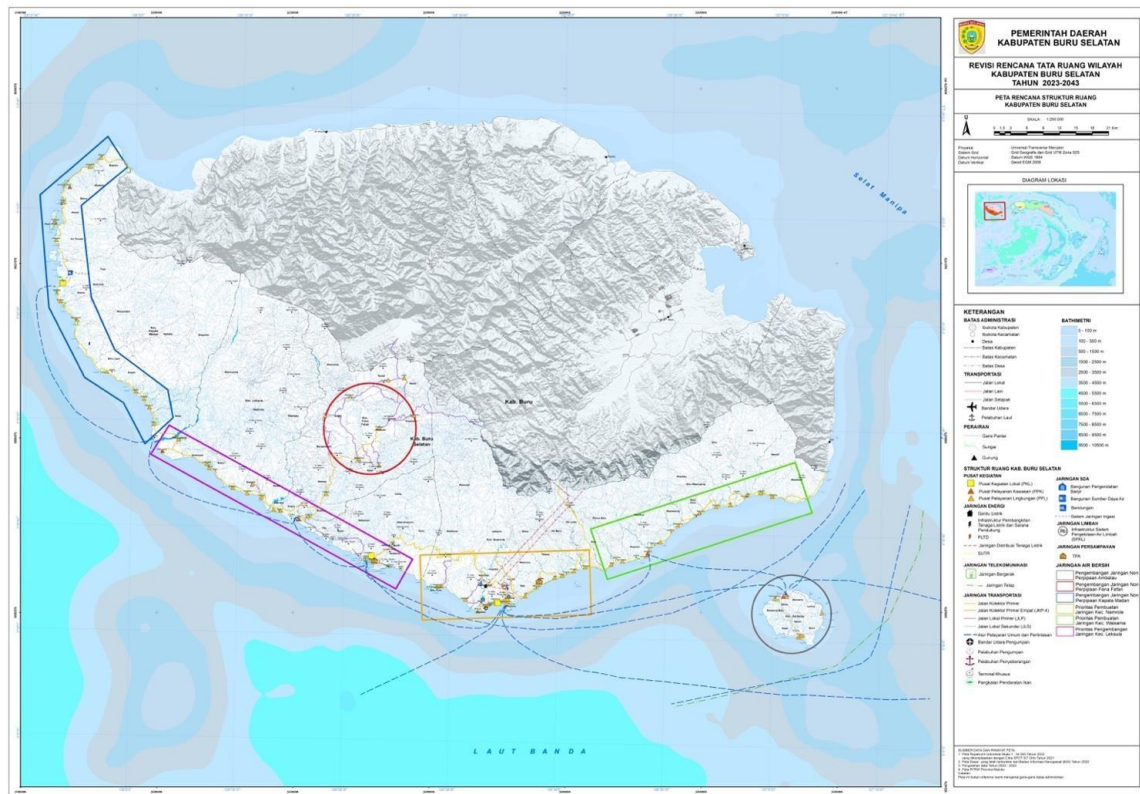
- d) Sentra produksi kehutanan, dan
 - e) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - f) Sentra produksi perkebunan
 - g) Sentra produksi perikanan
 - h) Wisata
3. Wilayah Pengembangan III yang meliputi Kecamatan Fena Fafan dengan pusat pelayanan di Kota Waekatin. Fungsi utama WP III adalah :
- a) Sentra produksi kehutanan
 - b) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - c) Sentra produksi perkebunan
 - d) Sentra produksi perikanan
 - e) Pendukung utama Kawasan Ekonomi Khusus
4. Wilayah Pengembangan IV yang meliputi Kecamatan Kepala Madan dengan pusat pelayanan di Kota Biloro. Fungsi utama WP IV adalah :
- a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa
 - e) Wisata
5. Wilayah Pengembangan V yang meliputi Kecamatan Waisama dengan pusat pelayanan di Kota Wamsisi. Fungsi utama WP V adalah :
- a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa
6. Wilayah Pengembangan VI yang meliputi Kecamatan Ambalau dengan pusat pelayanan di Kota Waelua. Fungsi utama WP VI adalah :
- a) Sentra produksi perkebunan
 - b) Sentra produksi perikanan
 - c) Wisata

2.1.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan

Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem perkotaan di Kabupaten Buru Selatan, yang direncanakan tidak terlepas dari rencana struktur kota di Ibukota Kabupaten maupun Kota Kecamatan, karena Kota merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sistem Perkotaan diarahkan sesuai dengan hierarki jumlah penduduk, potensi dan kegiatan ekonominya. Pengembangan sistem kota-kota diarahkan sedemikian rupa, agar selaras dengan

arahan pengembangan wilayah, terutama berkaitan dengan kondisi fisik yang sebagian merupakan pulau-pulau dan kondisi bencana alam. Di pihak lain Kawasan perkotaan memerlukan pengelolaan secara individual yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas, serta mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Rencana struktur ruang Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.4. berikut :

Gambar 2.4. Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan



Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skalakecamatan atau beberapa desa; dan
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan.

Sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2034 bahwa Pengembangan sistem perkotaan ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya struktur ruang yang tangguh untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi basis pertanian lahan kering. Pengembangan sistem kota-kota juga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan potensinya dan daya tampung lingkungannya; baik itu struktur ruang internal pada Kabupaten Buru Selatan maupun struktur ruang eksternal dalam lingkup Provinsi Maluku.

Mengingat sektor ekonomi basis Kabupaten Buru Selatan adalah sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan maka konsep ruang yang akan diterapkan adalah pengembangan kabupaten dengan kota-kota atau kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pengembangan hirarki kota di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan arahan kebijakan nasional dan provinsi, disamping itu juga berdasarkan hasil kajian tentang tingkat perkembangan masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Buru Selatan.

Hirarkisistem pusat-pusat permukiman bagi Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole di Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, dan Desa Kamanglale memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi, memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan, Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala, memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulma memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di seluruh desa di Kabupaten Buru Selatan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Penetapan fungsi suatu kota didasari oleh alasan pertimbangan tertentu dimana keberadaan kota tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan sekitar dan pengembangan wilayah secara umum. Pertimbangan penetapan fungsi kota antara lain :

1. Fungsi kota yang didasarkan pada kedudukan dan lokasinya dimana berada pada kawasan strategis, dan kawasan tertentu seperti kawasan perbatasan, dan kawasan tumbuh cepat, sehingga kota tersebut perlu berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi (kegiatan industri, agroindustri, pertambangan, dll) dan pusat perhubungan guna mendukung usaha pemasaran;
2. Kota yang berfungsi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi desa-desa di kawasan belakangnya yang memiliki karakteristik relatif terpencil dan terbelakang atau merupakan pengembangan kawasan ekonomi baru. Fungsi kota tersebut sebagai pusat pengumpul dan distribusi;
3. Sinkronisasi sistem pusat pemukiman dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku untuk Kabupaten Buru Selatan.

Berikut untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel 2.6 dibawah ini.

**Tabel 2.6. Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023**

REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023	
Rencana Pusat Permukiman	Fungsi
(1)	(2)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, Desa Farmite dan Desa Kamanglale;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diseluruh Desa;	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa;

2.1.4.1. Rencana dan Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Buru Selatan, proses identifikasi kawasan yang telah dilakukan berhasil mengidentifikasikan kawasan lindung meliputi :

a. Zona Lindung Lokal dan Zona Penyangga Hutan Mangrove

Kawasan yang direncanakan meliputi : Leksula, Kepala Madan, Desa Wamsisi dan Desa Namrole, dengan luasan hutan mangrove adalah $\pm 1.600,24$ Ha (hasil analisa citra, 2005). Perairan pesisir pantai yang dimaksud adalah desa Nalbesy, Teluk Leksula, Mefa, Tifu, Pulau Tomahu, dan Pulau Fogi.

b. Kawasan Lindung Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan Sempadan Danau

Perencanaan kawasan lindung sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau diarahkan untuk kawasan-kawasan yang masih mungkin untuk dipertahankan. Sempadan pantai berjarak 100 m atau disesuaikan lebar pantai, sempadan sungai utama 100 meter, sub sungai 50 meter dan sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman atau kota 15 meter atau disesuaikan dengan jarak sempadan yang tersisa atau topografi sungai. Kawasan lindung untuk sempadan danau 100 meter.

2.1.4.2. Rencana dan Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan Perikanan Tangkap
- 2) Kawasan Pariwisata terdapat di Leksula dan Namrole
- 3) Zona Prasarana dan Sarana Perikanan

2.1.4.3. Kawasan Rawan Bencana

Penentuan zonasi/ wilayah rawan bencana Kabupaten Buru Selatan terbagi menjadi :

a. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan banjir meliputi wilayah ekologis adalah wilayah ekologi Buru Selatan Timur, Pulau Ambalau, Desa Waemulang dan Desa Waemala.

b. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Abrasi dan Akresi

Abrasi dan akresi umumnya terjadi di pesisir pantai wilayah ekologi Teluk Leksula – Tanjung Waitepu, Pantai Enbofi, Mefa, Fogi – Air Ternate. Abrasi pantai juga terjadi intensif sepanjang pesisir Kabupaten Buru Selatan. Pada Pulau Ambalau tingkat abrasi cukup tinggi, demikian juga pada pantai Namrole dan Wamsisi.

c. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Erosi dan Sedimentasi

Erosi terjadi pada area perbukitan karst dan denudasional, sementara Sedimentasi terjadi di muara sungai Waemala, Waehaka dan Waemulang.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

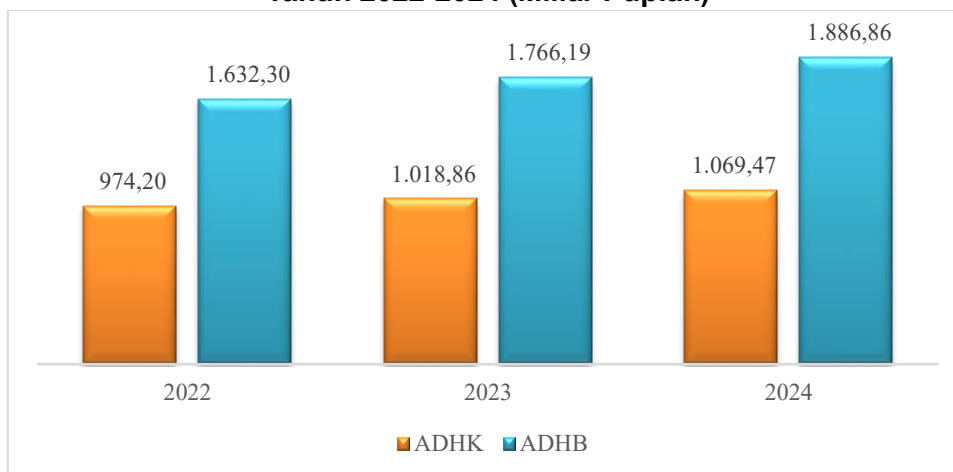
Tingkat kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator Ekonomi Makro antara lain: Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per kapita, Gini ratio, Tingkat Kemiskinan, Laju Inflasi dan Pengangguran.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi

Pendapatan domestik regional per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara atau daerah. Sesuai dengan konsep dan definisi, pengertian pendapatan per kapita suatu daerah adalah pendapatan regional netto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahunnya.

Sampai saat ini dalam perhitungan pendapatan regional dari provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia, umumnya masih hanya sebatas Pendapatan Domestik Regional, sehingga angka Pendapatan Domestik Regional yang disajikan di sini adalah angka Pendapatan Domestik Regional Per kapita. Secara rinci pertumbuhan PDRB per kapita dapat dilihat pada Diagram 2.2.

Diagram 2.2. Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka, 2025

Terlihat bahwa masih perlu adanya peningkatan hasil-hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk menjadi kegiatan *home industry*. Kondisi ini harus menjadi perhatian bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap potensi unggulan Kabupaten Buru Selatan pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan melalui *home industry* agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermata pencahariaan sebagai petani dan nelayan, karena jika anggaran pemerintah daerah kecil untuk sektor ini maka kemiskinan akan semakin tinggi.

Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2022–2024

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	587,16	640,40	679,24	371,54	391,13	404,31
Pertambangan dan Penggalian	12,32	13,56	14,21	7,57	7,94	8,22
Industri Pengolahan	63,73	67,03	69,79	37,71	38,57	39,47
Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,12	0,13	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,33	0,34	0,22	0,24	0,24
Konstruksi	143,61	155,51	166,64	78,24	81,26	85,29
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	129,16	146,75	161,123	84,09	90,80	98,17
Transportasi dan Pergudangan	45,41	53,80	56,12	26,64	29,20	30,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,91	8,77	9,79	4,79	5,11	5,51
Informasi dan Komunikasi	8,95	9,73	10,23	6,48	6,86	7,14

Jasa Keuangan dan Asuransi	12,49	13,14	14,24	7,15	7,40	7,94
Real Estat	8,48	9,01	9,46	5,91	6,20	6,46
Jasa Perusahaan	0,39	0,42	0,45	0,27	0,29	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	427,10	445,86	476,45	224,21	226,86	241,32
Jasa Pendidikan	82,09	85,65	91,42	52,36	54,47	57,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,62	94,70	103,81	54,58	59,43	63,68
Jasa Lainnya	19,41	21,34	23,27	12,30	12,98	13,74
Total	1.632,30	1.766,19	1.886,86	974,20	1.018,86	1.069,47

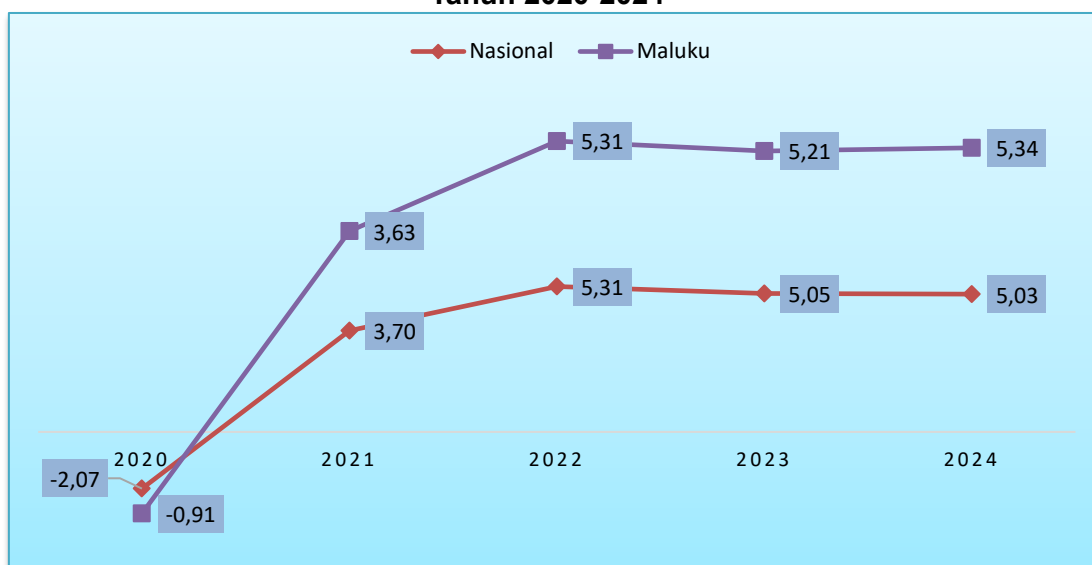
Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, 2025

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -0,01 persen adalah perolehan terendah dari lima tahun ke depannya. Kondisi ini baru pertama kali terjadi sejak berdirinya Kabupaten Buru Selatan yang diakibatkan adanya pandemi covid. Sejak tahun 2020 - 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 5,53 persen.

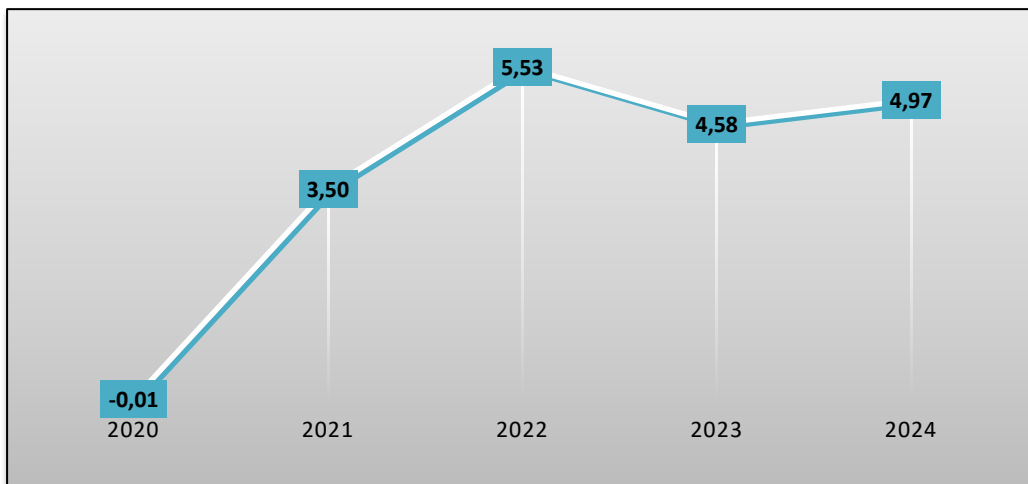
Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama 2020-2024 memberikan gambaran bahwa pembangunan sangat baik, walaupun secara trend mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, kondisi ini alamiah karena secara regional atau di tingkat Provinsi Maluku maupun secara nasional juga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

Grafik 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Nasional dan BPS Provinsi Maluku , 2025

Grafik 2.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024



Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama 2020-2024 memberikan gambaran bahwa pembangunan sangat baik, walaupun secara trend mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sejak tahun 2020-2024, kondisi ini alamiah karena secara regional atau di tingkat Provinsi Maluku maupun secara nasional juga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2022 mencapai 5,73 persen.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2020- 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2020 – 2024**

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.16	0.27	6.64	5.27	3,37
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0.04	4.88	2.79	4.90	3,34
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-0.95	1.08	11.28	2.26	2,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4.75	5.72	4.07	4.20	-0,41
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1.75	2.99	2.55	6.71	3,35
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-1.03	8.10	2.05	3.86	4,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-2.04	7.58	5.94	7.98	8,11
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-12.04	5.35	5.88	9.59	3,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	-0.46	3.95	6.59	6.61	7,80
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1.95	5.95	6.76	5.91	4,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4.35	7.10	-6.88	3.46	7,35
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	-0.05	3.35	5.77	4.93	4,22
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-0.71	4.14	6.93	4.74	5,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-1.98	4.44	4.27	1.18	6,37
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	-0.02	3.98	5.23	4.02	5,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4.44	5.91	7.15	8.89	7,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1.08	1.96	6.86	5.51	5,89
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Produk		-0,01	3,50	5,53	4,58	4,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2025

Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97 persen di tahun 2024, lebih tinggi dari tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2024 mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan sektor menghasilkan kegiatan produksi dan konsumsi. Kondisinya kegiatan sektor di tahun 2024 terlihat dari sebagian besar atau 16 (Enam belas) sektor pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada sektor pengadaan listrik dan gas. Pertumbuhan tertinggi pada sektor perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 9,59 persen, diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,11 persen dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,80 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah dialami sektor pengadaan listrik dan gas yakni -0,41 persen.

Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2022-2024

No.	Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010		
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	1.397,40	1.507,08	1.646,62	792,95	822,67	857,83
2.	Konsumsi LN PRT	55,70	60,87	71,26	31,73	33,43	37,67
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	869,82	891,33	926,20	494,93	498,81	511,10
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	822,21	837,79	871,65	473,27	475,49	485,51
5.	Perubahan Inventori	24,85	25,00	25,73	13,73	13,79	13,95
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1.537,67	-1.555,88	-1.654,60	-832,41	-825,33	-836,59
Total PDRB		1.632,30	1.766,19	1.886,86	974,20	1.018,86	1.069,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2025

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar dalam 3 tahun (2022-2024) diberikan oleh Konsumsi Rumah Tangga, dan mengalami peningkatan dalam tiga tahun. Konsumsi Rumah Tangga (ADHK) pada tahun 2024 sebesar 822,67 miliar rupiah. sedangkan kelompok pengeluaran ekspor barang dan jasa merupakan pengeluaran yang paling kecil di tahun 2024, bahkan sejak tahun 2024.

2.2.1.3. PDRB Per kapita

Secara konstan, PDRB Per kapita di Kabupaten Buru Selatan dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020 besarnya PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan terus mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024. Tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan menjadi sebesar 13,23 Ribu Rupiah. Laju pertumbuhan PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 0,41 ditahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan kata lain laju pertumbuhan PDRB Per kapita di tahun 2024 masih lebih tinggi dari tahun 2023. Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10. PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020 – 2024 Nilai PDRB (Miliar Rupiah)**

	2020	2021	2022	2023*	2024**
ADHK	892,00	923,19	974,20	1.018,86	1.069,47
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHK	11,90	12,05	12,48	12,82	13,23
PDRB per KapitaADHK 2010 (%)	-17,42	1,25	3,53	2,72	3,17

Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan dan BPS Provinsi Maluku Tahun 2025

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

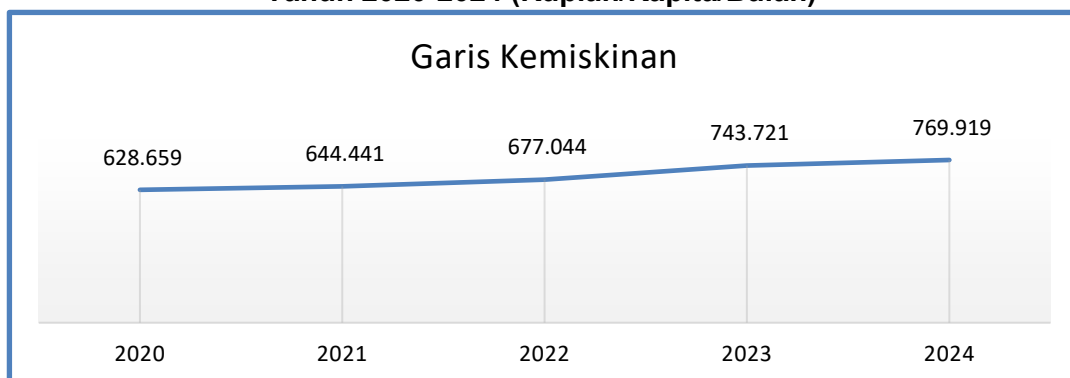
2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 perkembangan Garis Kemiskinan mencapai Rp.628.659,- meningkat hingga Rp.769.919,- pada tahun 2024, hal tersebut dapat diartikan pada tahun 2024 pengeluaran per kapita/bulan penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan yang berada pada Garis Kemiskinan mencapai Rp.769.919,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat Grafik 2.3.

**Grafik 2.3. Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan
Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

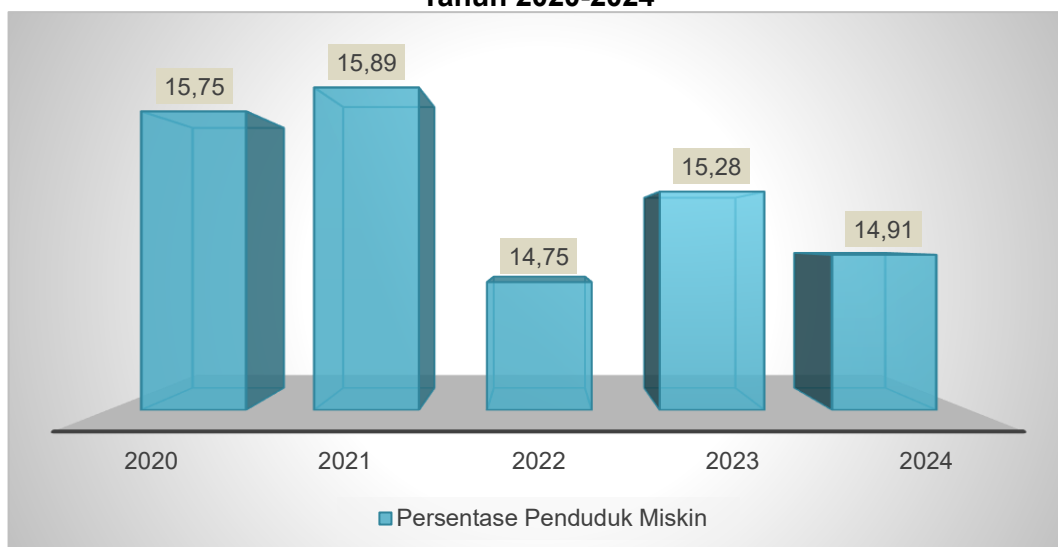


Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu indikator ekonomi, sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Berbagai macam Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Persentase kemiskinan di Buru Selatan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan sebesar 15,28 persen menjadi 14,91 persen di tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2023 ke tahun 2024 cukup besar yaitu sebesar 0,37 poin.

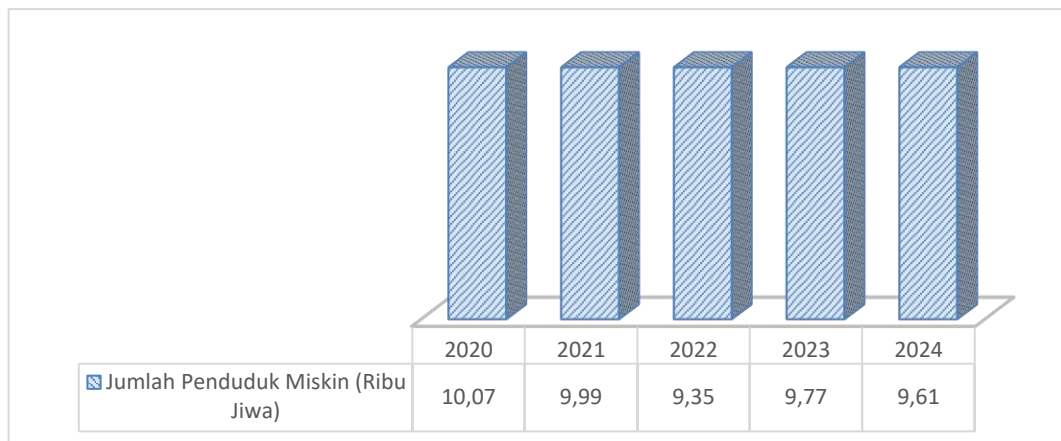
**Diagram 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Buru Selatan pada tahun 2020 sebanyak 10.07 ribu jiwa menurun pada tahun 2024 menjadi sebanyak 9,61 ribu jiwa. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Diagram 2.4. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

2.2.1.5. Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam Angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum bisa memperolehnya. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah Angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,38 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan, namun Buru Selatan menempati urutan terendah pertama di Provinsi Maluku. Tahun 2020 TPT sebesar 2,31 persen, turun menjadi 1,35 pada tahun 2024.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

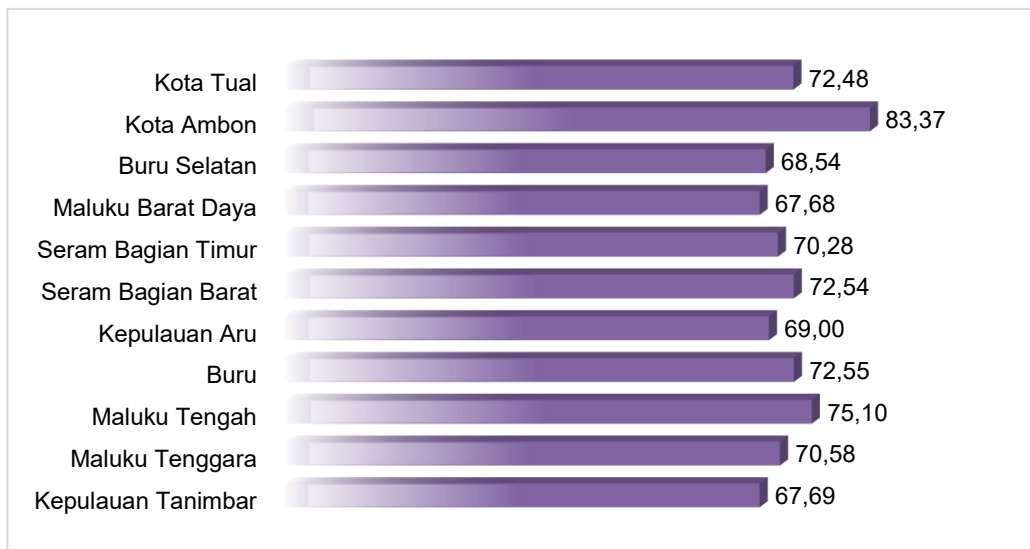
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Komponen kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Nilai IPM tahun 2024 di masing-masing Kabupaten/Kota hanya Kota Ambon dan Maluku Tengah yang memiliki nilai IPM di atas nilai Provinsi sedangkan Kabupaten Buru Selatan dan 8 Kabupaten lainnya di bawah nilai Provinsi. Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan

kenaikan tahun terakhir sebesar 0,86 poin. IPM di Provinsi Maluku berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada diagram berikut.

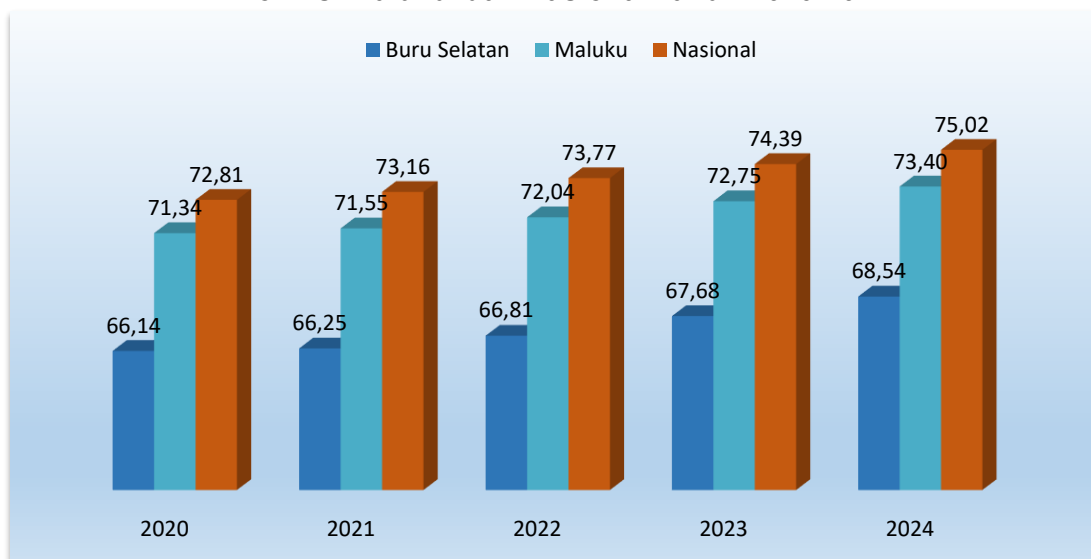
Diagram 2.5. Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

Pada Diagram di atas Kota Ambon memiliki IPM tertinggi sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki IPM paling rendah, yakni 67,68, sementara Buru Selatan menempati urutan 9 dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku. Sedangkan posisi IPM Kabupaten Buru Selatan, secara regional dan nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Diagram 2.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Nasional, BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

Pertumbuhan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Walaupun di tahun 2020 Pengeluaran per kapita mengalami penurunan sebesar 61 poin, namun kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 34 poin. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.11. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2020-2024

No.	Komponen IPM	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	69,85	70,11	70,28
2.	Angka Harapan Lama Sekolah(Tahun)	12,83	12,84	12,85
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,06	8,23	8,48
4.	Pengeluaran Per kapita (Rp.Juta)	7.716	8.108	8.474

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2025

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan wajib dasar diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Secara umum, pencapaian Kabupaten Buru Selatan pada bidang pendidikan dari tahun 2022 sampai 2024 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024

INDIKATOR	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
APK SD/MI/Sederajat (%)	116,10	112,02	111,15
APK SMP/MTs/Sederajat(%)	86,80	89,53	90,88
Angka Partisipasi Murni (APM)			
APM SD/ MI/Sederajat (%)	97,83	96,99	97,25
APM SMP/ MTs/Sederajat (%)	80,13	82,31	82,81
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
APS usia 7 -12 (%) (SD/MI)	98,10	100	99,88



APS usia 13-15 (%) (SMP/MTS)	96,33	95,90	95,93
Angka Putus Sekolah			
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,73	0	NA
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	2,20	0	NA
Angka Kelulusan			
Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	100
Fasilitas Pendidikan			
Sekolah SD/SDLB Kondisi Bangunan Baik (%)	75,7	85,71	85,71
Sekolah SMP/SMPLB Kondisi Bangunan Baik (%)	87,23	73,04	85,71
Rasio Ketersediaan Sekolah			
Rasio Ketersediaan Sekolah SD sederajat terhadap penduduk usia sekolah	95,50	95,10	98,51
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP sederajat terhadap penduduk usia Sekolah	NA	NA	62,83
Rasio Pendidik dan Peserta Didik per Kelas Rata-Rata			
Rasio Guru/Murid SD /SDLB	46,63	NA	55,34
Rasio Guru/Murid SMP/ SMPLB	70,70	NA	NA
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)	-	8,23	NA
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,83	12,84	12,85

Sumber : - BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025
- BPS Provinsi Maluku Tahun 2025
- Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja sektor kesehatan umumnya mengalami perbaikan hal ini terlihat dari angka yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2022-2024, pada beberapa indikator kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2024 misalnya persalinan ditolong tenaga kesehatan (%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2022, data ini menunjukkan bahwa program pemerintah sangat baik dilakukan. Adapun sejumlah indikator urusan kesehan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.13. Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024

No.	Uraian	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	4,38	2,74	4,80
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	6,82	25,57	26,87
3.	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (%)	40,45	63,83	82,39
4.	Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	43,11	52,04	52,39
5.	Pelayanan kesehatan bayi (%)	143,05	87,31	87,23
6.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	NA	3,66	2,47
7.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk/kurus (%)	NA	0,53	0,10
8.	Menurunnya Prevalensi Balita Stunting (%)	4,92	3,54	3,58
9.	Desa/Kelurahan UCI (%)	70,37	61,9	43,21



10.	Jumlah Kasus HIV/AIDS (Kasus)	5	7	10
11.	Rasio Posyandu per satuan balita	28,00	17,34	15,75
12.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan penduduk	0,67	0,67	0,64
13.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	0,03	0,025	0,025
14.	Rasio Dokter per satuan penduduk (/1.000)	0,40	0,27	0,49
15.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1.000)	0,44	0,35	11,57
16.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	NA	NA	100
17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	NA	37,84	80,65
18.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	NA	59,20	31,00
19.	Cakupan Puskesmas	100	100	216,67
20.	Cakupan pembantu Puskesmas	49,38	49,38	48,15
21.	PHBS (%)	NA	35,50	25,18
22.	Rasio akseptor KB (%)	NA	29,78	39,00
23.	Cakupan peserta KB aktif (%)	NA	29,78	39,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2025.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau setiap elemen masyarakat hingga ke seluruh penjuru desa di Kabupaten Buru Selatan. Realitanya fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru Selatan masih perlu ditingkatkan. Tabel berikut menampilkan data tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan.

**Tabel 2.14. Tabel Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik	Posyandu Aktif	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala Madan	1	3	5	-	19	2
2.	Leksula	-	3	10	-	30	-
3.	Namrole	1	2	9	9	25	2
4.	Waesama	-	2	9	-	33	-
5.	Ambalau	-	2	4	-	9	-
6.	Fena Fafan	-	1	2	-	9	1
Jumlah		2	13	39	9	124	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2025

Adapun jumlah kematian ibu maternal dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.15. Tabel Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024

No.	Uraian	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kematian ibu hamil	-	-	2
2.	Kematian ibu bersalin	8	2	-
3.	Kematian ibu nifas	1	1	3
4.	Kematian bayi	7	14	7
5.	Bayi Lahir Mati	11	17	28

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2025

2.3.1.3. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

a. Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Pada tahun 2024 jumlah pasangan usia subur sebanyak 14.812 pasangan, jumlah peserta KB aktif 5.777 orang dengan persentase peserta program KB aktif sebesar 39%. Berikut data jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan tahun 2022-2024.

Tabel 2.16. Tabel Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	14.833	14.812	14.812
2.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Pasangan	4.091	4.411	5.777
3.	Persentase Peserta Program KB Aktif	%	27,58	29,78	39

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2025

2.3.1.4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Akses Air Bersih

Persentase pengguna air bersih di Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 sebesar 65,02 persen pada tahun 2023, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2022-2023

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih(jiwa)	49.692	-
2.	Persentase Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih(%)	-	65,02

Sumber : Dinas PUPR Kab.Buru Selatan, 2024

b. Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi tahun 2023 sebesar 57 persen meningkat menjadi 65 persen pada tahun 2024. Data rumah tangga yang mendapat akses sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase rumah tangga bersanitasi	57	65
2.	Presentase rumah tangga pengguna air	65	66,25

Sumber : Dinas PUPR Kab.Buru Selatan, 2025

c. Kondisi Jalan

Jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten di Buru Selatan dengan kondisi jalan Kab. Buru Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024

Tahun	Jalan Kabupaten				
	Panjang JalanKabupaten (Km)	Panjang jalandengan kondisi baik (Km)		Panjang jalan dengankondisi rusak (Km)	
		Km	(%)	Km	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2022	465,95	283,198	60,78	182,752	39,22
2023	465,95	53,217	13,85	322.588	83,95
2024	469,95	63,88	13,59	NA	NA

Sumber: Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.1.5. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan perumahan di Buru Selatan beberapa indikator menyentuh capaian 90% bahkan lebih di tahun 2023 dan 2024. Indikator selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	91,74	92,14
2.	Rasio rumah layak huni	0,22	0,25
3.	Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau	11,11	11,72
4.	Persentase permukiman yang tertata	73,5	70
5.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	30	30
6.	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2,98	NA
7.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	8,25	7,86

Sumber: Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.1.6. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tahun 2024 beberapa indikator tingkat ketercapaian hingga 100%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21. Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	391 orang	391 orang
2.	Penegakan Perda	100	100
3.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	3,91	3,91
4.	Tingkat waktu tanggap/respon time rate (%)	NA	15

Sumber: Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.1.7. Bidang Urusan Sosial

a. Bantuan

Secara umum bantuan sosial di Buru Selatan menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan capaian 79,20% di tahun 2023 menjadi 84,39% di tahun 2024. Indikator bantuan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.22. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024**

No.	Indikator	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	45,21	58,88
2.	Persentase PMKS yang tertangani	45,21	61,70
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	45,21	61,70
4.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100
6.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	NA
7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	79,20	84,39

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, serta Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja terdapat beberapa Indikator urusan tenaga kerja, diantaranya besaran pencari kerja yang ditempatkan mencapai 100%. Indikator selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.23. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	NA	1
2.	Besaran pencari kerja yang di tempatkan (%)	10,19	10,19
3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	100	100

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak ada jumlah KDRT yang terjadi di Buru Selatan sehingga capaian target sebesar 100%. Indikator lainnya tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.24. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100
2.	Jumlah KDRT	0	0

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2.3. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buru Selatan tingkat capaian lebih tinggi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25. Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	68,25	41,70
2.	Pencapaian skor pola pangan harapan (Kkal/Kap/hr)	2.347	1.983
3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buru Selatan, 2025

2.3.2.4. Bidang Lingkungan Hidup

Urusan bidang lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun capaian terselenggaranya KHLS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten tahun 2023 terlaksana dan 2024 juga terlaksana.

Tabel 2.26. Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada



3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ada	Ada

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

Tabel 2.27. Tabel Pemberian penghargaan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	NA	Tidak ada
2.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota, likasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota (orang)	1	1

Sumber: Dokumen LKPJ TA. 2024

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat yang melakukan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang pada tahun 2024.

Tabel 2.28. Cakupan Area Pelayanan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase cakupan area pelayanan (%)	33,3	33,33

Sumber: Dokumen LKPJ TA. 2024

Tabel 2.29. Tabel Timbulan Sampah, Jumlah sampah dan TPA/TPST/SPA Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Timbunan sampah yang ditangani (%)	72	71
2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	72	75
3.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten (%)	65	60

Sumber: Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2.5. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP

Rasio penduduk ber KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP (17 Tahun keatas atau telah menikah). Capaian rasio penduduk ber KTP per 2024 mencapai 92,26%.

Tabel 2.30. Tabel Rasio Penduduk ber-KTP Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk (%)	57	57,54

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2025 dan Dokumen LKPJ TA. 2024

b. Presentase Rasio Bayi Berakte ber-Akta Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran yang dimaksud adalah Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran dibagi Jumlah keseluruhan bayi lahir yang dilaporkan. Capaian rasio bayi berakte kelahiran pada Tahun 2024 sebesar 81,03%.

Tabel 2.31. Tabel Rasio Bayi berakte Kelahiran Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	82,44	81,03

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2025 dan Dokumen LKPJ TA. 2024

c. Pasangan Berakte Nikah (%)

Capaian rasio pasangan berakte Nikah pada tahun 2023 adalah sebesar 35,89% dan 36,65% pada tahun 2024. Masih rendahnya capaian rasio pasangan berakte nikah ini oleh masih banyaknya masyarakat khususnya pasangan non muslim yang hanya melakukan pernikahan secara agama dan tidak melakukan pencatatan pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk pasangan muslim banyak yang belum memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Tabel 2.32. Tabel Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	35,48	38,14

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2025 dan Dokumen LKPJ TA. 2024

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Dalam era yang serba digital tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan database kependudukan menjadi hal yang vital, banyak aplikasi pelayanan maupun data baik yang diperuntukkan untuk internal administrasi kependudukan maupun instansi pengguna lain serta data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Akan tetapi, masih banyaknya data anomali penduduk yaitu seperti data ganda, identitas invalid maupun sistem error. Oleh karena itu, administrasi

kependudukan dalam berproses validasi database kependudukan secara kontinyu terus melakukan pembenahan. Untuk layanan database kependudukan baik secara online yang bisa diakses oleh instansi pengguna maupun secara statistik data menggunakan Konsolidasi Data Bersih, sehingga data yang diperoleh masyarakat maupun pengguna adalah data valid bukan data anomali. Adapun ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten telah tersedia dan Instansi Pemerintah maupun swasta dapat melakukan Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Terhitung pada tanggal 24 April 2021 *database* kependudukan telah berskala Nasional sehingga *database* kependudukan Tidak tersedia lagi di Kabupaten.

Tabel 2.33. Tabel Database Skala Kabupaten Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala Kabupaten	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2025

e. KTP Nasional berbasis NIK

Pada tahun 2023 dan 2024 Disdukcapil Kab. Buru Selatan telah menggunakan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.34. Tabel KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Buru Selatan, 2025

2.3.2.6. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pada urusan pemberdayaan masyarakat desa terdapat indikator yang tingkat capaian mencapai 100%, yakni persentase PKK aktif. Capaian indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (%)	78	93,82
2.	Persentase PKK Aktif	100	100

3.	Persentase Desa berstatus Swasembada	6,17	7,40

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2.7. Bidang Urusan Perhubungan

Pada urusan perhubungan, pencapaian kinerja urusan perhubungan mengalami peningkatan pada tahun 2023 ke tahun 2024. Jumlah arus penumpang angkutan umum darat meningkat dari 15.330 orang di tahun 2023 menjadi 16.270 orang di tahun 2024. Begitupun indikator lain yang sebagian besar juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.36. Tabel Indikator Kinerja Daerah Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	15.330	16.270
2.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	9	9
3.	Persentase layanan angkutan darat (%)	3	0,11
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	19,64	12,96
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	25.550	27.220
6.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan fery (orang)	20.436	34.946
7.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	10.407	11.937

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2025

Dalam hal aksesibilitas, di Buru Selatan terdata rasio panjang jalan mengalami penurunan yang lumayan signifikan yakni dari 19,64 km per jumlah kendaraan menjadi 12,96 km per jumlah kendaraan di tahun 2024.

Tabel 2.37. Aksesibilitas Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	19,64	12,96

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2025

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami peningkatan secara terus-menerus dari tahun 2022 ke tahun 2024, begitupun barang yang terangkut angkutan umum juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.38. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	56.393	74.103
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	115.523	131.999

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2025

Jumlah barang yang terangkut Buru Selatan tercatat meningkat dari tahun ke tahun, yaitu selama tahun 2022-2024. Salah satunya jumlah barang melalui dermaga per tahun sebanyak 71.336 ton di tahun 2023 menjadi 81.732 ton di tahun 2024. Indikator lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.39. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	71.336	81.732
2.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	44.187	50.267

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2025

Begitupun dengan penumpang pesawat yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 berjumlah 4.338 orang menjadi 5.532 orang di tahun 2024. Data jumlah penumpang pesawat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.40. Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024**

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Datang	5.145	5.532
2.	Pergi	5.262	6.405
Total		10.407	11.937

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2025

2.3.2.8. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan komunikasi dan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Bidang urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Buru Selatan melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Berikut merupakan capaian bidang urusan komunikasi dan informatika tahun 2022-2024.

**Tabel 2.41. Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024**

No.	Indikator	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	92,85	92,87

Sumber : - Dinas Kominfo Kab.Buru Selatan Tahun 2025

- Dokumen LKPJ TA. 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat cakupan layanan telekomunikasi Kabupeten Buru Selatan terus-menerus mengalami peningkatan walaupun belum mencapai angka 100% dalam kurung waktu tiga tahun, yakni tahun 2022-2024.

Alat komunikasi merupakan semua media atau alat yang saling terhubung yang digunakan untuk pertukaran informasi antar individu ataupun kelompok. Salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan oleh penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah telepon genggam. Telepon genggam atau biasa disebut dengan *Handphone* ini merupakan alat komunikasi yag berkembang seiring dengan berkembangnya zaman sehingga banyak dimiliki orang-orang saat ini. Berikut Persentase penduduk Kabupaten Buru Selatan yang menggunakan *Handphone*/Telepon Genggam:

**Tabel 2.42. Persentase penduduk Kabupatenn Buru Selatan yang Menggunakan
Handphone/Telepon Genggam Tahun 2023-2024**

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone	79,92	79,92

Sumber : - Dinas Kominfo Kab.Buru Selatan Tahun 2025

- Dokumen LKPJ TA. 2024

Akses internet sudah merupakan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Internet adalah jalur masuk suatu individual atau kelompok untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer, komputer atau perangkat lainnya.Berikut persentase proporsi rumah tangga dengan akses internetd di Kabupaten Buru Selatan tahun 2023-2024:

**Tabel 2.43. Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024**

No.	Indikator	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	6,89	51,90

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2.9. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Buru Selatan tercatat pada tahun 2023 sebesar 99,30 persen dan sama pada tahun 2024, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Indikator	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Koperasi Aktif	72,10	99,30

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

b. Usah Mikro dan Kecil

Sama halnya dengan koperasi aktif, persentase Usaha Mikro dan Kecil juga tetap pada angka yang sama di tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 2.45. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2023-2024

No.	Indikator	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	117	117

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

Tabel 2.46. Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	30	30	30	30
2.	Jumlah koperasi dan UKM penerima bantuan hibah	1 Koperasi dan 1 UKM	1 Koperasi dan 1 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM
3.	Jumlah produk UKM yang dipromosikan	10	10	15	15
4.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta design dan teknologi	12	12	15	15

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Buru Selatan , 2023

2.3.2.10. Bidang Urusan Penanaman Modal

Adapun jumlah investor di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 sebanyak 593 di tahun 2022 dan sebanyak 524 di tahun 2024, begitupun jumlah investasi dan diikuti oleh rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47. Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Indikator	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	319	524
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rupiah)	40.476.550.000	135.517.000.000
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang)	278	176

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2.11. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Kepemudaan bertanggung jawab untuk pengembangan organisasi pemuda. Kabupaten Buru Selatan memiliki beberapa organisasi pemuda aktif yang telah terealisasi dari beberapa jumlah yang telah ditargetkan, berikut persentase organisasi yang aktif di Kabupaten Buru Selatan tahun 2022-2024:

Tabel 2.48. Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Organisai Pemuda (%)	100	100

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Buru Selatan, 2025

Kabupaten Buru Selatan tidak hanya memiliki indikator kinerja dalam bidang kepemudaan saja, namun juga memiliki indikator kinerja dalam bidang olahraga. Berikut capaian dari indikator kinerja bidang olahraga tahun 2022-2024:

Tabel 2.49. Persentase Bidang Olahraga Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan pembinaan Olahraga (orang)	7	7
2.	Cakupan pembinaan atlet muda (orang)	1	1
3.	Jumlah atlet berprestasi	150	150
4.	Jumlah prestasi olahraga	-	1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Buru Selatan, 2025

2.3.2.12. Bidang Urusan Perpustakaan

Persentase Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2023 mencapai 30,41 persen dan tidak mengalami peningkatan ditahun 2024. Sedangkan persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat mengalami peningkatan di tahun 2023 yakni sebesar 66,67 persen naik menjadi 75 persen di tahun 2024 . Kedepan dapat direncanakan basis data dengan menyediakan sumber buku-buku yang dapat diinformasikan kepada masyarakat tetapi harus berbasis internet, sehingga masyarakat akan mudah mengaksesnya.

**Tabel 2.50. Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan
Tahun 2023-2024**

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	0,89	2,20
2.	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	30,41	30,41
3.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	66,67	75

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.2.13. Bidang Urusan Kearsipan

Bidang Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah. Pengelolaan arsip dinamis maupun statis kewenangan daerah merupakan salah satu urusan kearsipan di daerah. Tabel berikut merupakan rincian data arsip Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dan 2023 :

Tabel 2.51. Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2022-2023

No.	Uraian	Target Capaian Tahunan			
		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Bidang Layanan Kelautan Dan Perikanan

Produksi perikanan adalah keseluruhan hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan ataupun hewan air lainnya yang diambil dari sumber perikanan alami maupun tempat . Pada Kabupaten Buru Selatan produksi perikanan dilakukan dengan keduanya yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Berikut jumlah produksi perikanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2023-2024:

Tabel 2.52. Produksi Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Produksi perikanan tangkap (%)	85,50	84,20
2.	Produksi perikanan budidaya (%)	20	72,90

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

Mendasar dari produksi perikanan, Kabupaten Buru Selatan juga mengukur nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkap untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Berikut nilai tukar nelayan dan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2023-2024:

Tabel 2.53. Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Tukar Nelayan	102,50	101,60
2.	Angka Konsumsi ikan (%)	62,80	78,50

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

Selain Nilai Tukar Nelayan, juga terdapat cakupan bina kelompok nelayan yang terealisasi sebesar 90% pada tahun 2024. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	112	90

Sumber : Dokumen LKPJ TA. 2024

2.3.3.2. Urusan Bidang Pertanian

Pada urusan bidang pertanian, Kabupaten Buru Selatan capaian beberapa indikator sebesar 100% di tahun 2024. Indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 32.55. Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,85	104,98
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	36,35	36,71
3.	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Ada	Ada
4.	Cakupan bina kelompok petani (%)	17,78	20,51
5.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	5,56	5,74
6.	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	100	100
7.	Tersedianya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani (km)	144,6	NA

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buru Selatan, 2025

2.3.3.3. Bidang Urusan Pariwisata

Bidang urusan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan bertanggungjawab atas 2 sub urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata. Pada urusan kebudayaan terdapat 3 indikator yang telah terealisasi di tahun 2022-2024 yaitu (1) penyelenggaraan festival seni dan budaya, (2) benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan, (3) cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Berikut tabel capaian keempat indikator kinerja urusan kebudayaan.

Tabel 2.56. Tabel Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya (Event)	3	3
2.	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (jumlah)	13	24
3.	Jumlah Cagar Budaya yang di Kelola Secara Terpadu (BCB)	6	6

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2025

Tabel. 2.57. Target Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	21,71	95,29
2.	Lama Kunjungan Wisatawan (hari)	519	1.675
3.	Jumlah pengembangan obyek wisata unggulan (destinasi)	2	3
4.	PAD Sektor Pariwisata (%)	19,94	8,00
5.	Jumlah SDM Profesional Bidang Pariwisata (orang)	10	10

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2025

2.3.3.4. Bidang Urusan Perdagangan

Untuk urusan perdagangan, semua indikator tercapai 100% pada tahun 2023. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58. Capaian Indikator Bidang Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	13,40	12
2.	Ekspor bersih perdagangan (poin)	1.280	980
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	21,21	21,60

Sumber : Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Buru Selatan, 2025

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional untuk kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha.

Tabel 2.59. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2021

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berdasarkan jenis pengeluaran	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Makanan (Rp)	419.416	423.318
Non Makan (Rp)	294.637	329.762
Total Pengeluaran rata-rata per kapita (Rp)	714.053	752.081



Presentase Makanan (%)	58,74	56,29
Presentase Non Makanan (%)	41,26	43,71

Sumber : Buru Selatan dalam Angka 2022, Data diolah Bappelitbang

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur khususnya pada bidang perhubungan merupakan hal yang penting dalam rangka mempermudah konektivitas antar wilayah, baik antar kecamatan, kecamatan dan Kabupaten maupun Kabupaten dan Provinsi. Berikut indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024.

Tabel 2.60. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Perhubungan			
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	15.330	16.270
2.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	9	9
3.	Persentase layanan angkutan darat (%)	3	0,11
4.	Pemasangan Rambu-rambu	25	30
5.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	19,64	12,96
6.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	25.550	27.220
7.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	20.436	34.946
8.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	10.407	11.937
Aksesibilitas Daerah			
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	19,64	12,96
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum			
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	56.393	74.103
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	115.523	131.999
Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun			
1.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	71.336	81.732
2.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	44.187	50.267

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buru Selatan, 2025

a. Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan akan listrik di Kabupaten Buru Selatan sangatlah penting bagi masyarakat karena sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2022 pasokan listrik yang ada di wilayah Kabupaten Buru Selatan, pada umumnya dipasok oleh cabang PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ulp Namrole, Kp Wamsisi, Kp. Leksula, Kp Ambalau.

Tabel 2.61. Daya Terpasang dan Distribusi Listrik di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Daya Terpasang Tahun 2023 (Kw)
(1)	(2)	(3)
1.	Leksula dan Fena Fafan	1.070
2.	Namrole	7.650
3.	Waesama	1.750
4.	Ambalau	637
Jumlah		11.107 kW

Sumber : PLN ULP Namrole, 2024

b. Hotel dan Restoran

Untuk hotel dan restoran di Buru Selatan tergambar dalam tabel 2.66. dimana jumlah dan macam pajak retribusi sebanyak 8 jenis pajak di tahun 2024.

Tabel 2.62. Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restoran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran (Unit)	19	NA
2.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel (Unit)	24	NA
3.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Berbintang (Unit)	1	1
4.	Jumlah dan Macam Pajak Daerah (Jenis)	8	8
5.	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi	4	NA
6.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha (Buah)	22	NA

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2025

c. Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank

Fasilitas perbankan dan lembaga keuangan non bank di Buru Selatan terdata sebanyak 5 unit, dengan rincian bank cabang sebanyak 4 unit dan perusahaan asuransi sebanyak 1 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63. Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis dan Jumlah Bank Cabang (Unit)	4 Unit	4 Unit
2.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit)	1 Unit	1 Unit

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2023***2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi****a. Lama Proses Perijinan**

Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru Selatan beserta lama pembuatannya sebagai berikut.

Tabel 2.64. Lama Proses Perizinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lama Proses Perizinan	5 hari	5 Hari

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Buru Selatan, 2025***b. Angka Kriminalitas**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Buru Selatan, jumlah perkara pidana yang dilaporkan di Buru Selatan pada tahun 2023 sebanyak 119 kasus, perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 35 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian/ Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah perkara pidana yang dilaporkan	119 Kasus
2.	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	35 Kasus

Sumber : Polres Kab. Buru Selatan, 2024

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan potensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Buru Selatan. Berikut persentase tingkat Pendidikan penduduk Kabupaten Buru Selatan berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 2.66. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2023

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat/ Ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	13,33	7,05	8,72	6,51
Perempuan	8,63	6,40	8,06	5,52
40 Persen				
Terbawah	13,81	7,70	9,55	8,20
Tengah	12,51	9,28	10,19	7,21
Teratas	19,10	11,92	12,22	8,20
Buru Selatan	8,96	5,40	6,09	4,73

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2023

2.5. EVALUASI RKPD KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024

Tabel 2.67. Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan	Anggaran APBD 2024 (Setelah Perubahan) (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan IV (Rp.)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.	Dinas Pendidikan	169.904.668.710	151.751.941.289	75,91	T	89,32	T
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	122.911.221.301	102.754.940.810	94,11	ST	83,60	T
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	36.692.363.310	35.036.474.941	56,83	R	95,49	ST
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.527.887.000	35.688.947.544	89,44	T	58,00	R
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.878.271.000	4.727.606.927	95,44	ST	96,91	ST
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.173.956.000	3.095.286.892	87,57	T	97,52	ST
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.732.153.968	3.250.637.276	99,59	ST	87,10	T
8.	Dinas Sosial	4.649.606.000	4.612.004.016	99,99	ST	99,19	ST



Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
9.	Dinas Ketahanan Pangan	3.750.493.860	3.647.529.342	91,62	ST	97,25	ST
10.	Dinas Lingkungan Hidup	6.514.863.820	6.220.677.965	97,61	ST	95,48	ST
11.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.903.068.935	2.798.767.090	97,92	ST	96,41	ST
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.134.996.000	5.035.858.943	99,12	ST	98,07	ST
13.	Dinas Perhubungan	14.214.011.250	12.187.635.671	97,16	ST	85,74	T
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.069.707.000	2.873.163.841	99,04	ST	93,60	ST
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8.354.123.120	8.110.273.995	87,60	T	97,08	ST
16.	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.486.023.000	2.665.807.249	96,92	ST	76,47	T
17.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.300.486.700	3.195.129.886	98,98	ST	96,81	ST
18.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	13.015.989.696	7.979.481.869	98,30	ST	61,31	R
Urusan Pilihan							
19.	Dinas Perikanan	8.686.295.488	8.250.081.680	94,93	ST	94,98	ST
20.	Dinas Pariwisata	3.510.398.000	3.290.128.501	80,00	T	93,73	ST
21.	Dinas Pertanian	9.850.034.000	8.301.577.094	77,60	T	84,28	T
22.	Dinas Perdagangan	3.587.190.000	3.354.065.359	97,18	ST	93,50	ST
Urusan Fungsi Penunjang Urusan							
23.	Inspektorat	3.615.445.000	3.494.216.086	99,68	ST	96,65	ST
24.	BAPPELITBANG	10.193.288.000	9.957.175.937	93,20	ST	97,68	ST
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	140.747.530.162	138.891.488.246	98,48	ST	98,68	ST
26.	Badan Pendapatan Daerah	3.716.062.000	3.677.998.553	98,29	ST	98,98	ST
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.468.647.000	9.384.884.155	99,66	ST	99,12	ST
Urusan Fungsi Pendukung							
28.	Sekretariat Daerah	27.190.057.000	26.749.550.517	96,93	ST	98,38	ST



29.	Bagian Pemerintahan	1.730.580.550	1.729.718.000	97,44	ST	99,95	ST
30.	Bagian Perekonomian dan SDA	907.800.000	907.800.000	100,00	ST	100,00	ST
31.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.902.700.000	10.083.818.000	97,12	ST	92,49	ST
32.	Bagian Hukum	1.066.600.000	1.052.760.615	99,06	ST	98,70	ST
33.	Bagian Umum	7.319.001.000	5.984.302.998	78,84	T	81,76	T
34.	Bagian Organisasi	993.400.000	966.314.560	97,86	ST	97,27	ST
35.	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler	1.159.000.000	1.116.053.644	98,84	ST	96,29	ST
36.	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.128.350.000	1.105.189.100	99,94	ST	97,95	ST
37.	Bagian Administrasi Pembangunan	1.015.395.000	1.015.217.480	98,62	ST	99,98	ST
38.	Sekretariat DPRD	31.275.882.000	30.705.486.331	73,06	S	98,18	ST
Urusan Pemerintahan Umum							
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.654.148.200	43.623.714.422	100,00	ST	99,93	ST
Urusan Kewilayahan							
40.	Kecamatan Namrole	2.353.895.000	2.351.590.170	100,00	ST	99,90	ST
41.	Kecamatan Leksula	3.657.937.000	3.593.590.659	98,74	ST	98,24	ST
42.	Kecamatan Waesama	2.085.777.000	2.045.733.397	96,40	ST	98,08	ST
43.	Kecamatan Kepala Madan	2.329.018.000	2.318.638.151	99,48	ST	99,55	ST
44.	Kecamatan Ambalau	1.526.392.000	1.506.670.317	93,97	ST	98,71	ST
45.	Kecamatan Fena Fafan	1.644.439.000	1.619.129.455	97,25	ST	98,46	ST
TOTAL		806.529.152.070	22.709.058.973	93,90		93,71	

Sumber : Matriks Evaluasi RKPD Kab. Buru Selatan Tahun 2024

Keterangan : ST : Sangat Tinggi
T : Tinggi
S : Sedang
R : Rendah
SR : Sangat Rendah

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.68. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan

No.	Urusan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	a. Penyebaran guru belum merata pada sebagian besar sekolah di Kabupaten Buru Selatan khususnya di wilayah pedalaman dikarenakan belum adanya media Informasi, akses jalan, dan tidak adanya semangat pengabdian guru; b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), ruang kelas, Perpustakaan, TIK, lab Komputer; c. Sumber daya tenaga pengajar masih belum semuanya berkualitas; d. Masih rendahnya mutu siswa pada jenjang SD, SMP; e. Belum optimalnya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2.	Kesehatan	a. Pengendalian stunting belum optimal; b. Meningkatnya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi (AKI/AKB); c. Belum optimal pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa; d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal; e. Belum optimal pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; f. Minimnya sarana dan prasarana transfusi darah; g. Masih tingginya angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular yang terjadi di masyarakat; h. Belum optimal pelayanan kesehatan pada puskesmas di daerah pesisir; i. Belum optimal sistem informasi manajemen rumah sakit; j. Belum adanya sarana transportasi umum sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau RSUD; k. Masih tingginya tenaga medis yang tidak menetap pada lokasi yang ditugaskan; l. Belum optimalnya penanganan dan pencegahan stunting karena : ▪ Koordinasi lintas sektor yang masih minim/lemah; ▪ Alokasi anggaran untuk stunting masih sangat terbatas; ▪ Masih terdapat daerah yang sulit untuk dijangkau, serta kultur masyarakatnya (terkait adat) m. Kesadaran /pengetahuan masyarakat terkait stunting masih rendah.



3.	Pekerjaan Umum	a. Belum optimalnya pembangunan jalan dalam kota, antar kecamatan, wilayah berbasis ekonomi dan wilayah permukiman adat terpencil; b. Belum optimalnya pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih dan sanitasi bagi masyarakat; c. Terbatasnya aksesibilitas transportasi pada wilayah terpencil; d. Terbatasnya sarana prasarana jalan dan jembatan.
4.	Perumahan	a. Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dinas sarana dan prasarana pendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; b. Minimnya sarana pendukung dinas sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan aktifitas pelayanan publik; c. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan pemukiman belum memadai; d. Masih banyak rumah tidak layak huni; e. Masih banyak pemukiman kumuh; f. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih belum layak atau kurang maksimal; g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau; h. Kurangnya pemahaman masyarakat dan cara penanggulangan bahaya kebakaran sehingga mengakibatkan kerugian material maupun jiwa; i. Ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang belum memadai.
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perbup; b. Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya anggota LINMAS; d. Luasnya wilayah kerja dan penduduk yang heterogen; e. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur; f. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat.
6.	Sosial	a. Belum maksimalnya prosedur Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar bidang sosial kepada penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia terlanter ke dalam penganggaran dinas.
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1.	Tenaga Kerja	a. Kurangnya tenaga kerja yang terampil/kurangnya kompetensi tenaga kerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Tingkat kemiskinan masih tinggi; b. Tingginya pengaruh sistem sosial dan budaya masyarakat adat; c. Rendahnya pendidikan dan pelatihan perempuan di berbagai bidang (politik, pemerintahan dan swasta serta ekonomi); d. Rendahnya partisipasi angka kerja perempuan; e. Kurangnya pemenuhan hak anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus
3.	Lingkungan Hidup	a. Kurangnya kebersamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan; b. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas; c. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional; d. Belum adanya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Buru Selatan; e. Keterbatasan daya yang akurat;

		f. Kurang tersedianya armada (<i>truck</i>) pengangkutan sampah sehingga mobilitas pengangkutan sampah menjadi terbatas yang menyebabkan sering terjadinya penumpukan di beberapa titik TPS (Tempat Pembuangan Sampah); g. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah terkadang masyarakat melakukan pembuangan sampah pada tempat yang tidak terdapat bak sampah
4.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Kemampuan sumber daya manusia dan pelaksanaan teknis yang tidak merata; b. Upaya kearah terintegrasinya peraturan antara sektor dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan; c. Masih rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan; d. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya
5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Desa-desanya masih di jabat oleh pejabat Kepala Desa bukan Kepala Desa defenitif; b. Sumber daya aparatur pemerintah desa masih kurang; c. Kualitas sumber daya manusia di tingkat desa yang minim; d. Belum adanya administrasi desa tentang tapal batas desa (peta desa); e. Belum adanya profil yang dimiliki oleh desa; f. Kurangnya Koordinasi antara desa, kecamatan dan pihak pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat desa; g. Kurangnya peran aktif masyarakat desa dalam lembaga kemasyarakatan; h. BUMDes yang dibentuk oleh desa tidak sesuai dengan potensi desa yang dimiliki; i. Tidak adanya data tentang potensi desa; j. Keterbatasan SDM dalam mengelola BUMDes.
6.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kurangnya advokasi pemanfaatan data pembangunan keluarga di lintas sektor; b. Kurangnya edukasi dari instansi terkait lintas sektor tentang program KB; c. Terbatasnya sarana penunjang penyuluhan KB; d. Belum adanya pelatihan khusus tenaga pelaksana pelayanan KB di lapangan (bidan dan dokter); e. Kualitas tenaga PPKBD masih kurang dikarenakan belum dilatih sehingga proses penggerakan program di bidang KB khususnya tidak maksimal; f. Terbatasnya sarana penyimpanan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan.
7.	Perhubungan	a. Belum efisiennya pergerakan barang maupun penumpang antar wilayah; b. Belum optimalnya konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Buru Selatan.
8.	Komunikasi dan Informatika	a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan; b. Kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur serta keterbatasan SDM yang membidangi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Buru Selatan mengingat keterbatasan anggaran yang diterima oleh dinas;

		c. Kebutuhan akan pengumpulan data (statistik) masih terkendala dengan kebutuhan akan infrastruktur dan SDM serta belum adanya integrasi data antar OPD.
9.	Koperasi dan UKM	a. Keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tidak tercover semua koperasi yang tersebar di 6 kecamatan untuk dilakukan pendataan dan pengawasan; b. Penambahan Pos anggaran untuk kegiatan diklat perkoperasian dan kewirausahaan dalam pengembangan SDM bagi aparatur; c. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi serta usaha mikro dan kecil belum optimal; d. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi serta usaha mikro dan kecil.
10.	Penanaman Modal	a. Kurangnya sumber daya manusia berupa sarjana IT, sarjana bahasa inggris dan sarjana desain grafis untuk pengelolaan aplikasi perizinan.
11.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Terbatasnya sarana prasarana olahraga yang representatif; b. Kurangnya Pembinaan olahraga berbakat.
12.	Perpustakaan dan Arsip	a. Kurangnya jumlah pengunjung perpustakaan yang disebabkan penggunaan media sosial (internet) sebagai bahan pembelajaran; b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan.
Urusan Pilihan		
1.	Perikanan	a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya dan perikanan, dimana masih banyak ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang; b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor perikanan baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan; c. Kurangnya sarana prasana budidaya perikanan; d. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perikanan untuk pendapatan daerah; e. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur untuk pasar lelang.
2.	Pertanian	a. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi pertanian; b. Masih kurangnya regulasi dan sarana prasarana teknologi pertanian; c. Sistem pengolahan ternak belum memenuhi standar pengolahan yang baik; d. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular (PHMS) serta zoonosis; e. Masih rendahnya mutu hasil panen mengakibatkan hasil panen belum mampu bersaing dengan produk pertanian dari luar; f. Belum optimalnya fungsi kelompok tani sebagai wahana kerja sama dan unit produksi.
3.	Pariwisata	a. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata; b. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan ; c. Belum optimalnya kerjasama kemitraan antar stakeholder di sektor pariwisata; d. Belum memadainya basis data (<i>database</i>) yang dimiliki dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata dan pelayanan di Kabupaten Buru Selatan; e. Belum optimalnya strategi promosi/pemasaran pariwisata serta pemanfaatan media massa (cetak dan elektronik) sebagai sarana promosi pariwisata nasional; f. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata;



		g. Masih kurangnya kerja sama dalam pengembangan kepariwisataan masyarakat tentang kepariwisataan dalam lingkungan kawasan daerah wisata lokasi/ medan yang sulit
4.	Perindustrian	a. Jumlah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak seimbang dengan jumlah pelaku usaha sehingga diperlukan adanya bantuan yang maksimal sesuai jumlah pelaku usaha yang ada.; b. Belum optimalnya pengelolaan produk pasca produksi/peningkatan kualitas mutu produk.
5.	Perdagangan	a. Fasilitas jumlah kios/ toko yang disiapkan oleh pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal; b. Tera dan tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Penerima dan Sarana Prasarana tera dan tera ulang belum ada; c. Pelaksanaan pemantauan kebutuhan pokok dan pengawasan barang kadaluarsa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan adanya keterbatasan anggaran
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1.	Pertanahan	a. Terhambatnya proses penerbitan sertifikasi aset tanah pemda akibat dari tidak lengkapnya dokumen pengadaan tanah pemda.
2.	Statistik	a. Belum optimalnya sistem satu data; b. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral; c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada rendahnya data terolah spasial dan aspasial; d. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral disebabkan belum terbangunnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok, fungsi serta peran wali data sektoral pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
3.	Pengawasan	a. Terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor; b. Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga administrasi guna mendukung kelancaran tugas pengawasan, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan dikerjakan oleh masing-masing pejabat pengawasan pemerintah dan auditor; c. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.
4.	Perencanaan	a. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah.
5.	Keuangan	a. Perubahan regulasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Terbatasnya pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah.
6.	Kepegawaian	a. Mekanisme kenaikan pangkat bagi pegawai yang belum tertata dengan baik; b. Pengisian jabatan masih belum dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme; c. Mekanisme pengembangan karir PNS guna mendorong profesionalitas PNS belum berjalan efektif karena kesenjangan kualifikasi, dan kompetensi pegawai sangat besar; d. Pola karir bagi PNS belum jelas dan masih belum ada komitmen yang kuat dari para stakeholder untuk melaksanakan pola karir sesuai ketentuan; e. Pengisian jabatan belum memperhatikan kualifikasi pendidikan, spesialisasi keilmuan dan kompetensi;

		f. Banyak PNS yang belum memahami kewenangan dalam menegakkan disiplin;; g. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan ASN melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
7.	Penelitian dan Pengembangan	a. Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal.
8.	Penanggulangan Bencana Daerah	a. Belum optimalnya pembangunan sarana mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya bencana alam bagi keamanan masyarakat.
9.	Fungsi Lainnya	a. Masuknya perilaku sosial dan budaya luar yang negatif mempengaruhi nilai budaya lokal dan kearifan lokal; b. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintahan; c. Rentang kendali dan pelayanan publik belum optimal; d. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketenteraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat; e. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; f. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

2.7. TARGET DAN REALISASI PENERAPAN SPM TAHUN 2024

Realisasi penerapan SPM Tahun 2024 terdiri dari enam urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaam umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan bidang sosial. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Target dan Realisasi Penerapan SPM Tahun 2024

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Tahun Anggaran 2024 (Setelah Perubahan)		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	8.423.816.820	7.038.113.105	83,55
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	8.423.816.820	7.038.113.105	83,55
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4.057.472.120	3.086.384.355	76,07
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.426.500.000	1.795.887.235	74,01
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	300.000.000	-	-
1.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	234.800.000	234.070.000	99,69
1.4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	259.692.000	259.692.000	100,00
1.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	471.722.800	170.446.120	36,13
1.6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	265.860.000	265.126.000	99,72



1.7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	230.874.000	230.874.000	100,00
1.8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	327.000.000	130.289.000	39,84
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.004.541.200	3.630.167.200	90,65
2.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	56.925.000	-	-
2.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	162.767.000	162.767.000	100,00
2.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	211.100.000	210.630.000	99,78
2.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	239.050.000	239.030.000	99,99
2.5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	172.532.000	172.318.000	99,88
2.6	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	209.940.000	209.506.000	99,79
2.7	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.730.827.200	2.635.916.200	96,52
2.8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	221.400.000	-	-
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	361.803.500	321.561.550	88,88
3.1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	174.967.500	149.931.650	85,69
3.2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	75.000.000	60.029.900	80,04
3.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	111.836.000	111.600.000	99,79
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.039.233.000	836.993.000	80,54
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.039.233.000	836.993.000	80,54
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.039.233.000	836.993.000	80,54
1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	789.733.000	708.493.000	89,71
1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.500.000	18.500.000	100,00
1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	42.500.000	42.500.000	100,00
1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	29.000.000	29.000.000	100,00
1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.000.000	10.000.000	76,92
1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	82.775.000	14.250.000	17,22
1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	63.725.000	14.250.000	22,36
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	944.043.000	817.006.000	86,54
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	371.272.000	371.272.000	100,00



1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	371.272.000	371.272.000	100,00
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	371.272.000	371.272.000	100,00
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	572.771.000	445.734.000	77,82
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	572.771.000	445.734.000	77,82
1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	572.771.000	445.734.000	77,82
IV.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	84.606.000	74.579.000	88,15
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	84.606.000	74.579.000	88,15
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	84.606.000	74.579.000	88,15
1.1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	84.606.000	74.579.000	88,15
V.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	574.757.000	573.599.200	99,80
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	405.000.000	405.000.000	100,00
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	405.000.000	405.000.000	100,00
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	405.000.000	405.000.000	100,00
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	15.516.000	14.400.200	92,81
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.516.000	14.400.200	92,81
1.1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15.516.000	14.400.200	92,81
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	154.241.000	154.199.000	99,97
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	48.881.000	48.881.000	100,00
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	48.881.000	48.881.000	100,00
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.665.000	55.663.000	99,99
2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi	55.665.000	55.663.000	99,99
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	49.695.000	49.655.000	99,92
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	49.695.000	49.655.000	99,92



VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	133.006.700	132.993.000	99,99
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	123.006.700	122.993.000	99,99
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	123.006.700	122.993.000	99,99
1.1	Pemberian Layanan Rujukan	123.006.700	122.993.000	99,99
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10.000.000	10.000.000	100,00
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
1.1	Penyediaan Permakanan	10.000.000	10.000.000	100,00
TOTAL		11.199.462.520	9.473.283.305	84,59

Sumber : Matriks Evaluasi RKPD Kab. Buru Selatan Tahun 2024



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Buru Selatan yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Maluku, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan *peer countries* seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Perekonomian

Indonesia sepanjang tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 5,03% melambat dibanding capaian 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan permintaan global yang mulai pulih.

Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan permintaan luar negeri. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB. Hal ini tecermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan penambahan barang modal untuk aktivitas produksi. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Lainnya, Transportasi & Pergudangan, serta Akomodasi & Makan Minum. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi. Sepanjang tahun 2024, wilayah Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku & Papua tumbuh di atas ekonomi nasional.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% pada kuartal IV 2024, secara keseluruhan mencapai 4,94% sepanjang tahun. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari kenaikan okupansi hotel dan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi. APBN menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk stabilitas harga. Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta di tahun 2024 turut mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada kuartal IV 2024 tumbuh 6,06% dan 12,48% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta berbagai ajang olahraga.

Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 6,61% dengan pertumbuhan 4,17% pada triwulan IV. Kinerja yang sangat baik tersebut tercermin dari peran belanja negara yang semakin optimal sebagai *shock absorber* untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi belanja negara tersebut memberikan multiplier effect bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) tercatat tumbuh 5,03% pada triwulan IV dan 4,61% sepanjang tahun 2024. Kinerja pertumbuhan ini melanjutkan tren penguatan yang konsisten dalam kurun empat tahun terakhir. Stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter, mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal ini terlihat dari realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh 20,82% dengan total nilai Rp1.714 T, lebih dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan impor

barang modal dan bahan baku juga memberi indikasi kinerja manufaktur yang terjaga. Melalui APBN, Pemerintah turut mendorong investasi dengan meningkatkan belanja modal untuk konstruksi serta pembangunan infrastruktur konektivitas, bendungan, kawasan industri dan pariwisata.

Kinerja Ekspor pada kuartal IV tumbuh 7,63% dan secara tahunan tumbuh 6,51%. Pertumbuhan positif ekspor tahun 2024 ditopang oleh meningkatnya ekspor barang dan ekspor jasa. Peningkatan ekspor barang terutama didorong oleh peningkatan ekspor komoditas besi baja dan bahan bakar mineral yang secara volume tumbuh masing-masing 17,8% dan 7,8%. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor jasa ditopang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh 19,05%. Di sisi lain, impor barang masih berkontraksi sebesar 10,36 % pada kuartal IV dan sebesar 7,95 % secara tahunan.

Sektor Manufaktur pada kuartal IV 2024 tumbuh 4,89% dan 4,43% sepanjang tahun 2024. Permintaan domestik maupun global yang tetap kuat menjadi penopang pertumbuhan, terutama pada subsektor industri logam dasar, elektronik, dan makan minum. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor perdagangan tumbuh 5,19% pada kuartal IV atau tumbuh 4,86% sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas produksi.

Sektor-sektor terkait mobilitas masyarakat mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2024. Sektor transportasi tumbuh 7,92% pada kuartal IV dan mencapai 8,69% sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan itu, sektor Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh tinggi, sebesar 6,61% pada kuartal IV dan 8,56% di sepanjang tahun 2024. Momentum ini didorong oleh penyelenggaraan event nasional dan internasional serta perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata yang meningkatkan arus wisatawan baik dari domestik dan mancanegara.

Sektor primer mengalami moderasi, baik dari sektor pertanian maupun sektor pertambangan. Sektor pertanian tumbuh 0,71% pada kuartal IV atau 0,67% untuk keseluruhan tahun 2024. Pelemahan kinerja sektor pertanian ini disebabkan penurunan produksi padi dan kelapa sawit. Namun demikian, kinerja sektor pertanian diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, sektor pertambangan juga tumbuh moderat sebesar 3,95% pada kuartal IV atau 4,90% untuk tahun 2024. Moderasi harga komoditas menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan sektor pertambangan.

Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif sepanjang tahun 2024. Wilayah Jawa dan Sumatera tetap menjadi kontributor utama penopang pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,92% dan 4,45%. Aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan konsisten menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara itu, aktivitas hilirisasi menopang pertumbuhan tinggi di wilayah Timur Indonesia. Wilayah Maluku-Papua dan Sulawesi tumbuh tinggi masing-masing sebesar 7,81% dan 6,18%.

Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi pendorong aktivitas konstruksi di Kalimantan sehingga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,52%. Aktivitas pariwisata tumbuh kuat mampu menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 5,04%.

Kinerja perekonomian nasional yang resilien tidak terlepas dari kerja keras APBN. APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui keberpihakan program perlindungan sosial (perlinsos), mendukung perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan nasional. Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah akan terus memperkuat program Perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako, serta Subsidi dan Kompensasi. Peningkatan kapasitas UMKM akan dilakukan melalui program KUR dan fasilitas perpajakan. Sementara, upaya untuk menjaga stabilitas harga akan dilakukan melalui stabilisasi harga pangan (SPHP).

Peran APBN sebagai *shock absorber* akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tetap berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 sebesar 4,95% (yoy) ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali pada angka 1,84% pada bulan September 2024. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Tiongkok (4,6%), Singapura (4,1%), Korea Selatan (1,5%), dan Amerika Serikat (2,7%).

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah – panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,3
2.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	37,14
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,67
4.	Kemiskinan Ekstrem	%	0
5.	Tingkat Kemiskinan	%	6,5 – 7,5
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,44 – 4,96
7.	Rasio Gini	Rasio	0,377 – 0,380
8.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,57

Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2026

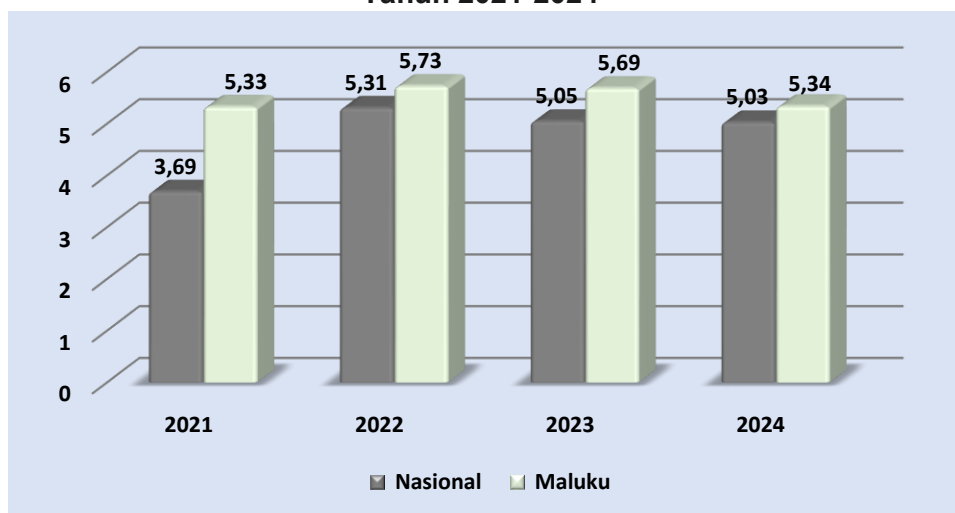
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Maluku

3.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Selama periode 2021-2024, Provinsi Maluku menunjukkan variasi dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional yaitu sebesar 5,33 persen dibanding rata nasional yakni sebesar 3,69 persen. Pada tahun 2022 mencapai sebesar 5,73 persen, tahun 2023 sedikit menurun yakni sebesar 5,69 persen dan pada tahun 2024 turun menjadi 5,34 persen. Provinsi Maluku mengalami tren yang fluktuatif namun berhasil menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif positif selama periode tersebut dengan capaian selalu di atas rata-rata nasional.

Perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 mencapai 16,33 trilyun rupiah dan atas harga konstan 2010 mencapai 9,67 trilyun rupiah. Ekonomi Maluku triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,52 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori industri pengolahan sebesar 11,64 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh besar 24,98 persen. Ekonomi Maluku triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,37 persen (q-on-q). Dari produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 6,22 persen, sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 88,66 persen. Ekonomi Maluku triwulan IV-2024 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,34 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,44 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor luar negeri yang tumbuh sebesar 65,13 persen.

Diagram 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024

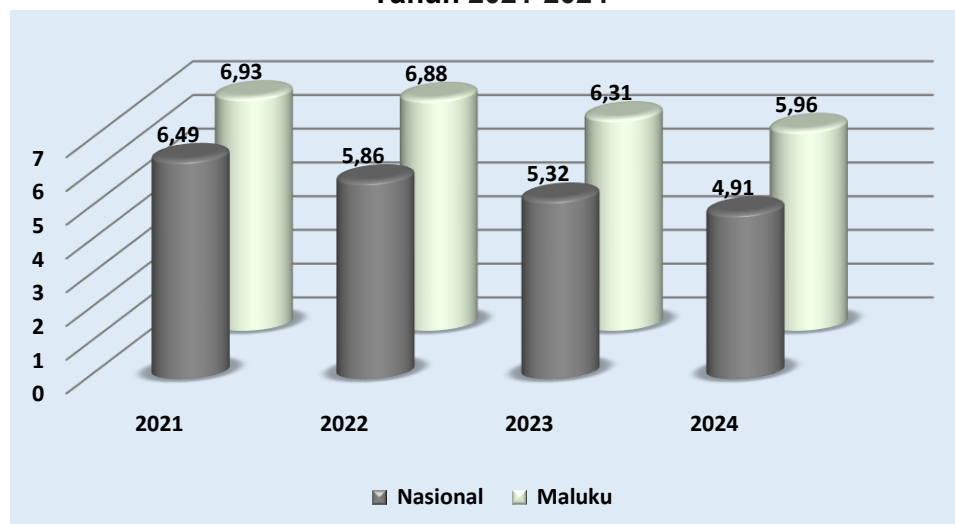


Sumber : - Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025
- Provinsi Maluku Dalam Angka, BPS 2025

3.1.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 949.084 orang, naik 47.313 orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,94 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 892.547 orang, naik sebanyak 45.626 orang dari Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 35.758 orang. Sebanyak 317.393 orang (35,56 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,80 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,97 persen poin dan 2,00 persen poin dibandingkan Februari 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 5,96 persen, turun sebesar 0,12 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Diagram 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024



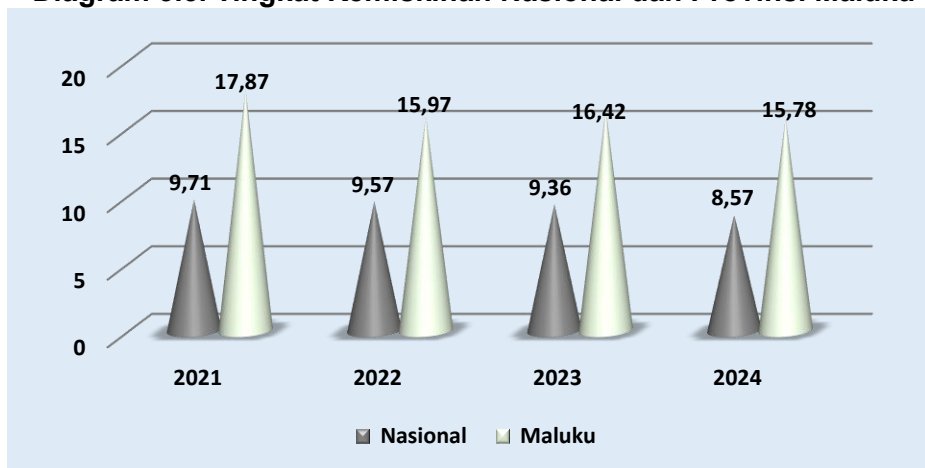
Sumber : - Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025
- Provinsi Maluku Dalam Angka, BPS 2025

3.1.2.3. Tingkat Kemiskinan Tahun 2024

Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 15,78 persen, turun 0,27 persen poin terhadap Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 293,99 ribu orang, turun 3,7 ribu orang terhadap Maret 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 5,14 persen, turun menjadi 4,59 persen pada September 2024. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 24,43 persen, naik menjadi 25,08 persen pada September 2024. Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan turun sebanyak 1,86 ribu orang (dari 43,33 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 41,47 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 2,07 ribu orang (dari 258,28 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 256,21 ribu orang pada September 2024). Garis

Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 739.818-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 548.623,- (72,14 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 211.855,- (27,86 persen). Pada September 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Maluku memiliki 6,41 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 4.742.233,- /rumah tangga miskin/bulan.

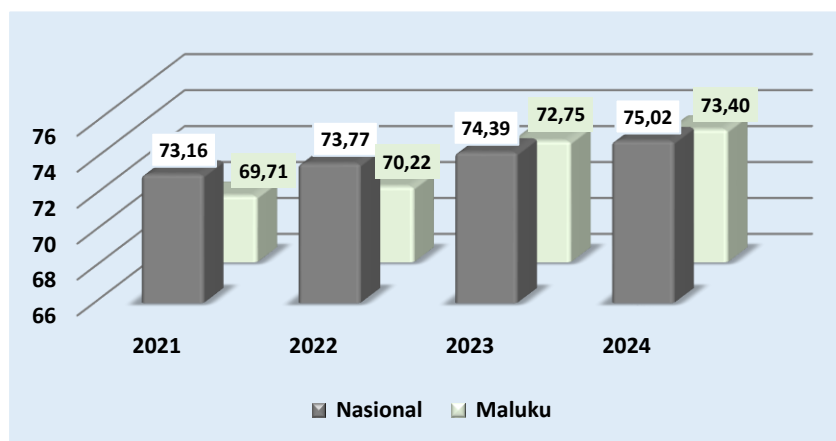
Diagram 3.3. Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Maluku



Sumber : - Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025
- Provinsi Maluku Dalam Angka, BPS 2025

3.1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku relatif lebih rendah daripada rata-rata nasional, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IPM Maluku mencapai 69,71 persen, sedangkan rata-rata nasional adalah 713,16 persen. Meskipun fluktuatif, IPM Maluku tetap berada di bawah rata-rata nasional pada tahun-tahun berikutnya. Namun, terdapat peningkatan yang konsisten dalam IPM Maluku dari tahun 2021 hingga 2024, mencapai angka 73,40 persen pada tahun terakhir. Meskipun demikian, gap atau celah antara IPM Maluku dan rata-rata nasional masih terjadi, menekankan pentingnya upaya lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Provinsi Maluku.

Diagram 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024

Sumber : - Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025
- Provinsi Maluku Dalam Angka, BPS 2025

3.1.2.5. Gini Rasio

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,291. Angka ini naik 0,009 poin jika dibandingkan dengan gini rasio Maret 2024 yang sebesar 0,282. Gini rasio pada daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,284, naik dibanding gini rasio Maret 2024 yang sebesar 0,277. Gini rasio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,236, naik dibanding gini rasio Maret 2024 yang sebesar 0,233.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia pada September 2024, distribusi pengeluaran pada kelompok 40,00 persen terbawah adalah sebesar 22,64 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dilihat menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,93 persen, dan untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 25,55 persen, yang berarti keduanya tergolong kategori ketimpangan rendah.

Diagram 3.5. Indeks Gini Rasio Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024

Sumber : - Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025
- Provinsi Maluku Dalam Angka, BPS 2025

Struktur ekonomi Provinsi Maluku didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian daerah. Potensi yang besar pada sektor-sektor unggulan menawarkan peluang untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi wilayah ke depan. Diperlukan kebijakan yang relevan dan khusus untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan serta mengatasi tantangan yang dihadapi, sehingga mampu memaksimalkan potensi ekonomi Provinsi Maluku dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.2. Kondisi dan Target Indikator Makro Provinsi Maluku

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,4	6,35
2.	PDRB Per Kapita	juta	28,53	34,58	38,72
3.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,28	0,28	-
4.	Tingkat Kemiskinan	%	15,78	13,01 – 13,51	14 – 14,5
5.	Gini Ratio	%	0,291	0,282 – 0,287	0,267 – 0,282
6.	Indeks Modal Manusia (IMM)	%	-	0,49	0,5
7.	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	68,95	42,88	67,87
8.	IKLH Daerah	%	78,71	82,43	-
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	5,55 – 6,03	5,84
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,40	-	-

Sumber : - Materi Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, April 2025
- Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026
- Provinsi Maluku Dalam Angka, 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Buru Selatan

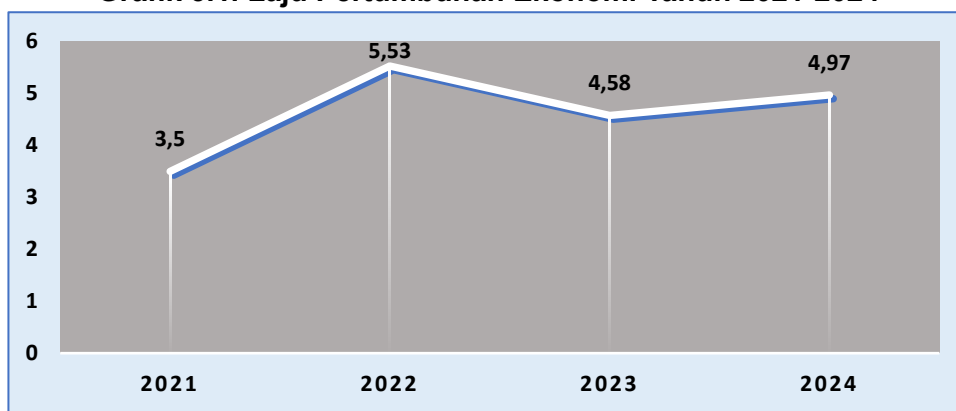
3.2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Buru Selatan Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen dan pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali Kategori Pengadaan Air dan Gas. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,11 persen; selanjutnya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,80 persen; dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,35 persen. Sedangkan, untuk pertumbuhan yang didorong oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Nonprofit* yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) meningkat sebesar 12,67 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,27 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang meningkat sebesar 2,46 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat sebesar 2,11 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Buru Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Buru Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36,00 persen;

diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 25,25 persen; konstruksi sebesar 8,83 persen; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 8,54 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Buru Selatan mencapai 78,63 persen. Sedangkan Struktur PDRB Buru Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Buru Selatan masih didominasi oleh komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Buru Selatan yaitu sebesar 87,27 persen; komponen PK-P sebesar 49,09 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 46,20 persen; komponen PK-LNPRT sebesar 3,78 persen; dan komponen PI sebesar 1,36 persen. Sementara itu, komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -87,69 persen.

Grafik 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2024



Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, BPS 2025

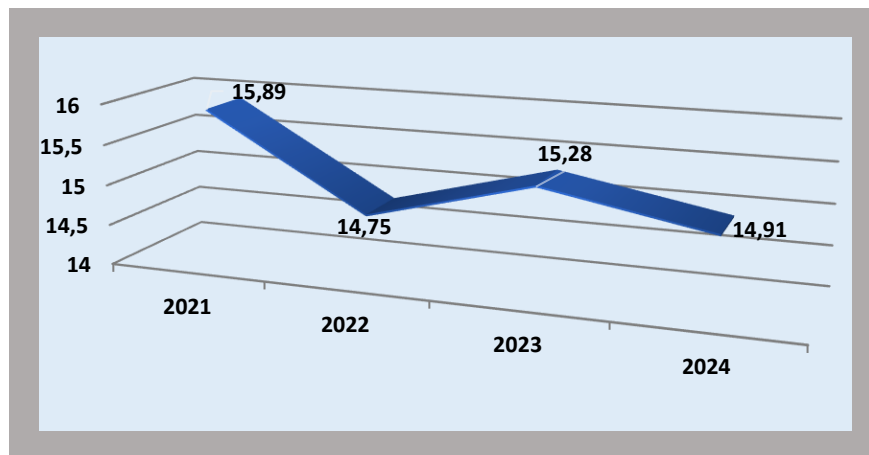
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

3.2.3.2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin yaitu dari 15,28 persen pada Maret 2023 menjadi 14,91 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 juga mengalami penurunan sebanyak 9,61 ribu orang turun 160 orang dibanding Maret 2023.

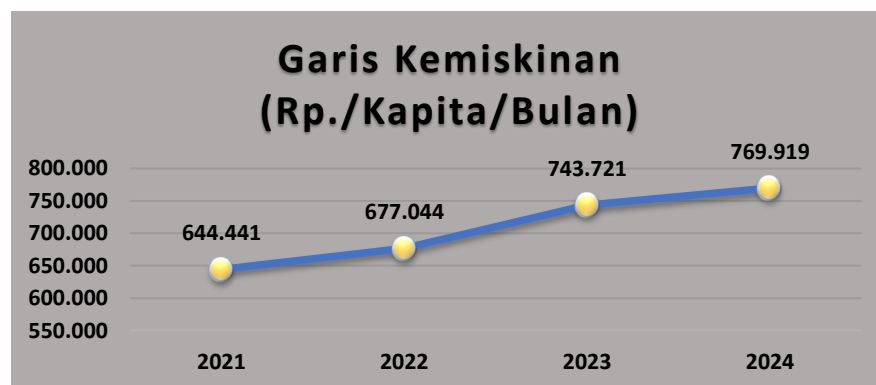
Grafik 3.2. Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024



Sumber : Profil Kemiskinan Buru Selatan Tahun 2024, BPS 2025

Garis kemiskinan Kabupaten Buru Selatan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp.769.919 per kapita per bulan. Angka tersebut naik sebesar 3,52 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan Maret 2023 yang mencapai Rp.743.721 per kapita per bulan.

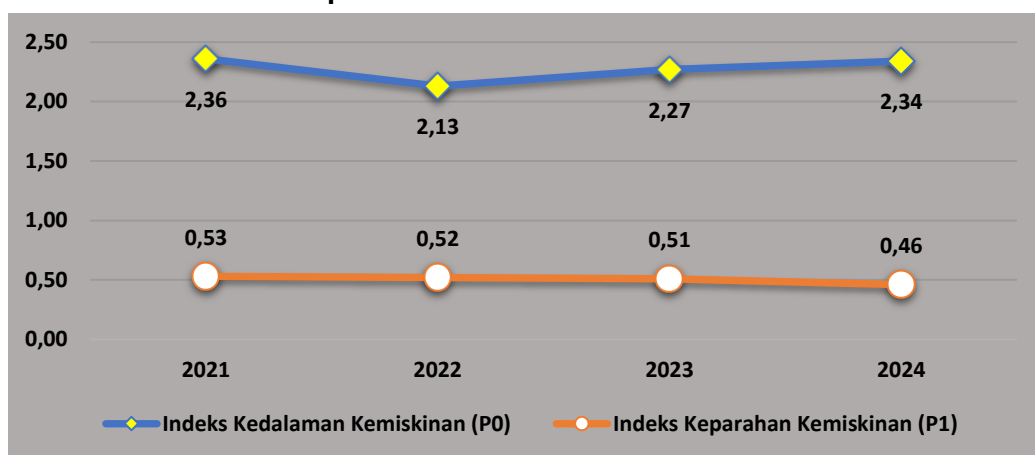
Grafik 3.3. Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024



Sumber : Profil Kemiskinan Buru Selatan Tahun 2024, BPS 2025

Meskipun Persentase Penduduk Miskin (P0) mengalami penurunan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan yaitu dari 2,27 poin pada Maret 2023 menjadi 2,34 poin pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persentase jumlah penduduk miskin berkurang namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari batas garis kemiskinan. Sejalan dengan Persentase Penduduk Miskin (P0) mengalami penurunan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 0,05 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 0,51 poin pada Maret 2023 menjadi 0,46 poin pada Maret 2024. Hal ini menunjukan bahwa tingkat persebaran rata rata pengeluaran penduduk miskin lebih baik dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024



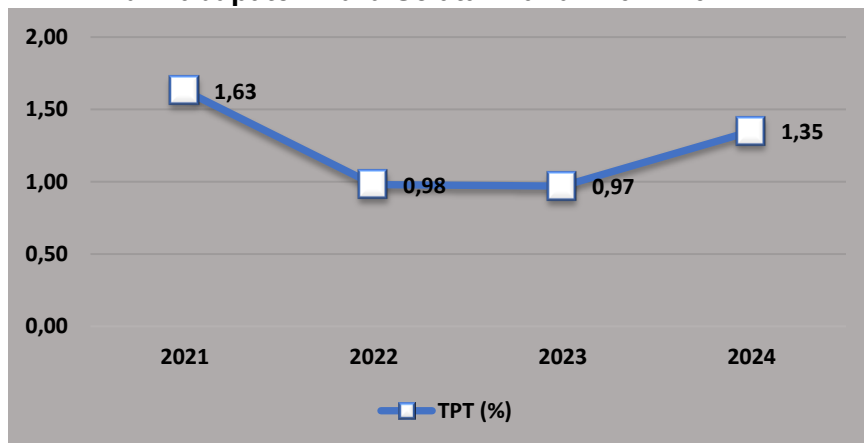
Sumber : Profil Kemiskinan Buru Selatan Tahun 2024, BPS 2025

3.2.3.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus tahun 2024 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buru Selatan sebesar 40.742 jiwa. Sementara untuk jumlah penduduk yang bekerja sebesar 40.191 jiwa atau 99 persen dari penduduk angkatan kerja.

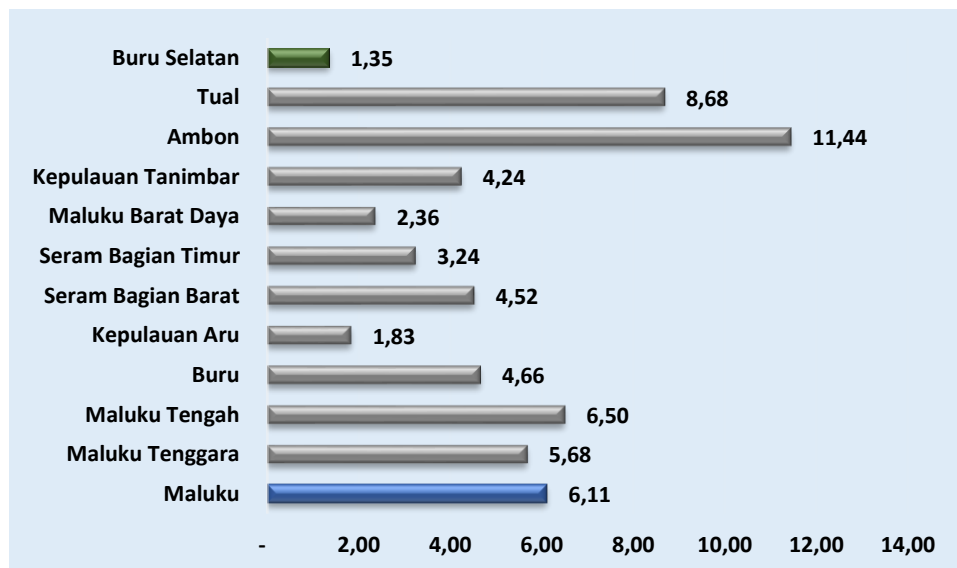
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Dari tahun 2021-2024, TPT di Kabupaten Buru Selatan mengalami tren fluktuatif yakni dari 1,63 persen pada tahun 2021 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,97 persen pada tahun 2023, tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni sebesar 1,35 persen. Namun selama periode tahun 2021 – 2024 angka TPT Kabupaten buru Selatan merupakan angka TPT terendah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Grafik 3.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024



Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, BPS 2025

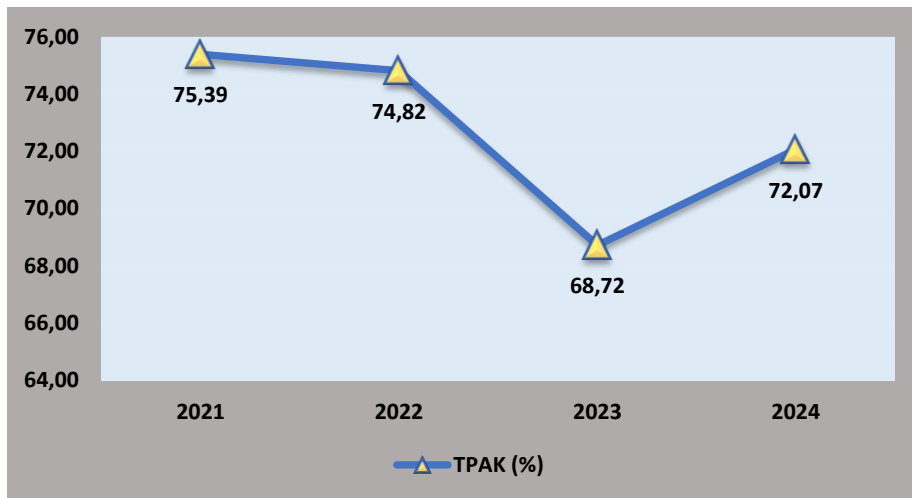
Diagram 3.6. Perbandingan TPT Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Tahun 2024



Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka, BPS 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan sebesar 3,35 point dari tahun 2023 yakni dari 68,72 persen meningkat menjadi 72,07 persen.

**Grafik 3.7. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024**



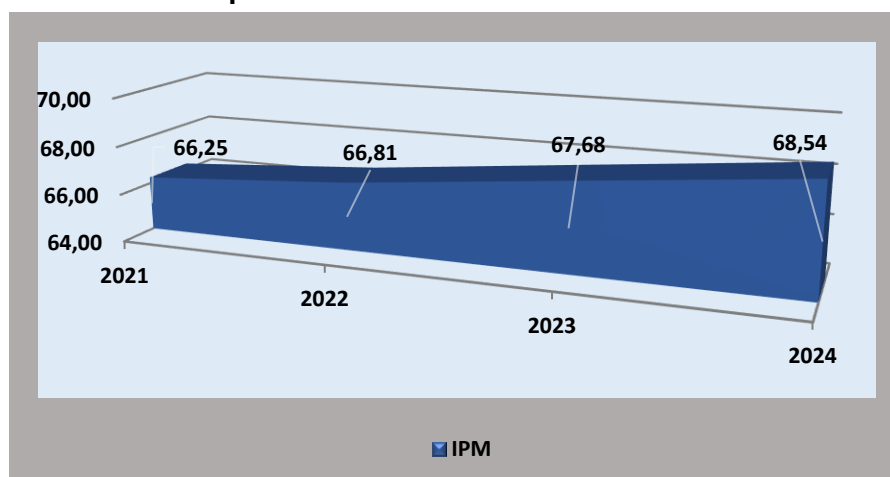
Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, BPS 2025

3.2.3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode. Semakin tinggi status IPM menunjukkan capaian pembangunan manusia yang lebih baik. Sedangkan kecepatan IPM menggambarkan perubahan capaian pembangunan manusia dibandingkan waktu sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buru Selatan tahun 2024 mencapai 68,54, meningkat 0,86 poin (1,27 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (67,68). Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,90 persen.

**Grafik 3.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024**



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kab. Buru Selatan Tahun 2024, BPS 2025

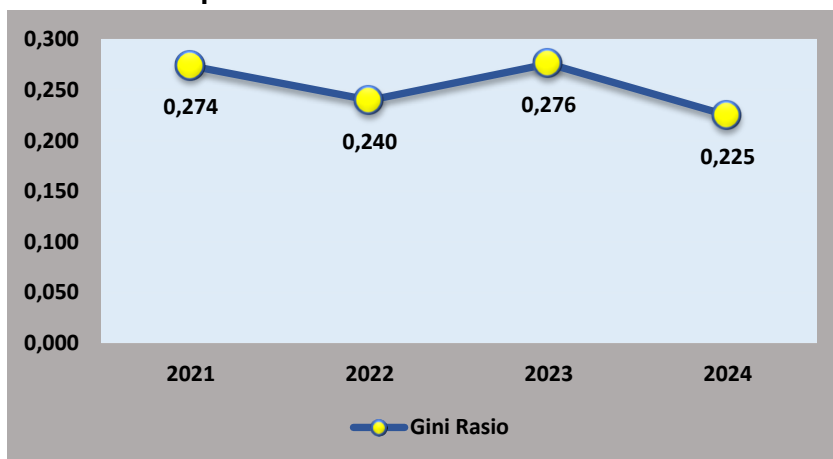
Peningkatan IPM 2024 didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk yang terdiri dari:

1. Umur Harapan Hidup/UHH (tahun) saat lahir meningkat 0,17 tahun atau 0,24 persen dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan 2021-2023 yakni sebesar 0,31 persen.
2. Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun) meningkat 0,01 tahun atau 0,08 persen dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 yakni sebesar 0,39 persen
3. Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun) meningkat 0,25 tahun atau 2,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2021-2023 sebesar 1,19 persen.
4. Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah) meningkat 366 ribu rupiah atau sebesar 4,32 persen dibandingkan tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 sebesar 2,26 persen.

3.2.3.5. Gini Rasio/ Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Buru Selatan tahun 2024 yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,225. Angka ini turun 0,051 poin jika dibandingkan dengan gini ratio tahun 2023 yang sebesar 0,276. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Buru Selatan pada tahun 2024 mulai menunjukkan tren yang positif.

**Grafik 3.9. Perkembangan Tingkat Gini Rasio
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2024**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2025

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa

tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2025. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka kondisi perekonomian Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Perkembangan Ekonomi Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 serta Proyeksi tahun 2026 di Kabupaten Buru Selatan

No.	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Proyeksi 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97	5,01	5,44
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	14,91	14,98	14,83
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,35	0,68	0,54
4.	IPM (%)	68,54	69,37	70,21
5.	Gini Rasio/Indeks Gini	0,225	0,240	0,240
6.	Laju Inflasi (%)	-	3,5	3,5

Sumber : - Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029
- BPS Provinsi Maluku dan BPS Kabupaten Buru Selatan, 2025

Menjawab sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upayameningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui target indikator makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2026 berikut disajikan data sandingan target indikator makro tahun tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

No.	Indikator	Target Tahun 2026		
		Nasional	Maluku	Buru Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,8 - 6,3	6,35	5,44
2.	Inflasi (%)	2,5	-	-
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	5,84	0,54
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	14 – 14,5	14,83
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67	-	-
6.	IMM	0,57	0,5	-
7.	Rasio Gini	0,377 - 0,380	0,267 – 0,282	0,240
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,14	67,87	-

Sumber : - Rancangan RKP Tahun 2026

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024

- Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026

- Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029

3.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (money follow program), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah serta mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal

daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pemenuhan *mandatory spending* menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan *mandatory spending*, yaitu :

- a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
- b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- d. Belanja Wajib dari pajak Daerah paling rendah 10% - 50% sesuai dengan jenis Pajak Daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK Fisik dan DBHCHT.
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 antara lain :

- a. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah lainnya ataupun retribusi daerah yang ada dan integrasi data dari wajib pajak yang sudah ada;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM pengelola;
- c. Sinergi database dengan perangkat daerah lainnya yang terkait, misalnya dalam hal persyaratan perijinan sebagai bagian dari upaya pendataan dan pengawasan kepatuhan pajak Kabupaten Buru Selatan;
- d. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran.
- e. Penyusunan regulasi baru yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- g. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;



- h. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dari pemerintah Provinsi Maluku.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Memanfaatkan Potensi Pendapatan Daerah
Pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Buru Selatan melalui sinergi database dengan perangkat daerah lainnya yang terkait dan peningkatan hubungan/kerjasama antar kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan kinerja pelaporan dan evaluasi atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer.

Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana di bawah ini.



**Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024,
Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026**

No.	URAIAN	APBD 2024				TARGET 2025*	PROYEKSI 2026*	PROYEKSI N+1
		TARGET	REALISASI	SELISIH	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENDAPATAN DAERAH	763.122.635.555,00	706.320.270.837,97	53.502.364.717,03	92,56	732.780.047.000,00	769.419.049.350,00	807.890.001.817,50
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.129.126.800,00	20.144.974.903,97	27.984.151.896,03	41,86	44.126.303.000,00	46.332.618.150,00	48.649.249.057,50
1.1.1	Pajak Daerah	12.000.096.800,00	4.641.088.521,78	7.359.008.278,22	38,68	8.000.000.000,00	8.400.000.000,00	8.820.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.131.250.000,00	5.316.360.137,00	1.814.889.863,00	74,55	7.971.303.000,00	8.369.868.150,00	8.788.361.557,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.279.380.000,00	4.188.484.018,00	90.895.982,00	97,88	4.500.000.000,00	4.725.000.000,00	4.961.250.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	24.718.400.000,00	5.999.042.227,19	18.719.357.772,81	24,27	23.655.000.000,00	24.837.750.000,00	26.079.637.500,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	711.693.508.755,00	686.175.295.934,00	25.518.212.821,00	96,41	684.453.744.000,00	718.676.431.200,00	754.610.252.760,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.693.508.755,00	671.175.402.985,00	25.518.105.770,00	96,34	669.453.744.000,00	702.926.431.200,00	738.072.752.760,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000,00	14.999.892.949,00	107.051,00	99,99	15.000.000.000,00	15.750.000.000,00	16.537.500.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.300.000.000,00	-	-	-	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00	4.630.500.000,00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.300.000.000,00	-	-	-	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00	4.630.500.000,00
	TOTAL PENDAPATAN	763.122.635.555,00	706.320.270.837,97	53.502.364.717,03	92,56	732.780.047.000,00	769.419.049.350,00	807.890.001.817,50

Sumber : Bidang Anggaran, BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2025

3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

- a. Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%);
- b. Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pemenuhan program prioritas Bupati yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
- d. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, *stunting*, makan bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Mendorong peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2026. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu standar pelayanan minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan belanja produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan *Local Taxing Power* dan *Inovative Financing*. Belanja Daerah 2026 juga memprioritaskan untuk menindaklanjuti INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d. Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.



f. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), , Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g. Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target dalam perencanaan, realisasi belanja daerah tahun 2024, target belanja daerah tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.



**Tabel 3.6. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024,
Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026**

No.	URAIAN	APBD 2024				TARGET 2025*	PROYEKSI 2026*	PROYEKSI N+1
		TARGET	REALISASI*	SELISIH	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	BELANJA DAERAH	806.353.692.070,00	735.807.196.593,00	70.546.495.477,00	91,25	758.280.047.000,00	796.194.049.350,00	836.003.751.817,50
2.1	BELANJA OPERASI	559.361.509.146,00	538.077.474.643,00	21.284.034.503,00	96,19	561.994.479.400,00	590.094.203.370,00	619.598.913.538,50
2.1.1	Belanja Pegawai	248.656.832.200,00	247.914.621.008,00	742.211.192,00	99,70	326.797.346.000,00	343.137.213.300,00	360.294.073.965,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	233.775.242.734,00	216.036.847.256,00	17.738.395.478,00	92,41	196.040.223.100,00	205.842.234.255,00	216.134.345.967,75
2.1.3	Belanja Subsidi	1.460.000.000,00	1.030.000.000,00	430.000.000,00	70,55	2.420.000.000,00	2.541.000.000,00	2.668.050.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	60.290.097.300,00	58.548.321.250,00	1.741.776.050,00	97,11	20.039.999.000,00	21.041.998.950,00	22.094.098.897,50
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.179.336.912,00	14.547.685.129,00	631.651.783,00	95,84	16.696.911.300,00	17.531.756.865,00	18.408.344.708,25
2.2	BELANJA MODAL	122.788.689.462,00	74.316.396.358,00	48.472.293.104,00	60,52	73.277.973.100,00	76.941.871.755,00	80.788.965.342,75
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.592.818.000,00	1.590.675.000,00	2.143.000,00	99,87	430.000.000,00	451.500.000,00	474.075.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.827.287.671,00	16.765.346.426,00	13.061.941.245,00	56,21	6.755.484.500,00	7.093.258.725,00	7.447.921.661,25
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.480.131.436,00	27.270.215.604,00	10.209.915.832,00	72,76	17.312.659.550,00	18.178.292.527,50	19.087.207.153,88
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.663.452.355,00	28.690.159.328,00	24.973.293.027,00	53,46	48.663.128.650,00	51.096.285.082,50	53.651.099.336,63
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	-	225.000.000,00	-	116.700.400,00	122.535.420,00	128.662.191,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.952.511.600,00	47.488.400,00	98,81	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.952.511.600,00	47.488.400,00	98,81	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	120.203.493.462,00	119.460.813.992,00	742.679.470,00	99,38	119.007.594.500,00	124.957.974.225,00	131.205.872.936,25
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	120.203.493.462,00	119.460.813.992,00	742.679.470,00	99,38	119.007.594.500,00	124.957.974.225,00	131.205.872.936,25
TOTAL BELANJA		806.353.692.070,00	735.807.196.593,00	70.546.495.477,00	91,25	758.280.047.000,00	796.194.049.350,00	836.003.751.817,50

Sumber : Bidang Anggaran, BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2025



3.2.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2026 di Kabupaten Buru Selatan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam satu tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut :



**Tabel 3.7. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024,
Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026**

No.	URAIAN	APBD 2024				TARGET 2025*	PROYEKSI 2026*	PROYEKSI N+1
		TARGET	REALISASI*	SELISIH	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.731.056.515,00	44.731.056.515,00	-	100,00	27.000.000.000,00	28.350.000.000,00	29.767.500.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.731.056.515,00	44.731.056.515,00	-	100,00	27.000.000.000,00	28.350.000.000,00	29.767.500.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.731.056.515,00	44.731.056.515,00	-	100,00	27.000.000.000,00	28.350.000.000,00	29.767.500.000,00
3.2	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	66,67	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	1.653.750.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	66,67	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	1.653.750.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	66,67	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	1.653.750.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	43.231.056.515,00	43.731.056.515,00	(500.000.000,00)		25.500.000.000,00	26.775.000.000,00	28.113.750.000,00

Sumber : Bidang Anggaran, BPKAD Kabupaten Buru Selatan, 2025



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah adalah agenda daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, pada dasarnya prioritas pembangunan daerah meliputi program-program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Berbagai sektor strategis yang akan didorong antara lain; sektor perdagangan, industri, jasa, pariwisata dan sektor lain yang menunjukkan perkembangan potensial.

Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Maluku demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. Berbagai pendekatan perencanaan sebagaimana arahan nasional dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan antara level pemerintahan (Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional) dapat saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berkaitan dengan dukungan daerah dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Prioritas daerah dan arah pembangunan daerah tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran indikator makro pembangunan agar menjamin keselarasan antara pusat, provinsi dan daerah, maka target pembangunan yang ingin dicapai dan keselarasannya terhadap target Nasional maupun Provinsi. Isu strategis merupakan salah satu komponen yang menjadi pertimbangan perumusan prioritas RKPD 2026 yang disusun berdasar: (1) isu strategis daerah 2021-2026; (2) evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2025; (3) tantangan global, nasional dan regional seperti isu SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) termasuk juga standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2026 dan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2026.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026, dan program strategis nasional.

Prioritas dan program pembangunan tahun 2026 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RPJMD periode 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 mengacu pada Peraturan RPJMD Provinsi Maluku dan RPJN Nasional.

4.1.1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Buru Selatan adalah sesuai dengan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih tahun 2025-2039 yang merupakan buah pemikiran atas dasar kondisi wilayah maupun tatanan masyarakat Buru Selatan adalah:

“Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan”

Frasa **“Arah Baru”** dalam visi ini menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Buru Selatan akan menggunakan pendekatan strategis yang menekankan pada transformasi menyeluruh dalam visi, kebijakan dan pola pembangunan wilayah dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang lebih baik dan inklusif di dukung oleh potensi Sumber Daya Alam Lokal, SDM berkualitas, ekosistem layanan dan usaha yang bermartabat.

Kata **“Maju”** dalam visi ini berarti bahwa Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Kemajuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Buru Selatan sebagai daerah yang lebih sejahtera.

HUMANIS merupakan akronim dari kata **Harmonis, Unggul, Mandiri, Agamais, Nasionalis, Inklusif** dan **Solidaritas**. Berikut ini diuraikan makna dari masing-masing kata sebagaimana disebutkan.

Kata "**Harmonis**" dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai di tengah keberagaman sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Kehidupan yang harmonis menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang stabil, kondusif, dan produktif, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkeadilan.

Harmonis mencerminkan terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam suasana yang saling menghormati, mendukung, dan bekerjasama; kehidupan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi, solidaritas, dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan; Keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab bersama; lingkungan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan sejahtera sebagai cerminan nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan yang menjadi identitas khas Buru Selatan.

Melalui semangat Harmonis, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang damai, inklusif, toleran, dan beretika, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang selaras dan seimbang dalam keberagaman. Kata "**Unggul**" dalam visi pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan mencerminkan tekad dan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas dan daya saing tinggi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Keunggulan ini tidak hanya diukur dari capaian angka atau prestasi semata, tetapi juga dari kemampuan daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat. Secara keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan akan mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan layanan sosial dasar, layanan publik, akses dan konektivitas transportasi, ketahanan budaya serta keberlanjutan lingkungan.

Kata "**Mandiri**" dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menggambarkan tekad untuk menciptakan daerah yang memiliki kemandirian di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Kemandirian ini berarti kemampuan daerah untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar.

Mandiri mencerminkan daerah yang kuat secara ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan lokal, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan; pemerintahan yang mampu merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan mengandalkan kapasitas dan sumber daya daerah

sendiri; masyarakat yang memiliki daya juang, kreatifitas, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta berdaya saing di tengah dinamika global; kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal.

Dengan semangat Mandiri, diharapkan Buru Selatan menjadi daerah yang tidak hanya mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, tetapi juga mampu membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kokoh, sehingga siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan secara berkelanjutan.

Kata “**Agamais**” dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual dan keagamaan menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral sebagai landasan etika dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata “**Nasionalis**” dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan Nasionalis berarti menanamkan kecintaan terhadap tanah air, penghargaan terhadap simbol dan identitas negara, serta komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Nasionalisme lokal menjadi kekuatan moral dan politik dalam membangun dari daerah untuk Indonesia.

Kata “**Inklusif**” dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan ruang pembangunan yang terbuka dan berpihak kepada seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, gender, suku, agama, atau latar belakang budaya. Inklusif berarti pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Inklusif mencerminkan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya; pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, layanan publik, dan hak-hak sipil secara adil bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi; pengakuan dan penghormatan atas keberagaman sosial dan budaya sebagai kekuatan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang mendengar, memahami, dan menampung aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Dengan semangat Inklusif, Kabupaten Buru Selatan diarahkan menjadi daerah yang ramah, terbuka, dan adil bagi semua warganya, di mana tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam proses kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kata “**Solidaritas**” dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan mencerminkan semangat kebersamaan, saling tolong-menolong, dan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nilai ini menjadi perekat sosial yang mencegah ketimpangan, memulihkan dari bencana, dan mempercepat kemajuan yang merata.

Kata "**Berkelanjutan**" dalam visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan bertanggung jawab agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya sosial ekonomi secara lestari.

Berkelanjutan mencerminkan pembangunan daerah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan dan tetap terjaga kelestariannya; penguatan sistem ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan global, perubahan iklim, maupun perkembangan teknologi; upaya menjaga kesinambungan antar program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya, agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi jangka panjang daerah; mewujudkan keseimbangan antara kemajuan pembangunan fisik dengan pembangunan kualitas hidup manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Dengan semangat Berkelanjutan, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup yang layak bagi generasi masa depan, dalam lingkungan yang sehat, adil, dan sejahtera.

4.1.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan merumuskan misi pembangunan sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama periode 2025–2029. Misi pembangunan ini menjadi pedoman sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mengarahkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan agar berjalan secara terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, potensi, dan karakteristik wilayah, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Penetapan misi juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, misi pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan mulai dari pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dasar, perlindungan lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika perubahan global yang semakin cepat, terutama dalam konteks digitalisasi, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim.



Berdasarkan Visi sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dirumuskan Misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2025-2029 sebagai berikut;

1. Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter.
2. Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
4. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
5. Memperkuat keharmonisan dan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya.

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029, Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029

Menuju Arah Baru Buru Selatan yang Maju, HUMANIS dan Berkelanjutan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<i>Memperkuat modal sosial dan sumber daya manusia unggul yang bermartabat serta berkarakter (MISI 1)</i>	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Buru Selatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karakter untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan bermartabat	Indeks Modal Manusia	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di Buru Selatan	Indeks Pembangunan Manusia
				Angka Literasi/Numerasi
				Indeks Pembangunan Literasi masyarakat
				Indeks Literasi Digital
				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)
				Harapan lama sekolah
				Persentase anak dari keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan
				Persentase sekolah inklusif yang menerima anak berkebutuhan khusus
			2. Terselenggaranya program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan SDM di pasar kerja lokal maupun nasional	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
				Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)
				Persentase lulusan SMK yang bekerja di bidang kompetensinya



				Jumlah peserta didik SMK yang memiliki sertifikat kompetensi nasional
				Jumlah kemitraan sekolah dengan dunia usaha/industri
				Persentase perempuan dan kelompok rentan (disabilitas, masyarakat adat) yang mengikuti pelatihan kerja
			3. Menguatnya karakter melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai moral serta etika yang mendukung terciptanya masyarakat yang bermartabat	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
				Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum
				Jumlah sekolah/madrasah yang melaksanakan program penguatan profil Pelajar Pancasila
				Persentase siswa yang mengikuti program ekstrakurikuler berbasis nilai moral, budaya lokal, dan nasionalisme
				Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan program "Desa Berkarakter"
				Persentase anak dari keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan
				Indeks Perlindungan Anak



Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi tenaga medis, serta kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, produktif, dan berkarakter di Buru Selatan	Prevalensi Stunting	1. Meningkatnya fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan di Buru Selatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Umur Harapan Hidup (UHH) (Thn)
			Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)
			Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)
			Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk
			Persentase desa yang memiliki bidan desa aktif
			Jumlah ambulans dan transportasi rujukan kesehatan yang tersedia di kecamatan
		2. Terselenggaranya program pelatihan dan pengembangan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan di daerah	Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)(%)
			Persentase tenaga medis yang mengikuti pelatihan kompetensi berbasis standar nasional
			Persentase tenaga medis yang memiliki sertifikasi kompetensi spesifik
		3. Meningkatnya kampanye kesehatan dan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penerapan pola hidup sehat untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat di Buru Selatan	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pola hidup sehat
			Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan program promotif dan preventif



	Memperkuat modal sosial dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan	Indeks Modal Sosial	1. Meningkatnya sinergi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merancang serta melaksanakan program-program pembangunan sosial dan ekonomi di Buru Selatan 2. Menguatnya jaringan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan sosial dan ekonomi melalui forum-forum kolaboratif dan pelibatan aktif di tingkat lokal	Persentase masyarakat yang mengakses layanan kesehatan promotif dan preventif
				Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
				Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi (%)
				Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam program pembangunan
				Persentase Kerja Sama Daerah dan Internasional yang Terimplementasi(%)
				Indeks Pembangunan Pemuda
<i>Mempercepat Pembangunan Ekonomi berbasis potensi lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (MISI 2)</i>	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat secara merata	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita	1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor ekonomi lokal	Indeks Pembangunan Gender
				Indeks Ketimpangan Gender
				Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
				Kontribusi PDRB Penyediaan Makan dan Minum (%)
				Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)



				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
				Koefisien Variasi Harga
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
				Tingkat Inflasi
				Inklusi Keuangan (%)
				Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
				Indeks Daya saing Daerah (IDSD)
				Jumlah sertifikasi produk lokal untuk meningkatkan daya saing
				Indeks Inovasi Daerah (IID)
			2. Terciptanya lapangan kerja dan wirausaha baru yang inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
				Persentase Tenaga Kerja sektor Kelautan dan Perikanan (%)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
				Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor dengan nilai tambah tinggi



				Persentase penurunan tingkat pengangguran
				Jumlah wirausaha baru yang berasal dari kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel, dan kelompok marginal lainnya)
				Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) atau lembaga keuangan lokal
			3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
				Rasio Kewirausahaan Daerah
				Jumlah usaha yang mengadopsi teknologi baru dalam produksi dan distribusi
				Jumlah usaha yang mengadopsi prinsip ekonomi sirkular (reduce, reuse, recycle)
				Jumlah kebijakan atau regulasi yang mendukung peran aktif masyarakat dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan



<i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, partisipatif, serta bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) (MISI 3)</i>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan partisipasi publik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsive.	Indeks Pelayanan Publik
			2. Terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik KKN	Indeks Inovasi Daerah
				Persentase instansi pemerintah yang menerapkan sistem pelayanan publik berbasis digital (e-government)
				Jumlah inovasi dalam pelayanan publik yang diterapkan setiap tahun
				Nilai SAKIP
				Indeks Merit
				Indeks Inovasi Daerah
				Indeks SPBE
				Indeks Reformasi Hukum
				Indeks Integritas Nasional
				Indeks Demokrasi Indonesia
			3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase implementasi rencana kelitbangan
				Indeks Inovasi dan Riset Maritim
				Jumlah aplikasi atau platform digital yang disediakan untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan



<i>Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur Wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan Mitigasi Bencana (MISI 4)</i>	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan 2. Rasio Gini 3. Indeks Infrastruktur 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5. Presentasi Penurunan Emisi GRK 6. Indeks Resiko Bencana	1. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah.	Indeks Infrastruktur
			2. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Presentase Desa Mandiri (%)
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah di kab/ kota (%)
				Indeks Ketahanan Lingkungan
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
				Indeks Risiko Bencana
			3. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
				Indeks Konektivitas
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berlanjutan (%)
				Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Aman
				Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)



Memperkuat Keharmonisan dan Toleransi kehidupan bermasyarakat melalui penerapan nilai keagamaan, adat dan budaya (MISI 5)	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan harmonis melalui penguatan nilai nilai keagamaan, adat, dan budaya lokal	Indeks Modal Sosial Indeks Kerukunan Beragama	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			2. Terpeliharanya keberagaman budaya dan adat istiadat lokal sebagai identitas sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan
			3. Terciptanya kehidupan sosial yang toleran dan bebas dari konflik antar kelompok masyarakat	Jumlah situs budaya dan warisan adat yang terdaftar dalam inventarisasi nasional atau daerah
				Jumlah kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung pelestarian warisan budaya dan adat istiadat lokal
				Indeks Pembangunan Hukum
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 - 2029

4.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

4.2.1. Identifikasi Isu Global dan Isu Nasional

Ketidakpastian Global antara lain:

- Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat.
- Perang Tarif China -Amerika Serikat.
- Resiko Perang Dagang dan Disrupsi Rantai Pasok Global.
- Resiko Perlambatan Perekonomian Global.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar berikut.

Gambar 4.1. Prioritas Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026



Keterangan : *) Lima Direktif Presiden

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. di atas.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan mengacu pada tema dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Tema RKP Nasional 2026 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**

4.2.2.1. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Nasional

a. Prioritas Nasional 1/ PN 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional;
- 2) Penguatan komunikasi publik dan media;
- 3) penguatan lembaga demokrasi; serta
- 4) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

b. Prioritas Nasional 2/ PN 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan postur pertahanan;
- 2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan;
- 3) Penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung;
- 4) Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri;

- 5) Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal;
- 6) Peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;
- 7) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 8) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian;
- 9) Penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi.

c. Prioritas Nasional 3/ PN 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik;
- 2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan;
- 3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi;
- 4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan;
- 5) Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

d. Prioritas Nasional 4/ PN 4

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
- 3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
- 4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;
- 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan;
- 6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM); serta

- 7) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.

e. Prioritas Nasional 5/ PN 5

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan;
- 2) Peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global

f. Prioritas Nasional 6/ PN 6

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan;
- 2) Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
- 3) Pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah.
- 4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

g. Prioritas Nasional 7/ PN 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, serta sistem politik yang fungsional;
- 2) Birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani;
- 3) Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 4) Tata kelola bumh yang baik;
- 5) Peningkatan pendapatan negara yang optimal;
- 6) Tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

h. Prioritas Nasional 8/ PN 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa;

- 2) Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Maluku Tahun 2026 sejalan dengan Prioritas Nasional serta isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2026, maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yaitu: ***“Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”***.

Adapun permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimanya aksesibilitas dan layanan kesehatan;
- 2) Masing tingginya tingkat pengangguran;
- 3) Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- 4) Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih tinggi;
- 5) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah;
- 6) Belum merata dan memadainya infrastruktur wilayah dan dasar;
- 7) Kesenjangan antar wilayah masih tinggi;
- 8) Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana.

Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarusutamaan Kesetaraan, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI);
- 2) Peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan energi dan air yang berbasis sumber daya lokal;
- 3) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
- 4) Peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 5) Pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim;
- 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas;
- 7) Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

4.3.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tema RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, menyelaraskan dengan tema nasional dan provinsi serta memperhatikan isu strategis daerah. Dengan demikian, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta turut mendukung pembangunan nasional maupun Provinsi Maluku. Dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan, maka tema RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 adalah **“Pangan Berdaulat, Masyarakat Berdaya, SDM Berkualitas”**.

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menetapkan Program Prioritas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Penetapan program prioritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya pembangunan difokuskan pada isu-isu strategis dan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Program prioritas disusun sebagai jawaban atas tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Buru Selatan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berdaya saing di era transformasi digital.

Adapun Program Prioritas Kabupaten Buru Selatan tahun 2026 sebagai berikut :

- 1) Pangan Rakyat;
- 2) Ketahanan Pangan Daerah;
- 3) Wirausaha dan UMKM;
- 4) Pendidikan dan Kesehatan Gratis;
- 5) Buru Selatan BERAHLAK (Berdaya Saing, Harmonis, Aman, Inklusif, Berkeadilan, dan Beretika)

4.3.2.1. Pangan Rakyat

Pangan rakyat memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan daerah Kabupaten Buru Selatan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Buru Selatan. Produksi pangan oleh petani kecil dan masyarakat lokal, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan daerah. Pentingnya pangan rakyat terletak pada peran krusialnya dalam menyediakan sebagian besar kebutuhan pangan domestik, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan. Namun, pangan rakyat juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terhadap sumber daya, perubahan iklim, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil.

4.3.2.2. Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan daerah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya. Ini melibatkan optimalisasi sumber daya pangan lokal dan pengelolaan pangan dari daerah lain. Ketahanan pangan daerah yang kuat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Daerah:

- a) Ketersediaan Pangan: Meliputi produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan akses terhadap pangan dari daerah lain.
- b) Akses Pangan: Meliputi akses fisik (infrastruktur distribusi, transportasi), akses ekonomi (daya beli masyarakat), dan akses sosial (kelembagaan yang mendukung akses pangan)
- c) Pemanfaatan Pangan: Meliputi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Tantangan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan :

- a) Perubahan Iklim : Dapat menyebabkan gagal panen dan penurunan produksi pangan.

- b) Pola Konsumsi yang Tidak Seimbang: Ketergantungan pada satu jenis pangan (misalnya, beras) dapat mengurangi ketahanan pangan.
- c) Kerawanan Pangan : Beberapa daerah rentan terhadap krisis pangan akibat bencana alam, konflik, atau kemiskinan.
- d) Infrastruktur yang Belum Memadai : Keterbatasan akses distribusi dan penyimpanan pangan dapat menghambat ketersediaan pangan.

Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan :

- a) Diversifikasi Pangan : Mendorong konsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi seimbang.
- b) Pengembangan Pertanian Berkelanjutan : Menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- c) Peningkatan Produksi Pangan Lokal : Mendukung petani dan kelompok tani dalam meningkatkan produksi pangan.
- d) Peningkatan Akses Pangan : Membangun infrastruktur distribusi pangan yang efisien dan terjangkau.
- e) Penguatan Cadangan Pangan: Membangun lumbung pangan dan sistem pengelolaan cadangan pangan daerah.
- f) Pendidikan Konsumsi Pangan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan konsumsi pangan lokal.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan:

- a) Penyusunan Kebijakan: Merumuskan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan daerah.
- b) Pengalokasian Anggaran: Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program-program ketahanan pangan.
- c) Fasilitasi dan Pendampingan: Memberikan fasilitas dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha pangan.
- d) Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan, akses, dan kualitas pangan.

Ketahanan pangan daerah merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, ketahanan pangan daerah dapat ditingkatkan, sehingga tercipta kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

4.3.2.3. Wirausaha dan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian daerah, terutama di tingkat kabupaten. UMKM tidak hanya menyumbang pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat. Potensi UMKM di daerah kabupaten Buru Selatan sangat besar, namun perlu didukung dengan berbagai upaya untuk pengembangan dan keberlanjutannya.

a. Peran UMKM dalam Perekonomian Daerah :

- 1) Penyedia Lapangan Kerja : UMKM adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di daerah, membantu mengurangi angka pengangguran.
- 2) Peningkatan Pendapatan : UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha dan penjualan produk/jasa.
- 3) Penggerak Ekonomi Lokal : UMKM menjadi motor penggerak roda perekonomian daerah dengan menciptakan transaksi ekonomi dan perputaran uang di wilayah tersebut.
- 4) Pengembangan Potensi Daerah : UMKM dapat menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal menjadi produk unggulan daerah.
- 5) Peningkatan Kesejahteraan : Dengan adanya UMKM, masyarakat di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pendapatan yang lebih baik dan akses terhadap berbagai kebutuhan.

b. Tantangan UMKM di Daerah:

- 1) Keterbatasan Akses Pembiayaan : UMKM seringkali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
- 2) Keterbatasan Akses Pasar : UMKM mungkin kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara luas, terutama karena kurangnya akses informasi dan jaringan pemasaran.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia : Kualitas sumber daya manusia dalam UMKM, termasuk keterampilan dan pengetahuan, mungkin masih perlu ditingkatkan.
- 4) Keterbatasan Teknologi : Penerapan teknologi dalam operasional UMKM masih terbatas, yang dapat menghambat efisiensi dan daya saing.
- 5) Persaingan Usaha : UMKM juga menghadapi persaingan dari usaha besar dan usaha sejenis lainnya.

c. Upaya Pengembangan UMKM:

- 1) Peningkatan Akses Pembiayaan : Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui program kredit khusus UMKM atau dukungan modal usaha.
- 2) Pengembangan Jaringan Pemasaran : Fasilitasi UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas melalui pameran, festival, atau platform digital.
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : Penyediaan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM.
- 4) Penerapan Teknologi : Dorong adopsi teknologi yang relevan dengan kegiatan usaha UMKM, seperti pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan produksi.
- 5) Penguatan Kelembagaan : Membentuk lembaga atau wadah yang dapat mewadahi dan mendukung pengembangan UMKM di daerah.
- 6) Pemberian Insentif dan Dukungan : Berikan insentif dan dukungan bagi UMKM yang berinovasi dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

4.3.2.4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Buru Selatan adalah dua hal penting yang sering menjadi fokus perhatian dalam pembangunan suatu negara dan daerah. Keduanya dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat. Pendidikan gratis bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara terutama bagi masyarakat Kabupaten Buru Selatan untuk mengakses pendidikan, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Beberapa manfaat pendidikan gratis antara lain:

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia:

Dengan pendidikan gratis, lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Hal ini pada gilirannya akan menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Buru Selatan yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di berbagai bidang.

b. Pengurangan kesenjangan sosial:

Pendidikan gratis dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, individu dari berbagai latar belakang masyarakat Buru Selatan memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

- c. Peningkatan partisipasi sosial masyarakat Buru Selatan:
Pendidikan gratis dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Orang yang terdidik cenderung lebih aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di masyarakat.
- d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan:
Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kesehatan gratis bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat Buru Selatan. Beberapa manfaat kesehatan gratis antara lain:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat bagi masyarakat Buru Selatan:
Dengan akses kesehatan yang lebih mudah, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, seperti pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit, dan vaksinasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Pengurangan angka kematian dan kesakitan :
Dengan adanya layanan kesehatan yang terjangkau, angka kematian dan kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah atau diobati akan menurun.
- c. Peningkatan produktivitas:
Kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Orang yang sehat akan lebih mampu bekerja dan berkontribusi pada perekonomian.
- d. Peningkatan kualitas hidup:
Kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Orang yang sehat akan merasa lebih bahagia, lebih aktif, dan lebih mampu menikmati hidup.

4.3.2.5. Buru Selatan BERAHLAK (Berdaya Saing, Harmonis, Aman, Inklusif, Berkeadilan, dan Beretika)

Kabupaten Buru Selatan, yang dikenal juga sebagai Bursel, memiliki potensi besar baik dari segi sumber daya alam maupun budaya. Namun, untuk mewujudkan "Buru Selatan BERAHLAK " (Berdaya Saing, Harmonis, Aman, Inklusif, Berkeadilan, dan Beretika), diperlukan upaya lebih lanjut dalam berbagai aspek.

- a. Potensi dan Tantangan:
 - 1) Sumber Daya Alam : Buru Selatan kaya akan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang belum terkelola maksimal.

- 2) Sumber Daya Manusia : Pemerintah daerah memiliki beragam SDM, namun perlu terus ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan.
 - 3) Adat Istiadat : Masyarakat adat memiliki nilai-nilai luhur yang perlu dijaga dan dilestarikan, namun juga perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
 - 4) Infrastruktur : Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
 - 5) Tata Kelola Pemerintahan : Reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
- b. Mewujudkan Buru Selatan BERAKHLAK:
- 1) Peningkatan Kualitas SDM : Memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta mendorong pengembangan potensi pemuda.
 - 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan : Menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaannya.
 - 3) Pelestarian Budaya : Mendukung kegiatan seni dan budaya tradisional, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan.
 - 4) Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan : Memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, termasuk akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
 - 5) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan.
 - 6) Penguatan Kerukunan : Mendorong toleransi antarumat beragama dan antarbudaya, serta membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
 - 7) Peningkatan Investasi : Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan di Buru Selatan.

Upaya mewujudkan pencapaian pembangunan daerah sesuai visi, misi pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan diperlukan arah kebijakan pembangunan pada periodisasi pemerintahan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan tahun 2026 guna mencapai tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan tersebut. Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terdapat Dasa Cita 10 Program Prioritas untuk



Pengembangan Kabupaten Buru Selatan dengan Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut :

1. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS :

- Menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang TK hingga SMP;
- Memberikan beasiswa kepada 500 mahasiswa kurang mampu dan berprestasi melalui subsidi SPP/BPP, termasuk beasiswa khusus untuk Fakultas Kedokteran;
- Memberikan insentif bulanan bagi guru dan tenaga kesehatan honorer sebagai bentuk apresiasi;
- Memperluas kolaborasi dengan universitas, baik negeri maupun swasta, untuk pengembangan SDM unggul Kabupaten Buru Selatan;
- Memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu;
- Meningkatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole, RS Pratama Fogi serta seluruh Puskesmas;
- Menjamin ketersediaan obat-obatan dengan pengawasan ketat (CCTV) di gudang obat untuk mencegah kecurangan dan pencurian.

2. PROGRAM KETAHANAN ENERGI

- Meningkatkan kuota BBM, khususnya minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga, memperbaiki distribusi BBM di Kabupaten Buru Selatan dan membangun SPBU khusus nelayan untuk mengatasi antrean serta keterbatasan BBM bagi nelayan;
- subsidi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu melalui pemasangan listrik gratis.

3. PERUMAHAN RAKYAT : 1.000 RUMAH LAYAK HUNI & 1.000 MCK LAYAK

- Membangun 1.000 rumah layak huni dan 1.000 fasilitas MCK layak bagi warga berpenghasilan rendah di 6 Kecamatan.

4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : JALAN, JEMBATAN & TRANSPORTASI LAUT

- Pembangunan bertahap jalan dan jembatan di 6 kecamatan, dengan prioritas pada Kec. Waesama, Kepala Madan, Ambalau dan Fena Fafan;
- Renovasi pelabuhan rakyat serta bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan transportasi laut yang nyaman dan aman, termasuk subsidi bagi pengelola kapal serta menyediakan rute antar desa, kecamatan dan rute Ambon-Namrole akan tersedia setiap hari.



5. INTERNET SATELIT GRATIS : 1 DESA 1 STARLINK

- Internet gratis 24 jam : setiap desa akan memiliki 1 unit starlink di balai desa yang menyediakan akses internet gratis untuk warga, terutama bagi pemuda dan pelajar.

6. PANGAN RAKYAT : BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- Beras gratis untuk masyarakat miskin, anak-anak stunting dan yatim piatu, diselaraskan dengan program penanganan stunting kabupaten.

7. WIRAUSAHA & UMKM : CIPTA 1.000 PENGUSAHA BARU

- Menciptakan 1.000 pengusaha baru, terutama anak muda melalui pelatihan, pendampingan, permodalan dan promosi.

8. KETAHANAN PANGAN DAERAH : LAHAN PERTANIAN BARU & GUDANG LOGISTIK

- Mencetak lahan pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buru Selatan dan membangun gudang logistik terpadu untuk mendukung ketahanan pangan, bekerja sama dengan TNI/Polri dan Kementerian terkait, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pertanian lokal.

9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT : 100 JUTA PER DESA/TAHUN

- Melegitimasi keberadaan lembaga adat di setiap desa/dusun, membangun rumah adat, dan mengalokasikan dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar Rp.100.000.000,- per desa/tahun;
- Kelompok adat akan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan daerah.

10. PROGRAM BURU SELATAN BERAKHLAK

- Percepatan pembangunan rumah ibadah (masjid, gereja, dll.) di setiap desa dan kecamatan dengan dana hibah proporsional;
- Memberikan insentif bulanan bagi tokoh agama, termasuk guru sekolah minggu dan guru mengaji;
- Mengembangkan budaya Aroha sebagai bagian dari wisata religi & kearifan lokal dengan anggaran khusus untuk kegiatan Aroha di desa.



Seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Buru Selatan, terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan di tahun 2026, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
Prioritas 1 : Pangan Rakyat	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan
	3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISPERIK
	4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	DISPERIK
Prioritas 2 : Ketahanan Pangan Daerah	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan



	3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISPERIK
	5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	DISTAN
	6. Program Penyuluhan Pertanian	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	DISTAN
	7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota1	DISPERINDAG
Prioritas 3 : Wirausaha dan UMKM	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	DISKOP dan UKM
	2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DISKOP dan UKM
	3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	DISKOP dan UKM
	4. Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM



	6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	7. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOP dan UKM
	10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	DISKOP dan UKM
	11. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	DISKOP dan UKM
	12. Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal
	13. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal
	14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	DISPERIK



		3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DISPERIK
	15. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	DISPERINDAG
	16. Program Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
	17. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	DISPERINDAG
	18. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DISPERINDAG
	19. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	DISPERINDAG
	20. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata
	21. Program Pemasaran Pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata
	22. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata
	23. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata



Prioritas 4 : Pendidikan dan Kesehatan Gratis	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	DISPENDIK
	2. Program Pengembangan Kurikulum	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DISPENDIK
	3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	DINKES dan RSUD dr. Salim Alkatiri
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DINKES
	5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	DINKES
	6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DINKES



	7. Program Pengendalian Penduduk	1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	DINKES
	8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DINKES
	9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DINKES
Prioritas 5 : Buru Selatan BERAKHLAK (Berdaya Saing, Harmonis, Aman, Inklusif, Berkeadilan, dan Beretika)	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR
	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR



	5. Program Pengembangan Permukiman	1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR
	6. Program Penataan Bangunan Gedung	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas PUPR
	7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	8. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR
	10. Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	DISPERUM
	11. Program Kawasan Permukiman	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DISPERUM
	12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	DISPERUM
	13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	DISPERUM



	14. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISPERUM
	15. Program Pengelolaan Tanah Kosong	1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	DISPERUM
	16. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	SATPOL - PP
	17. Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD
	18. Program Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	DINSOS
	19. Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINSOS
	20. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	DINSOS
	21. Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	DINSOS
	22. Program Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan



		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan
	23. Program Perlindungan Khusus Anak	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan
	24. Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan
	25. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Pemberdayaan
	26. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	DLH
	27. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota 2. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	DLH
	28. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	DLH
	29. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	DLH



30. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	DLH
31. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DLH
32. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DLH
33. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	DLH
34. Program Pengelolaan Persampahan	1. Pengelolaan Sampah	DLH
35. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	DLH
36. Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
37. Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
38. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota 2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	DISHUB



	39. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 3. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	DISHUB
	40. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMINFO
	41. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOMINFO
	42. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	DISKOMINFO
	43. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DISPORA
	44. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	DISPORA



45. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	DISPORA
46. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DISPERPUS
47. Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	DISPERPUS
48. Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata
49. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata
50. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penataan Organisasi 2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SETDA dan Bagian-Bagian SETDA
51. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Kerja Sama Daerah 2. Administrasi Tata Pemerintahan 3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	SETDA dan Bagian-Bagian SETDA
52. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	SETDA dan Bagian-Bagian SETDA
53. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Peningkatan Kapasitas DPRD	SETWAN



		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Fasilitasi Tugas DPRD	SETWAN
	54. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	BAPPELITBANG
	55. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	BAPPELITBANG
	56. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPELITBANG
	57. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD
	58. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
	59. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
	60. Program Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM
	61. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM
	62. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah



	63. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
	64. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kecamatan
	65. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 Kecamatan
	66. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 Kecamatan
	67. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Kecamatan
	68. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan KESBANGPOL
	69. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan KESBANGPOL
	70. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan KESBANGPOL
	71. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan KESBANGPOL



	72. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan KESBANGPOL

Sumber : Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 dari Aplikasi SIPD-RI, 2025

4.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Hasil penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026**

No.	OPD Pengampu	Jumlah		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dinas Pendidikan	1	4	7
2.	Dinas Kesehatan	1	1	4
3.	Dinas PUPR	4	4	6
4.	Dinas Pertanian	3	3	3
5.	Dinas Perumahan	1	1	1
6.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1
7.	Dinas Perikanan	1	1	1
8.	Dinas Koperasi dan UKM	1	1	1
9.	Dinas Perdagangan	1	1	1
10.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	1	1
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	1
12.	Dinas Sosial	1	1	1
13.	Dinas Pariwisata	1	1	1



14.	Dinas Pemberdayaan	1	1	1
15.	Dinas Perpustakaan	1	1	1
16.	RSUD dr. Salim Alkatiri	1	1	1
17.	BKPSDM	2	2	2
18.	Bagian Kesra (Setda)	1	1	1
Total		24	27	35

Sumber : Aplikasi SIPD - RI Kab. Buru Selatan, 2025



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Buru Selatan berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2026, serta mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka rancangan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk tahun 2026 disajikan pada tabel 5.1. berikut :

**Tabel 5.1. Rancangan Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026**

Uraian	Realisasi APBD 2024	Target APBD 2025	Proyeksi APBD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20.144.974.903,97	44.126.303.000,00	46.332.618.150,00
- Pajak Daerah	4.641.088.521,78	8.000.000.000,00	8.400.000.000,00
- Retribusi Daerah	5.316.360.137,00	7.971.303.000,00	8.369.868.150,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.188.484.018,00	4.500.000.000,00	4.725.000.000,00
- Lain-lain PAD Yang Sah	5.999.042.227,19	23.655.000.000,00	24.837.750.000,00
2. Pendapatan Transfer/Perimbangan	686.175.295.934,00	684.453.744.000,00	4.410.000.000,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	671.175.402.985,00	669.453.744.000,00	4.410.000.000,00
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.999.892.949,00	15.000.000.000,00	4.410.000.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00
- Pendapatan Hibah	-	-	-
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	706.320.635.555,00	732.780.047.000,00	769.419.049.350,00
B. BELANJA			
1. Belanja Operasi	538.077.474.643,00	561.994.479.400,00	590.094.203.370,00
- Belanja Pegawai	247.914.621.008,00	326.797.346.000,00	343.137.213.300,00
- Belanja Barang dan Jasa	216.036.847.256,00	196.040.223.100,00	205.842.234.255,00
- Belanja Subsidi	1.030.000.000,00	2.420.000.000,00	2.541.000.000,00
- Belanja Hibah	58.548.321.250,00	20.039.999.000,00	21.041.998.950,00
- Belanja Bantuan Sosial	14.547.685.129,00	16.696.911.300,00	17.531.756.865,00
2. Belanja Modal	74.316.396.358,00	73.277.973.100,00	76.941.871.755,00



- Belanja Modal Tanah	1.590.675.000,00	430.000.000,00	451.500.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.765.346.426,00	6.755.484.500,00	7.093.258.725,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.270.215.604,00	17.312.659.550,00	18.178.292.527,50
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.690.159.328,00	48.663.128.650,00	51.096.285.082,50
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	116.700.400,00	122.535.420,00
3. Belanja Tidak Terduga	3.952.511.600,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00
- Belanja Tidak Terduga	3.952.511.600,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00
4. Belanja Transfer	119.460.813.992,00	119.007.594.500,00	124.957.974.225,00
- Belanja Bagi Hasil	-	-	-
- Belanja Bantuan Keuangan	119.460.813.992,00	119.007.594.500,00	124.957.974.225,00
JUMLAH BELANJA	735.807.196.593,00	758.280.047.000,00	796.194.049.350,00
C. PEMBIAYAAN			
1. Penerimaan Pembiayaan	44.731.056.515,00	27.000.000.000,00	28.350.000.000,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.731.056.515,00	27.000.000.000,00	28.350.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00
- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	43.731.056.515,00	25.500.000.000,00	26.775.000.000,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber : Bidang Anggaran, BPKAD Kab. Buru Selatan, 2025

5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026

Indikasi rencana program tahun 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2029 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2026.

Musrenbang Tahun 2026 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka Menyusun RKPD Tahun 2026, dimana pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan yaitu pihak akademis, dunia usaha, komunitas pemerintah dan masyarakat Buru Selatan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi

serta merupakan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat diuraikan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2026 disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel lampiran 5.1 (Renja OPD Tahun 2026).

Tabel 5.2. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per masing-masing Urusan Pemerintahan pada RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

No.	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah			Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.1	Bidang Pendidikan	3	13	86	217.618.983.000	Dinas Pendidikan
1.2	Bidang Kesehatan	7	20	77	185.361.902.979	Dinas Kesehatan dan RSUD
1.3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	17	50	39.101.313.790	Dinas PUPR
1.4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	12	27	3.302.809.000	Dinas Perumahan
1.5	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	22	48	6.999.393.600	Satpol-PP dan BPBD
1.6	Bidang Sosial	5	11	30	4.350.250.000	Dinas Sosial
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.1	Bidang Tenaga Kerja	4	4	9	900.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
2.2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	5	470.400.000	Dinas Pemberdayaan
2.3	Bidang Pangan	5	13	24	3.521.466.779	Dinas Ketahanan Pangan
2.4	Bidang Pertanahan	2	2	2	221.000.000	Dinas Perumahan
2.5	Bidang Lingkungan Hidup	10	16	32	4.991.160.000	Dinas LH
2.6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	9	22	2.803.002.880	Dinas Dukcapil
2.7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	6	23	4.529.600.000	Dinas Pemberdayaan
2.8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	16	3.492.437.000	Dinas Kesehatan
2.9	Bidang Perhubungan	3	10	21	5.922.153.000	Dinas Perhubungan
2.10	Bidang Komunikasi dan Informatika	3	9	23	2.577.504.000	Dinas Kominfo
2.11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3	9	23	4.376.610.000	Dinas Koperasi dan UKM
2.12	Bidang Penanaman Modal	4	8	17	3.076.018.0000	Dinas PTSP



2.13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	16	23	3.218.786.700	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.14	Bidang Perpustakaan	2	5	10	1.389.094.000	Dinas Perpustakaan
2.15	Bidang Kearsipan	2	3	9	601.887.000	Dinas Perpustakaan
2.16	Bidang Persandian	1	1	2	100.000.000	Dinas Kominfo
3	Urusan Pemerintahan Pilihan					
3.1	Bidang Kelautan dan Perikanan	4	14	29	4.515.813.500	Dinas Perikanan
3.2	Bidang Pariwisata	5	10	27	2.684.172.000	Dinas Pariwisata
3.3	Bidang Kebudayaan	1	5	6	317.299.000	Dinas Pariwisata
3.4	Bidang Pertanian	5	9	18	7.179.123.000	Dinas Pertanian
3.5	Bidang Kehutanan	1	1	2	45.573.000	Dinas LH
3.6	Bidang Perdagangan	5	9	16	2.914.272.000	Dinas Perdagangan
3.7	Bidang Perindustrian	2	2	2	272.326.000	Dinas Perdagangan
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
4.1	Sekretariat Daerah	5	21	153	56.339.237.130	Sekretariat Daerah dan 9 Bagian
4.2	Sekretariat DPRD	2	13	51	33.458.005.800	Sekretariat DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
5.1	Perencanaan	3	14	54	8.742.154.000	Bappelitbang
5.2	Keuangan	5	19	92	23.373.372.000	BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah
5.3	Kepegawaian	2	6	11	8.240.741.000	BKPSDM
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	1	2	2	3.500.000.000	BKPSDM
5.5	Penelitian dan Pengembangan	1	3	5	366.410.000	Bappelitbang
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
6.1	Inspektorat Daerah	3	8	22	3.745.415.000	Inspektorat Daerah
7	Unsur Kewilayahan					
7.1	Kecamatan	44	75	113	14.311.825.450	6 Kecamatan
8	Unsur Pemerintahan Umum					
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	21	5.406.565.400	Badan Kesbangpol
Total						

Sumber : Aplikasi SIPD-RI Kabupaten Buru Selatan, 2025



5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

**Tabel 5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026**

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Tahun 2026 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	7.038.113.105	3.456.553.500	14.340.764.900
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.038.113.105	3.456.553.500	14.340.764.900
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.086.384.355	2.527.089.100	6.576.086.800
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.795.887.235	1.616.088.000	4.042.588.000
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	89.300.000	300.000.000
1.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	234.070.000	-	234.800.000
1.4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	259.692.000	-	259.692.000
1.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	170.446.120	-	471.722.800
1.6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	265.126.000	163.066.100	265.860.000
1.7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	230.874.000	215.085.000	230.874.000
1.8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	130.289.000	-	327.000.000
1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	354.250.000	354.250.000
1.10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	89.300.000	89.300.000
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.630.167.200	681.223.000	4.180.681.200
2.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	151.560.000	56.925.000
2.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	162.767.000	-	162.767.000
2.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	210.630.000	-	238.600.000
2.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	239.030.000	165.938.000	239.050.000
2.5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	172.318.000	-	172.532.000
2.6	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	209.506.000	215.085.000	209.940.000
2.7	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	-	148.640.000	148.640.000
2.8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.635.916.200	-	2.730.827.200
2.9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	221.400.000
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	321.561.550	248.241.400	828.044.900
3.1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	149.931.650	-	174.967.500
3.2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	60.029.900	-	75.000.000
3.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	213.241.400	213.241.400
3.4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	111.600.000	-	111.836.000
3.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	-	35.000.000	35.000.000
3.6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	218.000.000
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	2.755.952.000



4.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	-	-	2.755.952.000
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	836.993.000	2.967.829.800	3.933.565.000
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	836.993.000	2.967.829.800	3.933.565.000
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	836.993.000	2.967.829.800	3.933.565.000
1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	708.493.000	644.173.000	1.432.170.000
1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.500.000	471.532.000	488.296.000
1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	42.500.000	6.857.000	47.621.000
1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	29.000.000	315.482.000	342.746.000
1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	771.350.000	771.350.000
1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000	211.000.000	224.000.000
1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	472.350.000	472.350.000
1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.250.000	39.593.800	87.041.000
1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14.250.000	35.492.000	67.991.000
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	817.006.000	7.117.771.100	7.862.959.406
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	371.272.000	7.117.771.100	7.141.328406
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	371.272.000	7.117.771.100	7.141.328406
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	371.272.000	463.100.000	868.243.306
1.2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	1.744.440.000	1.639.010.000
1.3	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	655.411.000	379.255.000
1.4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	4.254.820.100	4.254.820.100
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	445.734.000	-	721.631.000
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	445.734.000	-	721.631.000
1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	445.734.000	-	721.631.000
IV.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	74.579.000	140.630.000	259.863.800
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	74.579.000	140.630.000	259.863.800
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	74.579.000	140.630.000	259.863.800
1.1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	74.579.000	-	84.606.000
1.2	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	140.630.000	140.630.000
1.3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	-	-	34.627.800



V.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	573.599.200	542.959.600	1.046.170.000
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	405.000.000	369.600.000	774.600.000
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	405.000.000	369.600.000	774.600.000
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	405.000.000	369.600.000	774.600.000
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.400.200	15.423.000	30.939.000
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.400.200	15.423.000	30.939.000
1.1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	14.400.200	15.423.000	30.939.000
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	154.199.000	157.936.600	240.631.000
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	48.881.000	79.105.000	86.731.000
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	48.881.000	79.105.000	86.731.000
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.663.000	-	55.665.000
2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi	55.663.000	-	55.665.000
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	49.655.000	78.831.600	98.235.000
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	49.655.000	78.831.600	98.235.000
VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	132.993.000	95.216.000	207.134.700
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	122.993.000	55.216.000	157.134.700
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	122.993.000		157.134.700
1.1	Pemberian Layanan Rujukan	122.993.000	55.216.000	157.134.700
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10.000.000	40.000.000	50.000.000
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	10.000.000	40.000.000	50.000.000
1.1	Penyediaan Permakanan	10.000.000	40.000.000	50.000.000
TOTAL		9.473.283.305	14.320.960.000	27.650.457.806

Sumber : Aplikasi SIPD-RI Kabupaten Buru Selatan, 2025



5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD I tahun 2026 yang merupakan rencana alternatif pendanaan pembangunan tahun 2026 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4. Rencana Program/ Kegiatan yang Bersumber dari APBN/APBD I Tahun 2026

No.	OPD	Program	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Koperasi Dan UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	APBN
		Program Pasar Tradisional	APBN
		Program Dana Dekonsentrasi	APBN
		Program Padat Karya	APBN
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD I
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBN
2.	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	APBN
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Keluarga	APBN
3.	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	APBN
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	APBN
4.	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	APBD I/APBN
		Program Pengembangan Pariwisata	APBD I/APBN
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	APBD I/APBN
5.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	APBN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	APBN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	APBN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	APBN
6.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	APBN
7.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	APBN
8.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	APBN
9.	Dinas Perikanan	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	APBN
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	APBD I
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagiusaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	APBN
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	APBD I
10.	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	APBD I



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan juga pencapaian keberhasilan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja tahunan juga menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2026 dapat tercapai

6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 - 2029 , maka telah di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Buru Selatan yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2026	Target Akhir RPJMD (Th. 2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	4
A	KESEHATAN			
1.	Umur Harapan Hidup (tahun)	70,28	73,21	76,30
2.	Kesehatan Ibu dan Anak :			
2.1	Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	4,80	150,33	22,67
2.2	Angka kematian bayi (per 10.000 kelahiran hidup)	27,00	8,11	3,22
2.3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) (persen)	3,58	27,38	19,26
3.	Penangan Tuberculosis :			
3.1	Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (<i>Treatment Succes Rate</i> ,)** (pesren)	31,00	75,53	107,27
4.	Hasil Pembelajaran :			
4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)	NA	8,64	50,80
4.2	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	8,48	8,64	9,06



4.3	Harapan lama sekolah (tahun)	12,85	12,96	13,08
5.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (persen)	NA	5,33	5,55
6.	Tingkat kemiskinan (persen)	14,91	14,88	14,29
7.	Cakupan kepersetaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%) :			
7.1	Cakupan jaminan kesehatan (persen)	NA	63,27	72,72
7.2	Indeks ketahanan sosial (IKS) (angka)	NA	0,756	0,811
8.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	2,35	3,85	3,89
9.	Pengembangan Pariwisata :			
9.1	Kontribusi PDRB penyediaan makan dan minum (persen)	7,80	0,55	0,59
9.2	Kontribusi PDRB pariwisata bahari (persen)	NA	0,011	0,017
10.	Proporsi PDRB ekonomi kreatif :			
10.1	Pertumbuhan ekonomi	4,97	5,44	6,73
10.2	Indeks ekonomi inklusif	NA	4,88	4,98
11.	Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD			
11.1	Rasio kewirausahaan (unit usaha) (rasio)	NA	318	351
12.	Tingkat pengangguran terbuka (persen)	1,35	0,54	0,14
13.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	98,06	57,60	59,50
14.	Tingkat penguasaan IPTEK			
14.1	Indeks Inovasi Daerah (angka)	NA	23,43	33,55
15.	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan :			
15.1	Indeks ketahanan ekonomi (IKE) (angka)	NA	0,400	0,420
15.2	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (persen)	NA	25,30	25,86
15.3	Presentase desa mandiri (persen)	NA	2,47	6,17
16.	Indeks pelayanan publik (angka)	NA	2,34	2,49
17.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya :			
17.1	Angka kriminal (persen)	NA	0,01	0,01
17.2	Rasio Kriminal (rasio)	NA	1,47	1,06
18.	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (persen)	NA	0,250	0,251
19.	Pendalaman/inter mediasi sektor keuangan :			
19.1	Total dana pihak ketiga/ PDRB (persen)	NA	7,67	7,79
20.	Pembangunan kualitas keluarga			
20.1	Indeks pembangunan keluarga (angka)	NA	62,33	70,83
21.	Indeks ketimpangan gender (angka)	NA	0,57	0,55
22.	Indeks pembangunan gender (angka)	NA	87,89	88,58
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (angka)	NA	66,38	70,56
24.	Kualitas lingkungan hidup :			
24.1	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen)	65,00	80,72	83,34



24.2	Sampah yang tertangani (persen)	75,00	33,74	36,59
24.3	Akses sanitasi layak (persen)	NA	66,89	70,04
24.4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (angka)	NA	0,818	0,921
25.	Ketahanan energi, air dan pangan			
25.1	Rasio ketersediaan daya listrik (persen)	1,09	1,20	1,29
25.2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (apersen)	NA	37,68	35,89
25.3	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	41,70	62,65	67,99
25.4	Akses Air Minum Layak (persen)	66,25	91,36	95,09
26.	Indeks resiko bencana (angka)	NA	-	155,20
27.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (angka)	68,54	70,21	72,74
28.	Rasio Gini (rasio)	0,225	0,24	0,23
29.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	1.886,86	25.896,0	29.563,2

Sumber : - Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2025, BPS
- Rancangan Awal RPJMD Kab. Buru Selatan Tahun 2025-2029s
- Hasil Analisis



BAB VII PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan berbagai tahapan perencanaan dalam melengkapi dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 yang dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut dengan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten, kemudian tingkat Provinsi dan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 sendiri merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Disamping itu, dokumen RKPD juga berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelayanan publik maupun investasi pemerintah, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah kabupaten serta prioritas pembangunan daerah termasuk didalamnya rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, Kecamatan, serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 ini dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.



4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing Kepala OPD.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2026 setiap Kepala (OPD) wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2026.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala OPD, yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Sejalan dengan hal diatas, bahwasanya Pemerintah Daerah juga memperhatikan aspek pembiayaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026 yang mencakup semua pembiayaan yang notabenenya bersumber dari dana pemerintah maupun dari sektor swasta dan/ atau masyarakat dalam bentuk skema kemitraan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi dan ekstensifikasi) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan satu iklim yang kondusif bagi upaya pengelolaan sumber keuangan daerah secara kontinyu dan berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan tetapi juga ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, disiplin dan kejujuran dari para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Namrole, Mei 2025

TTD

BUPATI BURU SELATAN

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						217.618.983.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						217.618.983.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						217.618.983.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	152.837.424.025,00						-	0,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	141.802.854.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Orang/bulan	141.777.854.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.302.282.950,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	275.998.800,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	526.284.150,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.326.407.075,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	295.938.300,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	106.302.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	164.876.775,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	259.290.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.316.880.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.221.880.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	584.000.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	63.871.558.975,00						-	0,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	31.923.659.500,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				9 Unit	2.697.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	900.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	2.100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	866.124.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1.300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				7 Unit	900.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenalut Kab. Buru Selatan, Waesama, Waemasing Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				107 Orang	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	272.676.600,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				12 Satuan Pendidikan	281.733.900,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				107 Satuan Pendidikan	14.375.675.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				107 Orang	330.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				4 Ruang	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Kampung Baru Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Sekat Kab. Buru Selatan, Leksula, Nalbessy	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				5 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Waeteba Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Pasir Putih Kab. Buru Selatan, Leksula, Waemulang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				107 Orang	450.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				50 Konten Digital	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				107 Orang	1.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				107 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Ambalau, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				7 Paket	350.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	17.851.130.475,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Wamkana Kab. Buru Selatan, Ambalau, Kampung Baru Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Pasir Putih	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Masnana Kab. Buru Selatan, Waesama, Waesili Kab. Buru Selatan, Ambalau, Kampung Baru Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Pasir Putih Kab. Buru Selatan, Leksula, Nalbessy	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenalut Kab. Buru Selatan, Ambalau, Lumoy Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Waekeka Kab. Buru Selatan, Leksula, Mepa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	1.400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenalut Kab. Buru Selatan, Waesama, Waemasing Kab. Buru Selatan, Ambalau, Kampung Baru Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Pasir Putih Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenalut Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono Kab. Buru Selatan, Waesama, Simi Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Waekeka Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Pasir Putih Kab. Buru Selatan, Leksula, Liang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				40 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				15 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				47 Satuan Pendidikan	7.449.444.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				47 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				47 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				47 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				47 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				6 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	1.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenalut Kab. Buru Selatan, Waesama, Waemasing Kab. Buru Selatan, Ambalau, Kampung Baru Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Fogi Kab. Buru Selatan, Leksula, Waemulang Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waelo	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULER-SMP	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				94 Orang	331.686.475,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				8 Paket	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULER-SMP	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	9.816.787.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				20 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				45 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				148 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				148 Satuan Pendidikan	5.716.787.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				148 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	750.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				12 Paket	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	4.279.982.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	2.755.952.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				8 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				8 Satuan Pendidikan	674.030.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenalut Kab. Buru Selatan, Namrole, Fatmite	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	910.000.000,00						-	0,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	910.000.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				17 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				107 Orang	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar														
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				107 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				17 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						127.175.042.138,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						123.742.605.138,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						123.742.605.138,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	85.625.512.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	162.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	76.559.312.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1093 Orang/bulan	76.549.312.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	585.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			-				-	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.269.200.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4.057.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	36.136.100.138,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11.221.670.938,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				13 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				45 Unit	790.080.800,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				13 Unit	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				45 Unit	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				14 Unit	897.100.200,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				14 Unit	158.977.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	4.175.512.938,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.793.313.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1113 Orang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1113 Orang	469.796.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1245 Orang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8191 Orang	313.746.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17420 Orang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55500 Orang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4857 Orang	492.503.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3728 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1181 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				414 Orang	472.350.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				464 Orang	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				988 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	239.975.200,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	372.541.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	16.632.402.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	121.116.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	121.116.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	470.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	470.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				66 Orang	470.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	688.264.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	69.468.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>				1 Dokumen	69.468.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	304.346.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>				1 Dokumen	304.346.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	314.450.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				2 Unit	314.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	822.729.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	669.702.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	669.702.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	153.027.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	153.027.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.432.437.000,00							0,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.432.437.000,00							0,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	209.800.000,00						-	0,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	209.800.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	49.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	2.246.037.000,00						-	0,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	661.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	541.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	255.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	199.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	56.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	236.037.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	17.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				5777 Orang	161.587.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	30.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	27.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	1.093.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				6 Unit	445.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				6 Kampung	648.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	976.600.000,00						-	0,00	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	976.600.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	243.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	733.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD DR. SALIM ALKATIRI						16.423.384.500,00							24.327.550.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.423.384.500,00							24.327.550.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						16.423.384.500,00							24.327.550.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	7.000.000.000,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	7.000.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.000.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	16.423.384.500,00						-	17.327.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.596.384.500,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	8.927.550.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		110.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	505.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		550.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	749.854.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		811.300.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				13 Unit	505.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		530.250.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				50 Unit	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		315.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	4.436.530.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		5.111.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.827.000.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	8.400.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	2.327.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.400.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	6.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		6.000.000.000,00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH						21.046.149.000,00							23.150.763.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.046.149.000,00							23.150.763.900,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						21.046.149.000,00							23.150.763.900,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.795.644.000,00						-	6.375.208.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.993.444.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	3.292.788.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	2.993.444.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		3.292.788.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	795.000.000,00			-	-	-	-	874.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			-				-	125.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	145.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		159.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	375.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		412.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.064.200.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.170.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	49.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		54.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		44.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	960.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		1.056.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	273.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	300.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		92.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				2 Unit	189.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		207.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	1.750.000.000,00						-	1.925.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.750.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.925.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				0.2 KM	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan</i>				0,5 KM	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi</i>				0.6 KM	550.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>				0,1 KM	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi</i>				0,05 KM	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	1.650.000.000,00						-	1.815.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.650.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				6 Liter/Detik	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				125 SR	250.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	450.000.000,00						-	495.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	300.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			-				-	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	1.450.000.000,00						-	1.595.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.450.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.595.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				100 M	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				500 Meter	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>				1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				3 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
6.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.07.2.01.0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				100 SR	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	3.649.500.000,00						-	4.014.450.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	3.649.500.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	4.014.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	3.349.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		3.684.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				2 Kawasan	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	5.201.005.000,00						-	5.721.105.500,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	5.201.005.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	5.721.105.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				384,288 KM	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				20,468 KM	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				2 KM	4.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				0.5 KM	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				6 Meter	451.005.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		496.105.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	700.000.000,00						-	770.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				2 Sistem Informasi	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang														
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN						4.223.373.000,00							4.056.900.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.002.373.000,00							3.756.900.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4.002.373.000,00							3.756.900.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.537.059.000,00						-	2.656.900.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	20.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.822.109.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.912.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	1.809.509.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	168.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	196.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		7.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		7.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	153.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	23.500.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	23.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	376.450.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	378.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	16.150.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		17.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	340.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		340.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	94.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	99.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		84.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	195.000.000,00						-	375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	55.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	140.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				4 Unit Rumah	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	900.000.000,00						-	225.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	900.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	225.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	200.000.000,00						-	300.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>				6 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	170.314.000,00						-	200.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	170.314.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				1 paket Dokumen	170.314.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						221.000.000,00							300.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						221.000.000,00							300.000.000,00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-			-	71.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-			-	71.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	71.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						2.216.005.000,00							2.854.450.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.216.005.000,00							2.854.450.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.216.005.000,00							2.854.450.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.762.405.000,00						-	2.204.450.000,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	833.905.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	905.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	828.905.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	73.500.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	310.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		55.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			0				12 0	58.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	740.200.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	754.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		24.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	727.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		727.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.800.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	84.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	64.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		84.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	453.600.000,00						-	650.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	389.600.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				12 Orang	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	369.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	64.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	64.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						2.846.523.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.846.523.000,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.846.523.000,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.711.404.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.774.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.882.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.596.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.296.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.668.043.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.668.043.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.600.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	15.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.286.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.140.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.119.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	-	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.328.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	89.899.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	679.650.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	10.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	660.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	117.051.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	110.195.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6.856.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	135.119.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	46.482.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				300 Orang	46.482.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	48.540.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	48.540.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	40.097.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	40.097.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						4.168.925.000,00							4.765.395.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.168.925.000,00							4.765.395.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.168.925.000,00							4.765.395.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.162.200.000,00						-	3.507.490.000,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.007.000.000,00			-	-	-	-	2.212.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		12.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	254.000.000,00			-	-	-	-	323.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		19.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	99.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	727.200.000,00			-	-	-	-	780.040.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				82 Laporan	676.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		724.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	-	-	-	92.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.400.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	240.000.000,00						-	275.000.000,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-			-	170.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	187.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan														
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	170.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		187.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	88.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	70.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		88.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	275.000.000,00						-	412.500.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	275.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	412.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			0				10 0	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	321.725.000,00						-	383.405.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	321.725.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	383.405.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1200 Orang	121.725.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		163.405.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				1 Usulan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	170.000.000,00						-	187.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	132.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK						3.298.580.000,00							4.865.998.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.293.580.000,00							4.853.998.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						355.400.000,00							540.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	290.400.000,00						-	290.400.000,00	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	290.400.000,00			-	-	-	-	290.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	290.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		290.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	65.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				50 orang	40.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				6 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2.938.180.000,00							4.313.598.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.450.298.000,00						-	2.863.598.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.260.098.000,00			-	-	-	-	2.260.098.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	2.260.098.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.260.098.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	99.000.000,00			-	-	-	-	442.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.200.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.000.000,00			-	-	-	-	91.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		91.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	387.882.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	387.882.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				81 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				243 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				81 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	177.882.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				81 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	100.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X	NON URUSAN						5.000.000,00							12.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.000.000,00							12.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.000.000,00						-	12.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN						2.825.801.700,00							3.108.381.870,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.825.801.700,00							3.108.381.870,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2.825.801.700,00							3.108.381.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.257.244.500,00						-	2.482.968.950,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.200.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	6.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.976.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		5.473.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8 Dokumen	1.224.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		1.346.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.684.945.500,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	1.853.440.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.672.463.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		1.839.709.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	7.098.500,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		7.808.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	5.384.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		5.922.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	223.886.000,00			-	3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	246.274.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	47.349.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		52.083.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	14.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		15.770.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		7.920.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	155.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		170.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	276.213.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	303.834.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	3.813.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		4.194.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		19.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	254.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		279.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.000.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	72.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		72.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-			-	149.000.000,00						-	163.900.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	149.000.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	163.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>				4 Unit	149.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Mangeswaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		163.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	289.528.700,00						-	318.481.570,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	58.745.300,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	64.619.830,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	9.455.800,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		10.401.380,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				0 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				5 Dokumen	19.289.500,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		21.218.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				10 Ton	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	80.783.400,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	88.861.740,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				2 Laporan	80.783.400,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		88.861.740,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	115.000.000,00						-	126.500.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	65.000.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	71.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				7 Laporan	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		71.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	15.028.500,00						-	16.531.350,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.028.500,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	16.531.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				2 Dokumen	15.028.500,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		16.531.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						5.036.733.000,00							5.204.160.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.991.160.000,00							5.157.160.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.991.160.000,00							5.157.160.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.701.160.000,00						-	4.840.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.353.160.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.353.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.353.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		1.353.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	385.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				100 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	512.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	562.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	415.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.756.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.762.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.696.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		1.696.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	70.000.000,00						-	77.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				23 Badan Usaha	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				2 Pengaduan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	60.000.000,00						-	64.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	60.000.000,00			-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	64.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						45.573.000,00							47.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						45.573.000,00							47.000.000,00	
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	45.573.000,00						-	47.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-			-	45.573.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	47.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan				1 Ha	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				1 Ha	35.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.501.584.740,00							2.944.185.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.160.784.740,00							2.603.385.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.160.784.740,00							2.603.385.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.876.396.740,00						-	2.111.385.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.800.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	6.500.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.500.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.520.135.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.529.885.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.509.385.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.509.385.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.750.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		20.500.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	201.191.740,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	340.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.819.740,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.858.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		65.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.256.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		23.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.008.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	114.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		215.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.070.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	67.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		67.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28.200.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	47.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	2.100.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		7.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	26.100.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		40.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	121.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		66.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	255.150.000,00						-	425.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	255.150.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	425.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				6 Dokumen	101.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		175.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				6 Dokumen	23.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk														
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				6 Dokumen	130.650.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		195.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	23.200.000,00						-	55.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	23.200.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	55.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4 Dokumen	23.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	6.038.000,00						-	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	6.038.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	12.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	6.038.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	NON URUSAN						340.800.000,00							340.800.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						340.800.000,00							340.800.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	340.800.000,00						-	340.800.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	340.800.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	340.800.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	340.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		340.800.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							4.373.314.000,00						6.257.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.373.314.000,00							6.257.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.373.314.000,00							6.257.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.442.365.000,00						-	2.473.000.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.200.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	19.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	9.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.625.353.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.636.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.620.353.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		1.630.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	254.606.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	268.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.806.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	200.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	460.206.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	465.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.006.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		31.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	427.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	460.328.000,00						-	1.576.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	350.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				60 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	110.328.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	116.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	60.328.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		61.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	1.470.621.000,00						-	2.208.000.000,00	
	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	47.810.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	47.810.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	-	-			-	150.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.08.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	1.272.811.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun</i>				6 Unit	1.272.811.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.399.599.000,00							2.743.004.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.399.599.000,00							2.743.004.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.312.504.000,00							2.641.004.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.129.788.000,00						-	2.342.004.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	21.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.235.304.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.236.304.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.229.304.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.229.304.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	321.884.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	347.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.420.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		27.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.544.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.920.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	240.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		262.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.600.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	430.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	62.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		63.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	328.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		355.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	84.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		84.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	92.300.000,00						-	154.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	92.300.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	154.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>				1 Laporan	12.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>				2 Komunitas	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				1 Permohonan	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	90.416.000,00						-	145.000.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	90.416.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	145.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				2 Perangkat Daerah	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	20.416.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						87.095.000,00							102.000.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	87.095.000,00						-	102.000.000,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	87.095.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				3 Perangkat Daerah	37.095.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							6.176.610.000,00							6.647.610.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.776.610.000,00							6.227.610.000,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						900.000.000,00							990.000.000,00		
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	350.000.000,00						-	380.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				30 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														
			<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	250.000.000,00						-	280.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				10 Perkara	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4.876.610.000,00							5.237.610.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.716.610.000,00						-	2.837.610.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	36.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.210.000,00			-	-	-	-	1.001.210.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	993.210.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		993.210.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	538.000.000,00			-	-	-	-	594.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		420.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	508.400.000,00			-	-	-	-	518.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	458.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		458.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	-	-	-	84.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				40 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				40 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				40 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	800.000.000,00						-	880.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			-	-	-	-	880.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				81 Unit Usaha	500.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				40 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				100 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	760.000.000,00						-	850.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	760.000.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				50 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						400.000.000,00							420.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						400.000.000,00							420.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	400.000.000,00						-	420.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	420.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		310.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														
			<i>Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi</i>				2 Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						2.349.358.100,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.345.178.100,00							0,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						2.345.178.100,00							0,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.149.336.800,00						-	0,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.248.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.441.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.807.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.510.788.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.500.858.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	9.930.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	155.700.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	21.150.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	49.290.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.104.500,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	77.656.300,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	401.600.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	29.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				45 Laporan	372.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	121.467.000,00						-	0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	121.467.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	121.467.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	74.374.300,00						-	0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	74.374.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	52.080.100,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	13.504.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	8.790.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	NON URUSAN						4.180.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.180.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.180.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.180.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	4.180.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA							2.954.418.700,00						3.377.926.035,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.954.418.700,00							3.377.926.035,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA						2.954.418.700,00							3.377.926.035,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.830.639.700,00						-	2.169.670.035,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.159.500,00			-	-	-	-	11.717.475,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	11.159.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.717.475,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.178.151.000,00			-	-	-	-	1.237.058.550,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14/12 Orang/bulan	1.165.346.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.223.613.300,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	12.805.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.445.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	107.528.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.528.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	191.553.200,00			-	-	-	-	274.111.860,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	16.470.200,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.659.110,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	61.900.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.718.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	12.792.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.584.750,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.150.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	100.391.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		162.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	18.688.000,00			-	-	-	-	66.013.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.484.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18.688.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.738.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.790.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	365.088.000,00			-	-	-	-	385.040.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.888.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.930.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	10.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.710.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				43 Laporan	348.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		365.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.000.000,00			-	-	-	-	88.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	439.038.000,00						-	498.750.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	49.038.000,00			-	-	-	-	73.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			<i>Jumlah yang menerima penghargaan pemuda</i>				150 Orang	49.038.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	390.000.000,00			-	-	-	-	425.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya</i>				13 Organisasi	390.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		425.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	654.741.000,00						-	552.006.000,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.686.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			<i>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota</i>				40 Orang	57.686.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	97.055.000,00			-	-	-	-	132.006.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				80 Orang	97.055.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		132.006.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait															
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				3 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	30.000.000,00						-	157.500.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	157.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah															
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		157.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							1.792.981.000,00							1.792.981.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.792.981.000,00							1.792.981.000,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						1.244.194.000,00							1.244.194.000,00		
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.039.475.000,00						-	1.039.475.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	964.800.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	964.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	950.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		950.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	44.675.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	44.675.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.620.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		10.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.410.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		10.410.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	12.345.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.345.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	11.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		11.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	204.719.000,00						-	204.719.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	106.500.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	106.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				3000 Eksemplar	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustaka an	6.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	98.219.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	98.219.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustaka an	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	32.101.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	-	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		32.101.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				36 Orang	31.118.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		31.118.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						548.787.000,00							548.787.000,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	470.807.000,00						-	470.807.000,00	
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	111.257.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	111.257.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.497.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		5.497.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	105.760.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		105.760.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	359.550.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	359.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.950.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	21.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		21.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	334.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		334.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	77.980.000,00						-	77.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	77.980.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	77.980.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				3000 Berkas	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3000 Berkas	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	25.480.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		25.480.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				45 Instansi	20.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		20.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						5.128.914.600,00							5.169.164.600,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.128.914.600,00							5.169.164.600,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.128.914.600,00							5.169.164.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.576.414.600,00						-	2.639.164.600,00	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.369.414.600,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.370.414.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.359.414.600,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.359.414.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	304.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	334.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		16.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		275.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	561.500.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	567.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		8.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	504.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		504.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	141.500.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	147.250.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		84.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		8.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	1.642.500.000,00						-	1.562.500.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	800.000.000,00			-	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	655.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Oki Baru Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Elara Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro Kab. Buru Selatan, Leksula, Nalbessy	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	750.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Simi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Lumoy Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Pasir Putih Kab. Buru Selatan, Leksula, Waeturen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	825.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	880.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				40 Orang	75.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi Kab. Buru Selatan, Ambalau, Selasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil</i>				10 Unit	750.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama Kab. Buru Selatan, Waesama, Waesili Kab. Buru Selatan, Ambalau, Ulima Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Fogi Kab. Buru Selatan, Leksula, Nalbessy	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.500.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	27.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan</i>				20 Rekomen dasi	17.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		27.500.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	635.000.000,00						-	667.500.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	85.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	92.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>				40 Kelompok	85.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		92.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	550.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	575.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waefusi Kab. Buru Selatan, Waesama, Waetawa Kab. Buru Selatan, Leksula, Tifu Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				6 Unit	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Leku Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Mangeswaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		220.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	275.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	90.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	85.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	85.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Fatmite	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						2.805.763.000,00							4.638.300.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						261.299.000,00							725.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						261.299.000,00							725.000.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	16.299.000,00						-	25.000.000,00	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	16.299.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.299.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	205.000.000,00						-	600.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				6 Objek	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				5 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				12 Objek	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				3 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi				1 Objek	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.544.464.000,00							3.913.300.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.544.464.000,00							3.913.300.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.935.326.500,00						-	2.453.300.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.350.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.350.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.200.521.000,00			-	-	-	-	1.504.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.198.171.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	2.350.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	148.349.500,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	120.099.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	78.930.000,00			-	-	-	-	98.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	72.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	364.170.000,00			-	-	-	-	488.300.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	350.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		472.300.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	141.006.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	302.037.500,00						-	850.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	130.077.500,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Lokasi	60.077.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	70.024.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	70.024.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	101.936.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	51.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	157.100.000,00						-	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	157.100.000,00			-	-	-	-	310.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	63.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Promosi	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-			-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN						7.599.185.000,00							7.979.144.251,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.599.185.000,00							7.979.144.251,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						7.599.185.000,00							7.979.144.251,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.297.772.000,00						-	5.562.660.600,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.700.000,00			-	3. Peningkatan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	4.935.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.700.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		4.935.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.983.644.000,00			-	3. Peningkatan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	4.182.826.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	3.980.473.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		4.179.496.650,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.171.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		3.329.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	314.290.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	330.004.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.358.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		56.025.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.244.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		2.356.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.250.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		7.612.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		5.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	246.438.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		258.759.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	896.250.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	941.062.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		9.922.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		6.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	880.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		924.840.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.888.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	103.832.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		88.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	14.888.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		15.632.400,00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	2.001.413.000,00						-	2.101.483.651,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	1.851.413.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	1.943.983.651,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				6 Laporan	417.583.750,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		438.462.938,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				6 Laporan	1.433.829.250,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		1.505.520.713,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	157.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain															
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				300 Ekor	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		157.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
3.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	300.000.000,00						-	315.000.000,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-	-	315.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa															
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				6 Unit	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan produkti vitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	-		315.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							4.276.180.000,00							4.795.905.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.276.180.000,00							4.795.905.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.850.721.000,00							4.292.635.000,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.174.195.000,00						-	2.382.115.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.710.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	15.920.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	15.710.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		15.920.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.364.280.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.478.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	1.364.280.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.478.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	371.885.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	462.720.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	47.535.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		56.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	15.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		16.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.860.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	296.850.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		377.420.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	338.320.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	340.825.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		7.715.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	17.620.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		18.710.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	314.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		314.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	875.684.000,00						-	984.570.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	875.684.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Sarana Perdagangan	-	984.570.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Unit	875.684.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Sarana Perdagangan		984.570.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	174.250.000,00						-	181.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	174.250.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Pengawasan Pendistribusian barang dari luar Kota	-	181.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				1 Laporan	174.250.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Pengawasan Pendistribusian barang dari luar Kota		181.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	321.700.000,00						-	383.400.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	321.700.000,00			-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	383.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				20 Pelaku Usaha	321.700.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		383.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	304.892.000,00						-	361.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	304.892.000,00			-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-	-	361.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				50 Unit	203.261.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		206.350.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				120 Orang	101.631.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggula ngan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		154.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						425.459.000,00							503.270.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	342.333.000,00						-	410.270.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	342.333.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	410.270.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	342.333.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		410.270.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	83.126.000,00						-	93.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	83.126.000,00			-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-	-	93.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				12 Dokumen	83.126.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	-		93.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						26.253.858.000,00							28.879.243.800,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.253.858.000,00							28.879.243.800,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						26.253.858.000,00							28.879.243.800,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	23.978.594.000,00						-	26.376.453.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.808.221.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	14.089.043.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	12.792.021.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		14.071.223.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	16.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		17.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25.022.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	27.524.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	25.022.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		27.524.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.555.334.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	2.810.867.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.252.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		43.177.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	131.507.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		144.657.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	829.770.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		912.747.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39.184.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		43.102.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	310.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		341.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	408.859.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		449.744.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	796.762.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		876.438.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.211.280.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	1.332.408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	86.580.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		95.238.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	107.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		118.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.017.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.119.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.041.600.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	2.245.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	1.063.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.169.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	60.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	918.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		1.009.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	1.192.837.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	1.312.120.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	669.837.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		736.820.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	250.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		275.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	272.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		299.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-	-			-	4.144.300.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	4.558.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	1.602.900.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		1.763.190.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				11 Paket	1.296.900.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		1.426.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				13 Paket	1.244.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		1.368.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	2.275.264.000,00						-	2.502.790.400,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	2.275.264.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	2.502.790.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	2.275.264.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		2.502.790.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA						1.155.146.000,00							1.157.293.713,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						840.086.780,00							842.234.493,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						840.086.780,00							842.234.493,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	282.346.022,00						-	242.234.493,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	10.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 laporan Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		10.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	155.405.003,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	158.175.253,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	34.885.003,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		36.629.253,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	20.520.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		21.546.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 paket Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	48.708.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	5.114.340,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	48.708.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.114.340,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.233.019,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	14.944.900,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan Laporan	14.233.019,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.944.900,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	54.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		54.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	557.740.758,00						-	600.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	557.740.758,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	600.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	196.020.758,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	261.720.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		300.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	X	NON URUSAN						315.059.220,00							315.059.220,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						315.059.220,00							315.059.220,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	315.059.220,00						-	315.059.220,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	315.059.220,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	315.059.220,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan Laporan	315.059.220,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Waenono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		315.059.220,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							644.755.000,00						685.300.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						644.755.000,00							685.300.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						644.755.000,00							685.300.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	520.755.000,00						-	547.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	3.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	25.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	126.555.000,00			-	-	-	-	130.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	82.555.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		83.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	289.200.000,00			-	-	-	-	290.300.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	283.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		283.300.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.000.000,00			-	-	-	-	72.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	124.000.000,00						-	138.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	121.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		101.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	14.000.000,00			-	-	-	-	17.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						8.615.209.130,00							9.806.730.043,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.615.209.130,00							9.806.730.043,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.615.209.130,00							9.806.730.043,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	885.673.350,00						-	1.304.240.685,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.590.000,00			-	-	-	-	8.349.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	7.590.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.349.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	76.948.300,00			-	-	-	-	414.643.130,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	76.948.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.643.130,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	288.246.850,00			-	-	-	-	317.071.535,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	71.472.600,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.619.860,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	13.701.600,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.071.760,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.999.450,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.099.395,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	192.073.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		211.280.520,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	433.688.200,00			-	-	-	-	477.057.020,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.707.200,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.977.920,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.321.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.553.100,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	418.660.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.526.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	79.200.000,00			-	-	-	-	87.120.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	79.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		87.120.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	7.729.535.780,00						-	8.502.489.358,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	7.729.535.780,00			-	-	-	-	8.502.489.358,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	7.553.985.780,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.309.384.358,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	175.550.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		193.105.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						1.062.400.000,00							1.168.640.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.062.400.000,00							1.168.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.062.400.000,00							1.168.640.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	758.196.000,00						-	834.015.600,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.475.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	21.422.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	19.475.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		21.422.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	65.610.200,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	72.171.220,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	65.610.200,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		72.171.220,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.410.800,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	308.451.880,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.133.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		58.446.300,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			-				-	10.975.000,00	-	-	-	-	-		12.072.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.717.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		20.588.700,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	197.585.800,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		217.344.380,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	320.700.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	352.770.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		6.930.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	314.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		345.840.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.000.000,00			-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	79.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		79.200.000,00	BAGIAN HUKUM
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	304.204.000,00						-	334.624.400,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	304.204.000,00			-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-	-	334.624.400,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	185.763.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	-		204.339.300,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				0 Kasus	57.521.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		63.273.100,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	60.920.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningka tan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk mew ujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-		67.012.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN UMUM						11.000.000.000,00							11.946.697.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						11.000.000.000,00							11.946.697.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						11.000.000.000,00							11.946.697.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.000.000.000,00						-	11.946.697.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	45.800.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	50.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	21.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		25.200.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	24.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		25.300.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	114.377.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	104.377.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	114.377.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		104.377.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	854.720.500,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.187.820.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		35.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	158.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		62.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.200.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		40.320.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		26.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		800.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	22.520.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		24.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	826.530.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.350.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	576.020.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.000.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	250.510.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		350.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	987.539.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.486.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	40.739.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		46.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		440.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	546.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.000.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	312.033.300,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	350.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	88.053.300,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	223.980.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	5.239.333.466,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	5.238.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	2.619.666.733,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.619.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2.619.666.733,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.619.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	2.619.666.734,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.180.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1.309.833.367,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.090.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	1.309.833.367,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.090.000.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN ORGANISASI						638.900.000,00							780.470.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						638.900.000,00							780.470.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						638.900.000,00							780.470.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	638.900.000,00						-	780.470.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35.090.000,00			-	-	-	-	36.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	35.090.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	191.631.800,00			-	-	-	-	206.554.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	14.242.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.211.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.655.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.640.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.800.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	164.094.800,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.543.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	44.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	44.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	228.120.000,00			-	-	-	-	347.930.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.520.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.750.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.200.001,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.780.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	218.399.999,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		335.400.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	86.058.200,00			-	-	-	-	89.986.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				44 Dokumen	23.166.200,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.986.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	21.092.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER						665.600.000,00							1.089.549.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						665.600.000,00							1.089.549.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						665.600.000,00							1.089.549.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	665.600.000,00						-	1.089.549.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	5.500.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.500.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	85.250.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		85.250.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	116.011.200,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	185.900.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.173.200,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		18.700.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.080.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		13.200.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.996.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		11.000.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	86.762.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		143.000.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	77.000.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		77.000.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	325.020.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	327.099.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.620.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.699.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	34.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		34.800.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	285.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		285.600.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	72.000.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		72.000.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	163.068.800,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	336.800.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				50 Laporan	136.293.800,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		231.200.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				50 Laporan	26.775.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		105.600.000,00	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER
		BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						1.290.500.000,00							1.291.935.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.290.500.000,00							1.291.935.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.290.500.000,00							1.291.935.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	526.789.000,00						-	528.224.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.528.000,00			-	-	-	-	15.528.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.578.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.578.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.950.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.650.000,00			-	-	-	-	7.875.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.650.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.875.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	95.538.000,00			-	-	-	-	95.538.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				7 Orang	95.538.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.538.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	88.973.000,00			-	-	-	-	88.973.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	33.379.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.379.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	16.107.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.107.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	4.437.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.437.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	33.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.050.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	266.100.000,00			-	-	-	-	266.310.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.310.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	264.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		264.000.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	-	-	-	54.000.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.000.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	763.711.000,00						-	763.711.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	763.711.000,00			-	-	-	-	763.711.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	691.750.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		691.750.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	71.961.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		71.961.000,00	BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						725.307.900,00							930.921.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						710.865.900,00							908.921.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						710.865.900,00							908.921.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	465.055.900,00						-	501.921.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	116.515.900,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	199.221.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.535.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		8.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	102.980.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		172.221.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	292.200.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	292.700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	283.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		283.200.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.340.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	10.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.340.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	245.810.000,00						-	407.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	245.810.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	407.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	99.085.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		170.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	146.725.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		237.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X	NON URUSAN						14.442.000,00							22.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.442.000,00							22.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.442.000,00						-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	14.442.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	22.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.442.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		22.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		SEKRETARIAT DPRD						27.888.998.000,00							36.458.005.800,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						27.888.998.000,00							36.458.005.800,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						27.888.998.000,00							36.458.005.800,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	19.978.336.000,00						-	20.118.516.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	57.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	57.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.969.525.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.969.525.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	2.961.678.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		2.961.678.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.847.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		7.847.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.019.513.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	3.019.513.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	276.733.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		276.733.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	152.310.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		152.310.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.110.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		2.110.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	48.923.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		48.923.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		53.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	363.546.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		363.546.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	237.760.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	477.940.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				200 Unit	187.760.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		187.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				52 Unit	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		290.180.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.225.800.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.225.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	19.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		19.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	228.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		228.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.978.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.978.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	177.990.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	177.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	163.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		163.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.990.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	11.002.548.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	11.002.548.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	10.067.520.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		10.067.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	410.774.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		410.774.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	524.254.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		524.254.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	288.200.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	188.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				1 Laporan	188.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		188.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	7.910.662.000,00						-	16.339.489.800,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	0,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	47.250.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	47.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	9.450.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	75.600.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	75.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	959.256.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.085.456.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	453.056.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		453.056.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	405.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		405.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	75.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		75.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		75.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		75.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	3.912.049.200,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				20 Laporan	902.549.200,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				20 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	3.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	19.450.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.449.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.439.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	9.450.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		9.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	2.897.056.800,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	12.681.943.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	2.404.169.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		3.404.169.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				20 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		3.404.169.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.404.169.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	408.120.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		2.404.169.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	65.267.800,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		65.267.800,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						8.117.363.600,00							8.523.231.780,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.117.363.600,00							8.523.231.780,00	
	5.01	PERENCANAAN						7.964.871.300,00							8.363.114.865,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.521.224.500,00						-	5.797.285.725,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	259.501.200,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	272.476.260,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	161.996.800,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		170.096.640,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	97.504.400,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		102.379.620,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Berita Acara	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.864.983.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	4.058.232.150,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	3.851.564.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		4.044.142.200,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13.419.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.089.950,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	23.206.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	24.366.300,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	23.206.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		24.366.300,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	813.383.300,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	854.052.465,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.460.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.533.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	102.548.400,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		107.675.820,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.260.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.223.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	54.127.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		56.833.875,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	635.987.400,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		667.786.770,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.741.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	39.628.050,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				13 Unit	37.741.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		39.628.050,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	453.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	475.650.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	8.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		8.820.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	60.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		63.630.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	384.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		403.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.410.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	72.880.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				6 Unit	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		69.300.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	3.410.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.580.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.954.831.400,00						-	2.052.572.970,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	1.408.067.500,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.478.470.875,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	69.639.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		73.120.950,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0 Berita Acara	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	170.035.600,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		178.537.380,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				0 Usulan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	1.168.392.900,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.226.812.545,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	0,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				0 Orang	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				0 Buku	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	345.358.700,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	362.626.635,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	147.426.100,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		154.797.405,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	197.932.600,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		207.829.230,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	201.405.200,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	211.475.460,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	118.397.100,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		124.316.955,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	83.008.100,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		87.158.505,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	488.815.400,00						-	513.256.170,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	132.091.600,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	138.696.180,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	70.618.400,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		74.149.320,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	61.473.200,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		64.546.860,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	356.723.800,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	374.559.990,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	177.810.400,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		186.700.920,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	-	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	69.066.400,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		72.519.720,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	109.847.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		115.339.350,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	0,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						152.492.300,00							160.116.915,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	152.492.300,00						-	160.116.915,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	0,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				0 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	0,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	152.492.300,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	160.116.915,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	152.492.300,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		160.116.915,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						19.587.000.000,00							21.555.700.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						19.587.000.000,00							21.555.700.000,00	
	5.02	KEUANGAN						19.587.000.000,00							21.555.700.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.412.000.000,00						-	15.854.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	365.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-	-	401.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	115.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		126.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.490.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	11.539.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				1 tahun 0	10.000.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		11.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	-	-	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	440.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-	-	484.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		187.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	360.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	396.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.430.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.573.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		27.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	235.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		258.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 tahun Paket	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 tahun Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 tahun Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 tahun Laporan	700.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		770.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 tahun Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	330.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	364.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 tahun Unit	140.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		154.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 tahun Unit	190.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	913.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.004.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 tahun Laporan	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		7.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 tahun Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 tahun Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 tahun Laporan	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		880.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	92.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 tahun Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		92.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	3.720.000.000,00						-	4.101.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	2.165.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.391.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		615.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		148.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	160.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		176.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	675.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	742.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		126.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	880.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	968.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		99.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		99.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		99.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	0,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	1.455.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.455.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		137.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		121.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	120.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						3.281.686.000,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.281.686.000,00							0,00	
	5.02	KEUANGAN						3.281.686.000,00							0,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.942.331.500,00						-	0,00	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.923.572.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	1.923.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	58.501.000,00			-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	58.501.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	258.258.500,00			-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	40.411.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.620.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	66.837.500,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	140.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	636.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	19.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	616.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	339.354.500,00						-	0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	339.354.500,00			-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	35.120.400,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	89.900.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	47.433.700,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5 Layanan	93.649.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	73.251.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA						8.132.669.000,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.132.669.000,00							0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						5.432.669.000,00							0,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.690.741.000,00						-	0,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.825.569.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.825.569.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	430.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	80.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	351.172.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			-				-	10.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	108.372.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				26 Laporan	232.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	2.741.928.000,00						-	0,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN</i>				5 Laporan	300.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				28 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	2.391.928.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				150 Orang	2.391.928.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.700.000.000,00							0,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	2.700.000.000,00						-	0,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	1.500.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				50 Orang	1.500.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	1.200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				150 Dokumen	1.200.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						3.299.165.000,00							0,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						3.223.516.750,00							0,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						3.223.516.750,00							0,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.548.688.250,00						-	0,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.147.115.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.143.415.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.700.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	184.441.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.815.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	6.626.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	155.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.532.250,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	5.532.250,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	161.600.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	153.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	436.160.000,00						-	0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	372.978.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	25.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				30 Laporan	63.150.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	41.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	10.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				82 Laporan	172.764.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				45 Dokumen	59.764.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	63.182.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	10.980.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				45 Laporan	52.202.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	238.668.500,00						-	0,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	238.668.500,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				45 perangkat daerah	100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				45 perangkat daerah	22.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Kegiatan	101.404.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				45 perangkat daerah	15.264.500,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X	NON URUSAN						75.648.250,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						75.648.250,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	75.648.250,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.532.250,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5.532.250,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.116.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	4.116.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	66.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		KECAMATAN NAMROLE							2.472.917.000,00							2.820.917.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.472.917.000,00							2.820.917.000,00		
	7.01	KECAMATAN						2.472.917.000,00							2.820.917.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.367.917.000,00						-	2.646.917.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	17.500.000,00	KECAMATAN NAMROLE	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.500.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.532.917.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.663.417.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				26 Orang/bulan	1.526.917.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.656.917.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.500.000,00	KECAMATAN NAMROLE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	196.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	317.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		25.500.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		16.500.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		5.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	164.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		270.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	503.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	507.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.500.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.500.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	160.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		165.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				40 Laporan	324.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		324.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	142.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		72.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		70.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	20.000.000,00						-	31.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	31.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		31.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	20.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				0 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	20.000.000,00						-	36.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	36.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				51 Orang	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		36.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	45.000.000,00						-	82.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	45.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	82.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		41.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				17 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		41.000.000,00	KECAMATAN NAMROLE
		KECAMATAN LEKSULA						3.314.446.040,00							3.413.648.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.314.446.040,00							3.413.648.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.314.446.040,00							3.413.648.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.217.015.600,00						-	3.305.648.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.519.248.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	2.519.248.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	2.519.248.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		2.519.248.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	165.846.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	233.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.675.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.216.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		33.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.361.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	90.594.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	467.400.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	469.400.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	16.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		17.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	446.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		446.400.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.521.600,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	84.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		72.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	10.521.600,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	44.440.200,00						-	48.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	19.650.200,00			-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-	-	22.500.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	19.650.200,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan kualitas pertumbuh an ekonomi melalui investasi, pemberday aan masyarakat dan penge mbangan pariwisata	-		22.500.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	24.790.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	26.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	24.790.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		26.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	52.990.240,00						-	59.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	52.990.240,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	59.500.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19 Dokumen	15.085.400,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				19 Dokumen	37.904.840,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		39.500.000,00	KECAMATAN LEKSULA
		KECAMATAN WAESAMA						2.192.103.000,00							2.192.103.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.192.103.000,00							2.192.103.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.192.103.000,00							2.192.103.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.093.571.000,00						-	2.093.571.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.835.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	13.835.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.909.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		2.909.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.892.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.892.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	3.880.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.880.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.154.000,00	-	-	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.154.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.301.080.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.301.080.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.297.503.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.297.503.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.577.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		3.577.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	232.835.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	232.835.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.245.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		2.245.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.008.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		31.008.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.152.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		41.152.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.750.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		13.750.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	144.680.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		144.680.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	91.921.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	91.921.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	29.732.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		29.732.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	62.189.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		62.189.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	315.900.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	315.900.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.300.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	297.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		297.600.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	138.000.000,00	KECAMATAN WAESAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	73.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		73.000.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	65.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		65.000.000,00	KECAMATAN WAESAMA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	12.000.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		12.000.000,00	KECAMATAN WAESAMA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	26.225.000,00						-	26.225.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	26.225.000,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	26.225.000,00	KECAMATAN WAESAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	26.225.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		26.225.000,00	KECAMATAN WAESAMA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	42.970.000,00						-	42.970.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	42.970.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	42.970.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				36 Orang	15.691.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		15.691.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				22 Orang	12.799.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		12.799.000,00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	14.480.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.480.000,00	KECAMATAN WAESAMA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	17.337.000,00						-	17.337.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	17.337.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	17.337.000,00	KECAMATAN WAESAMA	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	17.337.000,00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		17.337.000,00	KECAMATAN WAESAMA	
		KECAMATAN KEPALA MADAN							2.577.337.750,00							2.577.764.750,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.577.337.750,00							2.577.764.750,00		
	7.01	KECAMATAN						2.577.337.750,00							2.577.764.750,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.473.797.750,00						-	2.473.797.750,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN	
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		20.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.353.839.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	1.353.839.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.339.385.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		1.339.385.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	14.454.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		14.454.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.398.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	24.398.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	24.398.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		24.398.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		30.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	251.648.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	251.648.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.884.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		10.884.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		50.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	15.753.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		15.753.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	175.011.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		175.011.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	285.233.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	285.233.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	95.593.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		95.593.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	49.960.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		49.960.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	49.680.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		49.680.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		45.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		45.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	397.736.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	397.736.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		7.500.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.836.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		4.836.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		63.800.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	321.600.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		321.600.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.943.750,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	110.943.750,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	110.943.750,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		110.943.750,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	8.540.000,00						-	8.967.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	8.540.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	8.967.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	8.540.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		8.967.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	25.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		25.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	70.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				16 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		35.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				16 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		35.000.000,00	KECAMATAN KEPALA MADAN
		KECAMATAN AMBALAU						1.465.217.900,00							1.766.524.900,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.465.217.900,00							1.766.524.900,00	
	7.01	KECAMATAN						1.465.217.900,00							1.766.524.900,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.353.217.900,00						-	1.594.524.900,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	22.999.900,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		5.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		5.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		12.999.900,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	691.192.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	770.525.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	681.192.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		760.525.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		10.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	168.025.900,00			-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	254.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		70.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		12.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.025.900,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		12.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	115.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		160.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	405.000.000,00			-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	425.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		11.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		30.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	384.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		384.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.000.000,00			-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	122.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		72.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		50.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	42.000.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	22.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-		25.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	20.000.000,00			-	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		30.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	15.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1 Orang	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		25.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	55.000.000,00						-	92.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	55.000.000,00			-	5. Peningkatan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	-	92.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		35.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningka tan pemban gunan infra struktur, konektivitas wilayah dan pengel olaan lingkungan hidup secara berk elanjutan	-		57.000.000,00	KECAMATAN AMBALAU
		KECAMATAN FENA FAFAN						1.562.445.468,00							1.381.865.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.562.445.468,00							1.381.865.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.562.445.468,00							1.381.865.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.444.766.448,00						-	1.257.865.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	935.503.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	935.503.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	935.503.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		935.503.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	187.400.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	221.362.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bln Paket	29.217.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		30.362.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	33.200.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bln Paket	4.480.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	120.503.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		150.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	254.700.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12.300.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		14.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	242.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		0,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67.163.448,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	87.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		72.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.163.448,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	51.102.900,00						-	55.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	19.179.600,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19 Desa Laporan	19.179.600,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		22.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	31.923.300,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Desa Laporan	31.923.300,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		33.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	66.576.120,00						-	69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	66.576.120,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	69.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	21.228.600,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		23.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				19 Desa Dokumen	45.347.520,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		46.000.000,00	KECAMATAN FENA FAFAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.406.565.400,00							5.809.996.740,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.406.565.400,00							5.809.996.740,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.406.565.400,00							5.809.996.740,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.472.251.000,00						-	2.494.250.900,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.732.402.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.733.002.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22 Orang/bulan	1.726.335.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		1.726.335.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	6.067.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.667.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.330.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	29.330.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	29.330.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		29.330.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	189.909.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	208.899.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		2.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.409.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		21.349.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		7.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	155.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		170.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	59.810.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	59.819.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	39.810.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		39.819.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	376.800.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	379.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		19.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	352.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		352.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	84.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		84.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	800.000.000,00						-	968.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	800.000.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	968.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		968.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	66.400.000,00						-	73.040.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	66.400.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	73.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	66.400.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-		73.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	32.250.000,00						-	35.475.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	32.250.000,00			-	6. Peningka tan tata kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	-	35.475.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	32.250.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		35.475.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	1.548.709.600,00						-	1.703.580.560,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	1.548.709.600,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.703.580.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	1.548.709.600,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		1.703.580.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	486.954.800,00						-	535.650.280,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	486.954.800,00			-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	535.650.280,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	285.250.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		313.775.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150 Orang	50.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	151.704.800,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		166.875.280,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							590.586.997.666,00							262.915.355.182,00	